

Mengatasi Permasalahan Administrasi Pernikahan dan Kependudukan Melalui Inovasi Pelayanan Publik Jalan Berdua di Kota Pasuruan

Aulia Annisa Nabila, Ali Roziqin, Muhammad Kamil

Implementasi Kebijakan Program Magang MSIB Batch 5 Dalam Meningkatkan Kemampuan Project Business Researcher di PT Indekstat Konsultan Indonesia

Arinta Putri Dewanti, Abdul Rahman, Nida Handayani

Partisipasi Masyarakat alam Kelompok Kegiatan (Poktan) Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung

Ni Putu Anjelina, Lilik Antarini, Nyoman Sumawidayani

Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Body Care Herborist di Sidoarjo

Risqy Maudy Inayah, Dhinda Lintang Cahya Gumilang, Zahra Nur Annisa, Nindya Kartika Kusmayati, Noneng R. Sukatmadiredja

Innovation Capability and Learning Capability To Individual Performace : Well Being Moderation (Case Study of Small and Medium Enterprises: Freez Food Baby Porridge Sedati)

Fransisca Eri Yulianti, Wahyu Eko Pujianto

Menilik Dampak Kebijakan Peningkatan PPN 11% Pada Masyarakat Indonesia Sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Nabila Septia Rosa

Implementasi Kebijakan BLT Berdasarkan Analisis Van Meter Dan Van Horn (Magang Kerja Di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu)

Asih Widi Lestari, Gisela Mburu Amma, Firman Firdausi

Empowering Family Welfare In Corpse Care Simulation: A Case Study In Punggul Village, East Java

Nandya Dwi Agusti, Cantika Dwi Maydina, M. Firdaus Kurniawan

JURNAL APLIKASI ADMINISTRASI MEDIA ANALISA MASALAH ADMINISTRASI

Terbit dua kali dalam satu tahun pada Bulan Mei dan Desember. Berisi hasil penelitian, analisis kritis konsep dan tinjauan buku dalam bidang Administrasi Publik, Administrasi Bisnis, dan Ilmu-Ilmu Sosial

Pelindung

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah Surabaya

EDITORIAL TEAM

Editor in chief

Edi Suhardono

Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

Managing Editor

Elli Setiyo Wahyuni

Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

Administration

Chaliem Mubayanah

Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

Diterbitkan oleh

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah Surabaya

Alamat Redaksi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah Surabaya

Gedung Pulau Bras Lantai 1 Ruang MAP

Jl. Arif Rahman Hakim No.150, Surabaya - 60111

Website

<https://jaa.hangtuah.ac.id/>

Editor in board:

Agus Subianto (SCOPUS ID: 57217912018)
Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

Sri Umiyati (SINTA ID: 6654316)
Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

Budi Rianto (SINTA ID: 6111890)
Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

Arfah (SINTA ID: 5989045)
Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

Agustinus Subarsono (SINTA ID: 6039246)
Faculty of social and political sciences, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Dewi Casmiwati (Scopus ID: 57224510545)
Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

Moh. Musleh (SINTA ID: 6838526)
Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

Reviewer:

Indra Kertati (SINTA ID: 6121850)
Universitas 17 Agustus Semarang

V. Rudy Handoko (SINTA ID: 6000096)
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Sulistyanto (SCOPUS ID: 57221332065)
Universitas Hang Tuah

Abdurrahman (SINTA ID: 6029143)
Universitas Madura

Sri Juni Woro Astuti (SINTA: 5973181)
Universitas Wijaya Putra, Indonesia

Dian Ferriswara (SINTA ID: 6736310)
Universitas Dr. Soetomo

Mengatasi Permasalahan Administrasi Pernikahan dan Kependudukan Melalui Inovasi Pelayanan Publik Jalan Berdua di Kota Pasuruan

Aulia Annisa Nabila¹, Ali Roziqin^{2*}, Muhammad Kamil³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 9, 2024

Revised May 16, 2024

Accepted May 16, 2024

Available online May 25, 2024

Keywords:

Public service innovation;
service; population
administration; gift; marriage.



This is an open access article under the
CC BY-SA license.

Copyright © 2024 by Author. Published
by Universitas Hang Tuah

ABSTRACT

The marriage registration process is one of the important stages in validating a marriage legally. This process often requires complex efforts, takes time and costs significant money, especially for couples who come from areas far from population administration offices or religious courts. To overcome this challenge, the Pasuruan City Government has introduced an innovative Double Road service. This service allows couples to register their marriage as well as change their marital status on their Family Card and Electronic KTP documents. This second road innovation has the impact of improving population administration services regarding changes in marital status on Family Cards and Electronic KTPs. This research aims to describe the problems that arise in the Innovation program and the efforts made to overcome the problems that arise in the Dual Road Innovation program in Pasuruan City. This research uses a qualitative descriptive approach with primary and secondary data sources. Primary data was obtained through interviews, observation and documentation related to Jalan Berdua innovation. Secondary data is in the form of documents related to research. Data collection techniques involve observation, open interviews, and documentation. This research will provide an overview of the problems faced in implementing the Double Road Innovation in Pasuruan City and the efforts that have been made to overcome them. The results of this research are: Overall, the Jalan Berdua program in Pasuruan City is a successful example of how innovation in population administration services can improve efficiency, accessibility, community satisfaction, inter-agency cooperation, and effective use of data.

1. INTRODUCTION

Penulisan Kependaftaran perkawinan adalah salah satu persyaratan penting dalam melangsungkan sebuah pernikahan secara sah dan resmi. Pendaftaran perkawinan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang telah menikah. Proses pendaftaran perkawinan tidak selalu sederhana bagi pasangan yang ingin menikah. Mereka harus mengurus berbagai dokumen persyaratan kependudukan dan hadir dalam sidang pengadilan agama (Givo Almuttaqin, 2016). Proses ini dapat memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, apalagi jika pasangan tersebut berasal dari wilayah yang jauh dari kantor pencatatan sipil atau pengadilan agama (Zamharira & Cahyani, 2019). Kota Pasuruan merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang melaksanakan berbagai pelayanan publik, salah satunya adalah pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi kependudukan. Mengingat tugas dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sangat banyak dalam hal kependudukan, tentunya banyak masalah dalam melakukan tugas tersebut. Banyak yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yaitu melayani pengurusan Akta Kelahiran, Pembuatan KTP, Akta Kematian, Kartu Keluarga dsb.

*Corresponding author.

E-mail: aliroziqin@umm.ac.id

Salah satu permasalahan yang ada pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan adalah soal pelayanan kepada masyarakat yang akan mengurus pendaftaran perkawinan, selama ini kita ketahui bahwa dokumen yang akan dijadikan persyaratan perkawinan yang belum sesuai. Sehingga ada beberapa masyarakat lebih memilih untuk tidak merubah dokumennya dan persyaratannya akan banyak untuk merubah dokumen sesuai dengan persyaratan yang ada. Maka dari itu masyarakat tidak langsung merubah dokumen yang akan dijadikan persyaratan nikah pada hari itu. Mengenai upaya untuk mempermudah proses pendaftaran perkawinan, Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengembangkan inovasi layanan Jalan Berdua (Kerjasama Pelayanan Penerbitan KK & KTP-el). Layanan ini bertujuan untuk memudahkan pasangan yang ingin menikah dalam proses pendaftaran kependudukan dan sidang pengadilan agama. Melalui layanan Jalan Berdua, pasangan melampirkan berkas persyaratan perubahan status kawin KK & KTP-el ke KUA pada saat pendaftaran kawin. Setelah KUA melakukan entry data maka pihak Dispendukcapil memproses data tersebut untuk diterbitkan dokumen KK & KTP-el dan pihak Dispendukcapil akan mengirimkan dokumen melalui kurir secara gratis karena biaya tersebut ditanggung oleh Pemerintah Kota Pasuruan. (Sururama et al., 2019).

Hadirnya inovasi layanan Jalan Berdua, diharapkan proses pendaftaran perkawinan menjadi lebih mudah bagi pasangan yang ingin menikah. Tujuan lainnya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di Kota Pasuruan secara keseluruhan. Masyarakat diharapkan dapat mendaftar tanpa perlu menghadapi antrian panjang seperti sebelumnya, termasuk dalam proses pendaftaran perkawinan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Pasuruan. Pada situasi ini, inovasi layanan Jalan Berdua muncul sebagai alternatif untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan tentang perubahan status kawin pada KK & KTP-el, dengan adanya inovasi Jalan Berdua ini penduduk Kota Pasuruan yang mencatatkan perkawinannya di KUA dan sekaligus dapat melakukan pengurusan perubahan status kawin pada Kartu Keluarga dan KTP-el, petugas KUA akan melakukan entry data perubahan status kawin pada Kartu Keluarga Dan KTP-el yang terkoneksi kedalam data base Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.

Selanjutnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil akan menerbitkan KK dan KTP-el yang sudah berubah status kawin dan mengirimkan dokumen KK dan KTP-el via kurir ke rumah penduduk (Herawati, 2012). Inovasi layanan Jalan Berdua juga diharapkan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di Kota Pasuruan. Adanya pendaftaran perkawinan secara *online*, pasangan akan diberikan nomor pendaftaran yang dapat digunakan untuk memantau status pendaftaran mereka. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dan kekeliruan dalam proses pendaftaran perkawinan. Ke depannya, inovasi layanan Jalan Berdua ini diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Pasuruan. Adanya kemudahan bagi pasangan yang ingin menikah dalam proses pendaftaran perkawinan, diharapkan dapat mengurangi jumlah perkawinan yang tidak terdaftar secara resmi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran perkawinan yang sah. Hal ini juga akan membantu pemerintah dalam optimalisasi pendataan dan perencanaan pembangunan di Kota Pasuruan.

Kualitas Pelayanan memegang peran penting untuk mencapai tingkat kepuasan pelanggan. Citra kualitas pelayanan yang baik menjadi sudut pandang atau persepsi pihak pemerintah, melainkan berdasarkan sudut pandang pelanggan (Roziqin & Fajrina, 2021). Hal ini pelanggan yang memakai pelayanan pemerintah. Persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu pelayanan

(Machmud, 2018). Sebagaimana pendapat Kotler (1997), bahwa kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan yang terbukti bahwa pemerintah yang gagal memuaskan pelayanan akan menghadapi masalah yang kompleks umumnya pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan pengalaman buruknya kepada orang lain dan bisa dibayangkan betapa besarnya kerugian dari kegagalan memuaskan pelanggan.

Setiap pemerintahan wajib merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan sistem, kualitas sedemikian rupa, sehingga pelayanan dapat memuaskan para pelanggannya umumnya pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan pengalaman buruknya kepada orang lain dan bisa dibayangkan betapa besarnya kerugian dari kegagalan memuaskan pelanggan (Keumala & Pribadi, 2021). Oleh karena itu, setiap pemerintahan wajib merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan sistem, kualitas sedemikian rupa, sehingga pelayanan dapat memuaskan para pelanggannya. Setiap pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan (Wayan Erwin et al., 2023). Standar pelayanan merupakan ukuran yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Pelayanan publik dapat dijadikan standar tolak ukur dari hasil kinerja pemerintah itu sendiri sudah berjalan dengan baik atau masih ada yang perlu dibenahi. Jika kualitas pelayanan publik tersebut belum berhasil terwujud sesuai tujuan maka pelayanan publik belum berjalan dengan baik. Pada kenyataannya, pelayanan publik di Kota Pasuruan belum mencapai kelengkapan yang diharapkan dalam administrasi kependudukan (Aziz, 2019). Dalam kesimpulannya, inovasi layanan Jalan Berdua merupakan langkah inovatif yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan adanya layanan ini, diharapkan proses pendaftaran perkawinan dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Sosialisasi yang intensif, koordinasi yang baik antarinstansi, penggunaan teknologi informasi, serta adopsi inovasi oleh daerah lain dapat menjadi kunci kesuksesan dalam implementasi layanan Jalan Berdua ini.

2. METHODS

Dalam penelitian mengenai Inovasi Jalan Berdua (Kerjasama Pelayanan Penerbitan KK & KTP-el) di Kota Pasuruan, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian dengan menggunakan peristiwa, fenomena, pemikiran, pengamatan, dan lain-lain (Ahyar & Juliana Sukmana, 2020). Penelitian kualitatif menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti, menggunakan peneliti sebagai instrumen (Ahyar et al., 2020, p. 277). Pendekatan kualitatif dipilih agar membantu peneliti memberikan gambaran secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta ada dilapangan mengenai pembahasan untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Inovasi Layanan Jalan Berdua (Kerjasama Pelayanan Penerbitan KK & KTP-el) di Kota Pasuruan. Tujuan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif adalah untuk mengkaji mengenai Inovasi Layanan Jalan Berdua (Kerjasama Pelayanan Penerbitan KK & KTP-el) di Kota Pasuruan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus untuk mencari dan memahami sebuah kasus secara spesifik pada suatu unit individu atau kelompok untuk mengumpulkan sebuah informasi berdasarkan prosedur yang telah ditentukan.

Analisis data didasarkan pada pertimbangan efisiensi, relevansi dan keterbacaan informasi. Reduksi data melibatkan langkah-langkah seleksi, penyajian, pembuatan dan

verifikasi data. Setelah seleksi, data disederhanakan dan disajikan dengan jelas dalam tahap penyajian data, dengan kategorisasi berdasarkan instrumen pengumpulan untuk memudahkan pemahaman pembaca. Penelitian ini terdapat 5 pihak yang secara langsung terlibat dalam responden tentang inovasi Jalan Berdua terwakili oleh Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Seksi Penduduk Pindah Datang dan Pendataan penduduk, Pembina mengenai alur inovasi Jalan Berdua, Pengelola Mutase Penduduk, Staf Kantor.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga langkah analisis data, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah-langkah yang dilakukan setelah data diperoleh. Pada tahap reduksi ini peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna, dan baru. Data yang dirasa tidak dipakai disingkirkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka data-data tersebut selanjutnya dikelompok menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian (Sugiyono, 2013, p. 19). Dalam penelitian ini, setelah data diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi maka selanjutnya data diseleksi. Penyeleksian data berguna untuk menyaring mana informasi yang diperlukan dan mana yang harus dihilangkan. Setelah seleksi data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah meringkas data. Dalam tahap ini, data akan disederhanakan dan disampaikan dengan jelas agar tidak lari dari temuan yang sebenarnya. Terakhir adalah pengelompokan data. Pengelompokan data dilakukan berdasarkan teknik pengumpulan data. Data wawancara, dokumentasi dan observasi dipisahkan agar memudahkan peneliti dalam menyajikan data.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah reduksi data selesai. Penyajian data adalah bagaimana data ditampilkan dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penyajian data yang baik yakni tidak memberikan makna ambigu dan mudah dipahami oleh pembacanya (Ahyar & Juliana Sukmana, 2020). Dalam penelitian ini, penyajian data akan dikategorikan berdasarkan instrumen yang digunakan, sehingga pembaca lebih mudah memahami makna didalamnya.

c. Pembuatan dan Verifikasi

Verifikasi data adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan yang ada dalam penelitian benar. Pada proses ini juga akan dilihat hubungan, persamaan dan perbedaan untuk menarik kesimpulan sehingga menjawab pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini, verifikasi data dilakukan dengan mengecek kembali data –data yang sudah disajikan.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

1. Proses Mekanisme Inovasi Jalan Berdua

Untuk memahami secara lebih mendalam tentang peran inovasi dalam meningkatkan layanan administrasi kependudukan, kita perlu mengkaji secara rinci deskripsi program Jalan Berdua di Kota Pasuruan. Program Jalan Berdua merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Pasuruan untuk memperbaiki layanan administrasi kependudukan dengan pendekatan inovatif. Pada subbab ini, akan membahas bagaimana program ini dirancang dan mengapa inovasi ini menjadi relevan dalam konteks administrasi kependudukan. Program Jalan Berdua adalah hasil dari pemahaman pemerintah Kota Pasuruan akan tantangan yang dihadapi dalam layanan administrasi kependudukan. Sebelumnya, proses administrasi kependudukan di Kota Pasuruan seringkali diwarnai dengan antrian panjang, waktu tunggu yang lama, dan birokrasi yang rumit. Dokumen-dokumen kependudukan seperti kartu identitas penduduk (KTP) dan

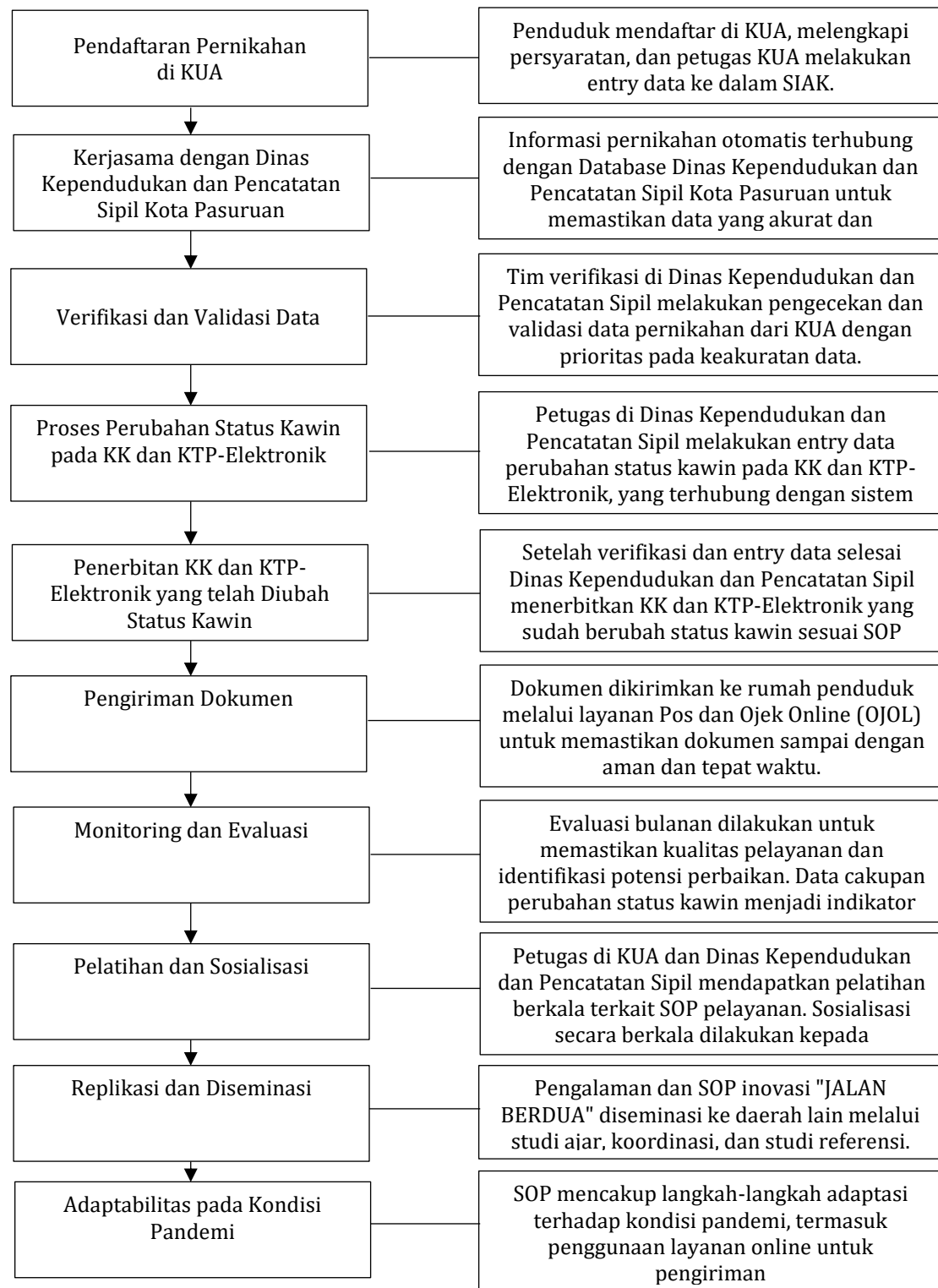
akta kelahiran seringkali memerlukan waktu yang tidak proporsional untuk diperoleh oleh masyarakat. (Sudirman, Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2022)

Inovasi Jalan Berdua dibentuk karena kurang cepatnya penduduk mengurus perubahan status kawin pada KK & KTP-el. Tahun 2019 sejumlah 1.713 orang melangsungkan perkawinan sedangkan yang mengurus perubahan status kawin pada KK dan KTP-Elektronik hanya 282 orang atau 16,46% dengan adanya perjanjian Kerjasama dengan Kementrian Agama penduduk yang telah melakukan pencatatan pernikahan di KUA dapat melakukan perubahan status kawin pada KK dan KTP-Elektronik. Petugas KUA mengentry data penduduk kedalam database Dispendukcapil, selanjutnya Dispendukcapil akan menerbitkan KK dan KTP-el yang sudah berubah status kawinnya, dokumen KK dan KTP-Elektronik akan dikirim ke rumah penduduk Via Pos atau OJOL dan di proses dalam waktu 1 hari. Berdasarkan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan dalam melayani calon pasangan yang akan menikah bisa melalui inovasi Jalan Berdua ini. Dari hasil wawancara bersama Ibu Widya Rusvitasari, SE selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk mengatakan bahwa:

"Kami bekerjasama dengan KUA mengenai inovasi Jalan Berdua ini untuk membantu masyarakat mengurus pendaftaran nikah secara cepat dalam proses waktu selama 1 hari dan dalam pengurusan pendaftaran nikah tersebut nantinya juga akan di proses mengenai pergantian status di Kartu Keluarga dan KTP-Elektronik." (Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Oktober)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Dispendukcapil dengan KUA telah melaksanakan tugas untuk mengentry data calon pasangan yang akan menikah, dan juga menghasilkan output berupa Kartu Keluarga dan KTP-Elektronik dengan status kawin bagi kedua mempelai. Dengan terciptanya inovasi Jalan Berdua ini bertujuan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan tentang perubahan status kawin, penduduk lebih mudah dan efisien dalam pengurusan perubahan status kawin. Dalam pelayanannya Dispendukcapil Kota Pasuruan tidak memandang keadaan seseorang baik suku, agama, status sosial, jenis kelamin, ataupun kondisi seperti disabilitas. Inovasi Jalan Berdua ini dilakukan dengan bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) yang menghasilkan output berupa Kartu Keluarga dan KTP-Elektronik dengan status kawin bagi kedua mempelai. Pemilihan KUA ini menjadi prioritas dikarenakan kewenangannya dalam melakukan pelayanan dan pencatatan nikah, sehingga diharapkan mempelai yang telah melangsungkan pernikahan dapat langsung memproses perubahan status kawin dan mendapatkan Kartu Keluarga mempelai berdua, KTP-Elektronik mempelai laki-laki, KTP-Elektronik mempelai Perempuan. Harapan yang ingin dibangun adalah Kerjasama dengan KUA akan meningkatkan sinergitas pelayanan dan mampu mempercepat perubahan data (update) dan meningkatkan validitas terhadap data kependudukan di Kota Pasuruan, dalam pelayanannya Dispendukcapil Kota Pasuruan tidak memandang keadaan, seseorang baik suku, agama, status sosial, jenis kelamin ataupun kondisi seperti disabilitas. Hal ini sesuai dengan kategori inovasi pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. (Leksmana et al., 2020).

Inovasi "Jalan Berdua" adalah sebuah sistem terobosan dalam proses administrasi pernikahan di Indonesia, khususnya di Kota Pasuruan. Inovasi ini dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pernikahan, mulai dari pendaftaran hingga pengiriman dokumen. SOP (Standar Operasional Prosedur) yang terstruktur dan terinci ini tidak hanya memastikan keakuratan data, namun juga meningkatkan kecepatan layanan dan inklusivitas. Berikut adalah rangkuman tahapan dan deskripsi dari setiap langkah dalam SOP inovasi "Jalan Berdua":



Gambar 1. Alur Tahapan dan Deskripsi Inovasi Jalan Berdua

2. Hambatan Program Inovasi Jalan Berdua

Pemenuhan status hayati dokumen administrasi kependudukan utamanya perubahan status kawin pada Kartu Keluarga & KTP-Elektronik yang dilakukan setelah penduduk melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama masih banyak

kendala, Hal tersebut sangat berimplikasi pada tidak terupdatenya penduduk yang melaksanakan perkawinan. Tahun 2021 sejumlah 1.525 orang, sedangkan yang mengurus perubahan status KK dan KTP-El sejumlah 347 orang atau 22.76%, hal ini disebabkan kurang cepatnya penduduk mengurus perubahan status kawin pada KK & KTP-El, pengurusan terpusat di Kantor Dispendukcapil Kota Pasuruan, lamanya pengurusan perubahan status kawin pada KK dan KTP. Menurut penjelasan dari bapak Ari Imanuddin, S.Kom selaku Kepala Seksi Penduduk Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan bahwa:

"Dari masyarakat itu sendiri memang susah untuk mengubah perubahan status pada dokumen KK dan KTP-el, kadang juga ada calon pasangan yang akan menikah di Kota Pasuruan ini tidak lengkap di dokumen persyaratannya dan ada di salah satu dokumen pasangan berbeda dengan dokumen lainnya dari situ sudah jelas pastinya membutuhkan waktu lagi untuk menyampaikan dengan dokumen lain dan akan terhambatnya proses pendaftaran nikah yang akan dilakukan oleh calon pasangan"
(Wawancara dilakukan pada tanggal 2 oktober 2023)

Meskipun Program Jalan Berdua di Kota Pasuruan dirancang untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan melalui pendekatan inovatif, beberapa hambatan muncul yang perlu diatasi agar program ini dapat mencapai kesuksesan penuh (McQuiston & Manoharan, 2021). Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus perubahan status kawin pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, sebagian penduduk mungkin belum sepenuhnya menyadari manfaat dan proses perubahan status kawin ini. Selain itu, tingkat partisipasi pemangku kepentingan, termasuk penduduk, Kantor Urusan Agama (KUA), dan instansi terkait lainnya, menjadi kunci keberhasilan program ini. Hambatan dapat muncul jika ada kurangnya dukungan atau kerjasama dari salah satu pihak tersebut.

Infrastruktur dan teknologi yang memadai juga menjadi hambatan potensial, dengan kemungkinan adanya keterbatasan akses teknologi di beberapa wilayah atau masalah teknis dalam pengolahan data. Kebijakan dan regulasi yang kompleks dan tidak sinkron antarinstansi juga dapat menghambat, mengingat proses perubahan status kawin melibatkan beberapa lembaga. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi petugas administrasi menjadi krusial untuk implementasi inovasi ini, dan hambatan dapat muncul jika tidak ada program yang memadai untuk memastikan keahlian dan pemahaman yang cukup. Terakhir, perlindungan keamanan data dan privasi menjadi kritis, dan hambatan dapat timbul jika tidak ada langkah-langkah yang memadai untuk melindungi informasi pribadi penduduk dari potensi risiko keamanan dan pelanggaran privasi. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan ini, Program Jalan Berdua di Kota Pasuruan diharapkan dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan administrasi kependudukan.

Pemenuhan status hayati dokumen administrasi kependudukan utamanya perubahan status kawin pada Kartu Keluarga & KTP-Elektronik yang dilakukan setelah penduduk melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama masih banyak kendala, Hal tersebut sangat berimplikasi pada tidak terupdatenya penduduk yang melaksanakan perkawinan. Tahun 2021 sejumlah 1.525 orang, sedangkan yang mengurus perubahan status KK dan KTP-El sejumlah 347 orang atau 22.76%, hal ini disebabkan kurang cepatnya penduduk mengurus perubahan status kawin pada KK & KTP-El, pengurusan terpusat di Kantor Dispendukcapil Kota Pasuruan, lamanya pengurusan perubahan status kawin pada KK dan KTP. Program Jalan Berdua di Kota Pasuruan dirancang untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan melalui

pendekatan inovatif, namun dijumpai beberapa hambatan muncul yang perlu diatasi agar program ini dapat mencapai kesuksesan penuh (McQuiston & Manoharan, 2021). Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus perubahan status kawin pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, namun sebagian penduduk mungkin belum sepenuhnya menyadari manfaat dan proses perubahan status kawin ini. Tingkat partisipasi pemangku kepentingan, termasuk penduduk, Kantor Urusan Agama (KUA), dan instansi terkait lainnya, juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Hambatan dapat muncul jika ada kurangnya dukungan atau kerjasama dari salah satu pihak tersebut. Infrastruktur dan teknologi yang memadai juga menjadi hambatan potensial, dengan kemungkinan adanya keterbatasan akses teknologi di beberapa wilayah atau masalah teknis dalam pengolahan data. Kebijakan dan regulasi yang kompleks dan tidak sinkron antarinstansi juga dapat menghambat, mengingat proses perubahan status kawin melibatkan beberapa lembaga. Pendidikan dan pelatihan bagi petugas administrasi pun menjadi krusial untuk implementasi inovasi ini, dan hambatan dapat muncul jika tidak ada program yang memadai untuk memastikan keahlian dan pemahaman yang cukup. Terakhir, perlindungan keamanan data dan privasi menjadi kritis, dan hambatan dapat timbul jika tidak ada langkah-langkah yang memadai untuk melindungi informasi pribadi penduduk dari potensi risiko keamanan dan pelanggaran privasi. Tindakan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan ini, Program Jalan Berdua di Kota Pasuruan diharapkan dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan administrasi kependudukan.

4. CONCLUSION

Studi ini mengungkapkan dampak positif dari inovasi layanan publik dalam meningkatkan administrasi kependudukan, dengan fokus pada program Jalan Berdua di Kota Pasuruan. Menurut konteks administrasi kependudukan, inovasi tersebut melibatkan penggunaan teknologi informasi, peningkatan aksesibilitas layanan, kolaborasi antar instansi, dan penggunaan data yang efektif. Kesimpulan ini kami merangkum temuan utama dan dampaknya. Pertama, penggunaan teknologi informasi telah mempercepat proses administrasi kependudukan, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan akurasi dalam penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran. Dengan dibuktikan bahwa Sebelum inovasi "Jalan Berdua" diperkenalkan, proses administrasi kependudukan di Kota Pasuruan sering mengalami antrian panjang dan birokrasi yang rumit, mengakibatkan waktu tunggu yang lama untuk penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran. Dengan adanya inovasi "Jalan Berdua", waktu proses perubahan status kawin pada Kartu Keluarga (KK) dan KTP-elektronik berkurang secara signifikan. Data yang diinput oleh petugas KUA ke dalam database Dispendukcapil memungkinkan penerbitan dokumen yang telah diperbarui dalam waktu satu hari, menunjukkan peningkatan efisiensi yang luar biasa. Hal ini telah meningkatkan kepuasan masyarakat dan efisiensi layanan. Kedua, peningkatan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan telah memastikan bahwa layanan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Ini menciptakan inklusi sosial yang lebih baik dan mengurangi ketidaksetaraan dalam akses ke layanan publik. Ketiga, kolaborasi antar instansi telah mengurangi birokrasi, redundansi, dan peningkatan kerja sama yang efektif. Ini telah menghasilkan proses yang lebih efisien, peningkatan koordinasi perencanaan, dan peningkatan kualitas layanan. Keempat, penggunaan data kependudukan yang efektif telah menjadi dasar

untuk perencanaan strategis, identifikasi kebutuhan masyarakat, pengambilan keputusan yang lebih baik, evaluasi program dan kebijakan, dan respons yang cepat terhadap perubahan sosial dan demografi. Secara keseluruhan, program Jalan Berdua di Kota Pasuruan adalah contoh yang sukses dari bagaimana inovasi dalam layanan administrasi kependudukan dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, kepuasan masyarakat, kerja sama antarinstansi, dan penggunaan data yang efektif.

5. ACKNOWLEDGE

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat terutama Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Pasuruan dan Civitas akademika FISIP UMM yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyusunan naskah ini.

6. REFERENCES

- Aalaei, S., Ahmadi, M. A., & Aalaei, A. (2016). A Comparison of Multiple-Choice and Essay Questions In The Evaluation of Dental Students. *International Journal of Advanded Biotechnology and Research*, 7(5), 1674-1680.
- Aji W., S. B. (2019). UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DAN KETERAMPILAN PROSES SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DI KELAS IV SD N TINGKIR TENGAH 02. *Jurnal Basicedu*, 3(1), 47-52.
- Aji, B. S., & Winarno, M. E. (2016). Pengembangan Instrumen Penilaian Pengetahuan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) Kelas VIII Semester Gasal. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 1(7), 1449-1463.
- Alfian, A., Aminah, N. S., & Sarwanto, S. (2015). Authentic Assessment Berbasis Scientific Approach sebagai Implementasi Kurikulum 2013 di SMP Kelas VII pada Materi Suhu dan Perubahannya. *Jurnal Inkuiri*, 4(3), 39-50.
- Amry, A. B. (2014). The Impact of Whatsapp Mobile Social Learning on The Achievement and Attitudes of Female Students Compared with Face to Face Learnin. *European Scientific Journal*, 10(22), 116-136.
- Anindya, E. F. (2019). Analisis Gerakan Literasi Sekolah Pada Pembelajaran Tematik. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 238-245.
- Arifin, A. H. (2012). Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Praksis Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 1(1), 72-82.
- Arsyad, A. (2013). *Media Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arsyad, A. (2013). *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Asrul, A. (2020). Pembelajaran Inovatif pada Pendidikan Dasar. *Jurnal Bunaya*, 137-150.
- Badami, R., Vaezmousavi, M., Wulf, G., & Namazizadeh, M. (2011). Feedback After Good Versus Poor Trials Affects Intrinsic. *Physical Education, Recreation and Dance*, 82(2), 360-364.
- Baird, J.-A., Andrich, D., Hopfenbeck, T. N., & Stobart, G. (2017). Assessment and Learning: Fields apart? *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 24(3), 317-350.
- Banks, J. A. (2007). *Education Citizens in A Multicultural Society* (2nd ed.). New York: Teachers Collage Press.

- Barhoumi, C. (2015). The Effectiveness of WhatsApp Mobile Learning Activities Guided by Activity Theory on Students Knowledge Management. *Contemporary Educational Technology*, 6(3), 221-238.
- Gon, S., & Rawekar, A. (2017). Effectivity of E-Learning trough Whatsapp as a Teaching Learning Tool. *MVP Journal of Medical Science*, 4(1), 19-25.
- Hasbullah. (2014). *Media Pembelajaran Matematika*. Jakarta: Savitra Collage.
- Hatip, A. (2020). The Transformation Of Learning During Covid-19 Pandemic Towards the New Normal Era. *International Webinar on Education 2020*, (hal. 18-28).
- Hendriana, d. (2019). *Pembelajaran Inovatif matematika*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Infeksi Emerging*. (2020, July 26). (Kementrian Kesehatan RI) Dipetik July 26, 2020, dari <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-26-juli-2020/#.XyJHeCgzbIW>
- Intan Chandra, N. S. (2018). Pengembangan Instrumen Sikap Sosial Tematik Siswa SD Kelas IV. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 2(4), 455-461.
- Jauhari, M. I. (2017). Taksonomi Bloom dan Implementasi Kurikulum Berbasis Multikultural. *JALIE: Journal of Applied Linguistics and Islamic Education*, 1(1), 234-253.
- Jingga, A. A., Mardiyana, M., & Triyanto, T. (2018). Pendekatan dan Penilaian Pembelajaran pada Kurikulum 2013 Revisi 2017 yang mendukung Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis Siswa. *Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika*, 5(3), 286-299.
- Kamal, M. (2013). Pendidikan Multikultural Bagi Masyarakat Indonesia Yang Majemuk. *Jurnal Al-Ta'lim*, 451-458.
- Keumala, S. O., & Pribadi, U. (2021). Government Innovation in Social Sciences: A Literature Review. *Journal of Local Government Issues*, 4(2), 170–184.
- Li, Q., Guan, X., Wu, P., Wang, X., Zhou, L., Tong, Y., . . . Feng, Z. (2020). Early Transmission Dynamic in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia. *The New England Journal of Medicine*, 1(1), 1-9.
- Mania, S. (2010). Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran. *Lentera Pendidikan*, 13(1), 78-91.
- Martha, Z. D. (2018). E-Book Berbasis Mobile Learning. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 109-114.
- Masunah, J. (2011). Konsep dan Praktik Pendidikan Multikultural di Amerika Serikat dan Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(4), 298-306.
- Muthoifin. (2015). Pemikiran Pendidikan Multikultural Ki Hadjar Dewantara. *Intizar*, 21(2), 299-320.
- Prem, K., Liu, Y., Russell, T. W., Kucharski, A. J., Eggo, R. M., & Davies, N. (2020). The Effect of Control Strategies to Reduce Social Mixing on Outcomes of the COVID-19 epidemic in Wuhan, China : a modelling study. *Lancet Public Health*, 5(5), 1-10.
- Purwasito, A. (2003). *Komunikas Multikultural*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Puspita, G. A. (2018). Pergeseran Budaya Baca dan Perkembangan Industri Penerbitan Buku di Indonesia: Studi Kasus Pebaca E-book Melalui Aplikasi Ipusnas. *Jurnal Kajian Pustaka dan Informasi*, 13-19.
- Rahardjo, B. (2002, May 21). *Rancangan ABC E-Book*. Diambil kembali dari Budi Insan: <http://budi.insan.co.id/articles/ebook.pdf>.
- Rahman, F., Khalil, J. K., Jumani, N. B., Ajmal, M., Malik, S., & Sharif, M. (2011). Impact of Discussion Method on Students Performance. *International Journal of Business and Social Science*, 2(7), 84-94.
- Ramadanti, E. C. (2020). Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Pembelajaran IPA. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1053-1062.
- Rigianti, H. A. (2020). Kendala Pembelajaran Daring Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara. *Elementary School*, 7(2), 297-302.
- Rina Tiya Lestari, E. P. (2018). E-book Interaktif. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 1(1), 71-76.
- Rosida, N. F. (2017). Efektivitas Penggunaan Bahan Ajar E-Book Interaktif dalam Menumbuhkan Keterampilan Berpikir Kritis. *Jurnal Pembelajaran Fisika*, 5(1), 35-45.
- Roziqin, A., & Fajrina, A.N. (2021). Understanding Public Sector Innovation from A Local Perspective: Contra War (Contraceptive for Women at Risk) Innovation study in Malang Regency. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(2) 205-222.
- Rumapea, M. E. (2014). Makna Pendidikan Multikultural bagi Siswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 13-20.
- Rusman. (2011). *Model - Model Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusyan, T., Kusdinar, A., & Arifin, Z. (1989). *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remadja Karya.
- Sadeghi, M. (2019). A shift from Classroom to Distance Learning: Advantages and Limitations. *International Journal of Research in English Education*, 4(1), 80-88.
- Sandybayev, A. (2020). The Impact of E-Learning Technologies on Student's Motivation: Student Centered Interaction in Business Education. *International Journal of Research in Tourism and Hospitality*, 6(1), 16-24.
- Septy, L. (2015). Pengembangan Media Komik Pada Materi Peluang Kelas VIII. *Jurnal Dedaktik Matematika*. 2 (2), 16-26.
- Shahabadi, M. M., & Uplane, M. (2015). Synchronous and asynchronous e-learning styles and academic performance of e-learners. *Procedia Social and Behavioral Science*. 176, hal. 129-138. Elsevier Ltd.
- Shobirin, M. (2016). *Konsep Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suandito, B. (2017). Bukti Informal Dalam Pembelajaran Matematika. *Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika*, 8(1), 13.
- sudirman. (2022). *Pemerintahan Berbasis Elektronik*. kendari: faturrochman.
- Sulfemi, & W. (2019). *Manajemen Pendidikan Berbasis Multi Budaya*. Bogor: STKIP Muhammadiyah.
- Suparman, M. A. (2012). *Desain instruksional modern*. Jakarta: Erlangga.

- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 3(2), 11475-1156.
- Sutjipto. (2017). Implementasi Kurikulum Multikultural. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(1), 1-21.
- Su'udiah, F. (2016). Pengembangan Buku Teks Tematik Berbasis Kontekstual. *Jurnal Pendidikan*, 1744-1748.
- Syifa, L. (2019). Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Psikologi Pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 3(4), 538-544.
- Taherdoost, H. (2016). Sampling Methods in Research Methodology; How to Choose a Sampling Technique for Research. *International Journal of Academic Research in Management*, 5(2), 18-27.
- Tavukcu, T., Arap, I., & Özcan, D. (2011). General Overview on Distance Education Concept. *Procedia Social and Behavioral Science*. 15. Elsevier Ltd.
- Tilaar, H. (2004). *Multikulturalisme*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Tozoglu, D., Tozoglu, M. D., Gurses, A., & Dogar, C. (2004). The students' perceptions: Essay Versus Multiple-choice Type Exams. *Journal of Baltic Science Education*, 2(6), 52-59.
- Trianto. (2007). *Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Trisna, G. A. (2017). Pengembangan Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 1(2), 107-112.
- Wargadinata, W., Maimunah, I., Dewi, E., & Rofiq, Z. (2020). Student's Responses on Learning in the Early COVID-19 Pandemic. *Tadris : Journal of Education and Teacher Training*, 5(1), 141-153.
- Wasino. (2013). Indonesia: From Pluralism to Multiculturalism. *Paramita*, 23(2), 148-155.
- Yuliana, Y. (2020). Corona Virus diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literature. *Wellness ad Healthy Magazine*, 2(1), 187-192.
- Zaenal, A. (2017). Variasi Pembelajaran Matematika Di sekolah Rumah Bagi Para Homeschooler. *Lembaran Ilmu Kependidikan*, 36(2), 157-161.
- Zheng, J. (2020). SARS-CoV-2:an Emerging Coronavirus that Cause a Global Threat. *International Jurnal of Biological Science*, 16(10), 1678-1685.

Implementasi Kebijakan Program Magang MSIB Batch 5 Dalam Meningkatkan Kemampuan *Project Business Researcher* di PT Indekstat Konsultan Indonesia

Arinta Putri Dewanti^{1*}, Abdul Rahman², Nida Handayani³

^{1,2,3} Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 3, 2024

Revised May 2, 2024

Accepted May 8, 2024

Available online May 25, 2024

Keywords:

Implementation, Program,
MSIB Batch 5, Business
Researcher



This is an open access article under the
CC BY-SA license.

Copyright © 2024 by Author. Published
by Universitas Hang Tuah

ABSTRACT

The Merdeka Learning Program at Kampus Merdeka is a flexible learning model in higher education designed to encourage innovative learning and adapt to student needs. One of them is an internship program at MSIB partner companies, which is an initiative of Kampus Merdeka to help students prepare for the world of work. PT Indekstat Konsultan Indonesia is one of the partners of this program, with the aim of improving the quality of soft skills and hard skills to be able to work culturally to meet the needs of the capabilities of researchers who are ready to work in the research and data science industry. This research uses a qualitative case study approach, including interviews, observation, documentation, and review of relevant literature. The theory employed is George C. Edward III with signs of successful implementation, which are: (1) communication, (2) resources, (3) disposition, and (4) bureaucratic structure. The results showed that PT Indekstat Konsultan Indonesia has not implemented the MSIB Batch 5 program policy optimally.

1. INTRODUCTION

Pendidikan merupakan alat pembelajaran diluar lingkungan keluarga yang melibatkan nilai keterampilan dan transformasi pengetahuan. Pendidikan tidak terlepas dari batasan-batasan yang ada baik pada siswa, pengajar, interaksi antar pengajar, lingkungan, hingga sarana dan prasarana pendidikan (Sulistyaningrum et al., 2022). Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa prinsip dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menuntut pelaksanaan pendidikan harus adil sesuai dengan junjungan HAM. Perkembangan teknologi semakin pesat dalam periode Revolusi Industri 4.0. Ini dapat diartikan bahwa perkembangan bidang industri akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi karena masyarakatnya juga ikut berkembang. Revolusi industri 4.0 ini dapat digunakan untuk mendorong mindset dan untuk menghasilkan penemuan-penemuan kreatif dari segala aspek kehidupan manusia dengan menggunakan teknologi atau internet. Hal ini pun telah disadari oleh Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk membuat kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Kemendikbud-Ristek merupakan langkah awal bagi institusi untuk mempersiapkan lulusannya agar siap menghadapi dunia kerja. (Puspitasari & Nugroho, 2021). Kebijakan MBKM memiliki 4 pokok poin yaitu: 1) Pembentukan program studi baru, 2) Sistem akreditasi perguruan tinggi, 3) Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) dan 4) Hak untuk belajar 3 semester di luar program studi (Nizam, 2020). Program Merdeka

*Corresponding author.

E-mail: arintaputri6@gmail.com

Belajar Kampus Merdeka ini merupakan model pembelajaran yang fleksibel di perguruan tinggi yang dirancang untuk mendorong pembelajaran yang inovatif dan menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Adapun program yang ditawarkan antara lain Magang dan Studi Independen Bersertifikat, Bangkit, *Indonesian International Student Mobility Award* (IISMA), Kampus Mengajar, GERILYA dari Kementerian ESDM, Membangun Desa (KKN Tematik), Pejuang Muda Kampus Merdeka, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Proyek Kemanusiaan, Riset atau Penelitian, dan Wirausaha Merdeka (Nizam, 2020).

Program ini dirancang agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri dalam mengantisipasi perubahan sosial, budaya, teknologi, dan tuntutan pekerjaan yang cepat. Melalui program ini diharapkan mampu mengasah kemampuan mahasiswa untuk bersaing dalam dunia kerja dan mampu memberikan kontribusi yang baik sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Tujuan utama Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah untuk meningkatkan *soft skills* dan *hard skills* supaya memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi tuntutan zaman, meningkatkan kompetensi lulusan, dan mempersiapkan lulusan yang siap memimpin masa depan dan kepribadian yang unggul (Nizam, 2020).

Salah satu program Kampus Merdeka yang dapat mendukung mahasiswa dalam mempersiapkan diri agar lebih matang dalam dunia bekerja adalah magang di perusahaan mitra MSIB. Program magang MSIB memberikan pengalaman kepada para mahasiswa untuk merasakan bekerja langsung di tempat kerja. Kegiatan ini terbuka untuk seluruh mahasiswa minimal semester 5 pada universitas yang berada dibawah Kemendikbudristek. Mahasiswa yang mengikuti program MSIB ini dapat memilih maksimal 22 perusahaan atau instansi beserta posisi sesuai yang diinginkan. Kegiatan MSIB ini dilaksanakan selama 5 (enam) bulan yang setara dengan satu semester (20 SKS) tanpa penyetaraan mata kuliah. Manfaat lainnya adalah pengalaman dan kompetensi baru yang diperoleh melalui program magang dapat dituangkan dalam bentuk portofolio. Program magang MSIB juga dapat membantu meningkatkan kemampuan soft skill seperti berpikir kritis, manajemen waktu, dan berkomunikasi, serta membangun personal branding untuk menunjukkan citra diri dan membangun relasi kerja (Rayes, Amrylana, & Nisdania, 2024).

Oleh karena itu, sebuah perusahaan bisnis di sektor riset dan data *science* di Jakarta yaitu PT Indekstat Konsultan Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang mendaftarkan diri sebagai Mitra MSIB dengan tujuan untuk berbagi ilmu dan pengalaman kerja bagi peserta magang. Dalam program magang MSIB di PT Indekstat Konsultan Indonesia atau Indekstat *Young Business Researcher* (IYBR) memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas *soft skills* dan *hard skills* mahasiswa agar mampu kerja secara kultur dan keahlian riset inovatif untuk memenuhi kebutuhan kapabilitas peneliti yang siap kerja di industri riset serta data *science*. Selama program MSIB dijalankan, PT Indekstat Konsultan Indonesia melakukan pembelajaran *self learning* dan *learning by doing* berdasarkan instruksi yang diberikan oleh mentor baik secara berkelompok maupun individu. Penerapan ini dimaksudkan untuk mengasah dan melatih kemampuan mahasiswa dalam mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari di perkuliahan.

Namun, dalam implementasinya program MSIB ini ditemukan beberapa persoalan diantaranya, kesulitan konversi SKS dan keterlambatan pencairan Bantuan Biaya Hidup (BBH). Sementara itu keluhan lain didapati oleh beberapa mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang di PT Indekstat Konsultan Indonesia seperti pemberian tugas yang dirasa kurang sesuai dengan deskripsi di platform Kampus Merdeka. Beberapa dari mereka kesulitan dalam memahami pekerjaan. Disisi lain PT Indekstat Konsultan Indonesia berusaha untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dengan membuka

forum diskusi yang dinamakan “*Internship Leadership Communication*”. Dengan adanya forum tersebut diharapkan dapat melatih kemampuan mahasiswa dalam melakukan riset.

Implementasi dapat diartikan sebagai proses dalam penerapan atau pelaksanaan suatu program. Menurut Van Meter Van Horn dalam (Solichin, 2005) dalam (Hasanah & Wijayanto, 2022) Implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah atau swasta, secara perorangan ataupun berkelompok, untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang telah diuraikan dalam suatu keputusan. Pada implementasi kebijakan, George C. Edward III dalam (Subianto, 2020) memaparkan dua pertanyaan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi, yaitu: (1) apa saja yang menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi?, dan (2) apa saja yang menjadi faktor penghambat keberhasilan implementasi?. Melalui kedua pertanyaan ini kemudian diformulasikan menjadi empat faktor yang menjadi syarat penting dalam keberhasilan implementasi, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi.

Program MSIB ini memiliki landasan hukum yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan MBKM untuk menjamin pelaksanaannya berjalan dengan baik. Peraturan tersebut terdiri dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) No. 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, dan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Nizam, 2020).

Penelitian sebelumnya terkait implementasi program MSIB juga pernah diteliti oleh (Hasanah & Wijayanto 2022) dengan judul “Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Program Magang & Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Di PT. Progate Global Indonesia” dengan hasil bahwa implementasi kebijakan MBKM-MSIB di PT Progate Global Indonesia sudah terimplementasikan dengan baik, namun terdapat kendala pada salah satu proyek karena adanya ketidakjelasan informasi antara pihak perusahaan dengan pihak kampus yang pada akhirnya proyek tersebut tidak selesai dan berujung pada keterlambatan pemberian uang saku kepada mahasiswa selama 2 bulan. Penelitian lain juga dilakukan oleh (Amanda & Perdana, 2023) dengan judul “Implementasi Pelaksanaan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di PT. Nurul Fikri Cipta Inovasi” dengan hasil program ini berjalan dengan sukses dan memberikan pengalaman baru bagi para mahasiswa untuk mengasah kemampuannya diluar program studi yang ditempuh saat ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program magang MSIB di PT Indekstat Konsultan Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi khususnya bagi PT Indekstat Konsultan Indonesia dalam mengimplementasikan program MSIB di batch selanjutnya dan program ini diharapkan dapat menjadi peluang yang baik bagi para mahasiswa untuk meningkatkan skill yang dibutuhkan agar dapat bersaing secara positif di dunia kerja serta mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

2. METHODS

Penelitian ini memakai metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sugiono mendefinisikan studi kualitatif merupakan sebuah studi yang menjadikan peneliti bertindak sebagai objek utama dan melakukan pengumpulan data secara induktif (Sugiyono, 2020). Sedangkan studi kasus menurut Creswell dalam (Assyakurrohim et al., 2023) adalah penelitian yang menelusuri suatu fenomena dalam suatu kegiatan dan

periode tertentu. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan secara langsung ketika melakukan magang MSIB di PT Indekstat Konsultan Indonesia dan data sekunder didapatkan dari literatur serta referensi terkait penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan (Nasution, 2023). Kegiatan magang MSIB Batch 5 di PT Indekstat Konsultan Indonesia dilaksanakan secara *Work From Anywhere* (WFA) dengan jadwal *Work From Office* (WFO) seminggu sekali. Kegiatan ini berjalan selama lima bulan mulai dari tanggal 14 Agustus sampai dengan 31 Desember 2023.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

Komunikasi

Komunikasi adalah proses dimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Komunikasi merupakan salah satu elemen terpenting dalam implementasi kebijakan karena komunikasi dapat membantu para pelaksana memahami apa yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan dengan kelompok sasaran sehingga dapat memperkecil terjadinya kesalahpahaman (Pramono, 2020). Ada tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam komunikasi: penyampaian informasi yang diberikan, kejelasan informasi yang disampaikan (*clarity*), dan konsistensi informasi yang disampaikan. Jika ingin mencapai implementasi yang sukses, informasi yang disampaikan harus jelas dan konsisten, serta tidak bertentangan dengan instruksi sebelumnya.

Berdasarkan indikator komunikasi penyampaian informasi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi kepada Perguruan Tinggi, mitra MSIB Batch 5 yaitu PT Indekstat Konsultan Indonesia, dan Mahasiswa dalam pelaksanaannya sudah cukup baik. Namun, dari segi transmisi komunikasi masih kurang maksimal yang dimana mahasiswa tidak memperoleh informasi apapun pada masa awal magang dari PT Indekstat Konsultan Indonesia sebagai mitra MSIB. Kemudian selama program berlangsung beberapa mahasiswa tidak jarang merasa kesulitan dalam mengerjakan proyeknya karena kurangnya responsivitas dari mentor dalam menyampaikan informasi dan jarang bertemu secara langsung. Faktor lain yaitu konsistensi komunikasi. Salah satu mahasiswa menyampaikan bahwa informasi yang disampaikan tidak sesuai karena pada pelaksanaannya sangat berbeda dengan kompetensi dan deskripsi yang ada di dalam platform Kampus Merdeka. Hal ini menyebabkan hasil pekerjaan menjadi kurang maksimal. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa PT Indekstat Konsultan Indonesia belum konsisten dalam menyampaikan informasi.

Konsistensi ini baru muncul di pertengahan pelaksanaan kegiatan magang setelah pihak PT Indekstat Konsultan Indonesia membuat forum diskusi selama kegiatan berlangsung untuk menambah pengetahuan mahasiswa pada industri riset dan data sains serta serta mengetahui PT Indekstat Konsultan Indonesia secara lebih dalam di setiap divisinya. Akan tetapi, konsistensi itu hilang kembali karena program ini hanya berlangsung selama 2 bulan saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator komunikasi dalam pelaksanaan magang MSIB di PT Indekstat Konsultan Indonesia belum maksimal dikarenakan masih terdapat kendala dalam implementasinya.

Sumber Daya

Sebuah kebijakan atau program memerlukan sumber daya untuk memastikan bahwa kebijakan atau program tersebut dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Bahkan jika kebijakan telah diartikulasikan dengan baik, jika implementor memiliki keterbatasan sumber daya yang dibutuhkan, maka implementasi akan terhambat.

Sumber daya ini dapat mencakup sumber daya manusia, finansial, serta sarana dan prasarana. Penelitian ini hanya mengambil dua sumber daya, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya pendukung (sarana dan prasarana).

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan magang MSIB di PT Indekstat Konsultan Indonesia sangat baik. Hal ini dapat dilihat terutama pada mentor, tim divisi, dan direksi yang sudah ahli dan kompeten dibidangnya masing-masing sehingga dapat menunjang pelaksanaan kegiatan magang MSIB di PT Indekstat Konsultan Indonesia. Dari segi sumber daya pendukung terkait sarana dan prasarana terdapat ketidakefektifan dalam implementasinya, yaitu keterbatasan fasilitas ruangan yang digunakan untuk mahasiswa magang MSIB. Selama kegiatan berlangsung, peserta magang MSIB ditempatkan disatu ruangan bersamaan dengan para karyawan yang ada. Jika ada peserta magang MSIB yang terlambat datang maka dapat dipastikan tidak mendapat meja untuk bekerja. Situasi ini membuat pelaksanaan magang secara full offline kurang maksimal sehingga kegiatan magang MSIB selama 5 bulan dilaksanakan secara hybrid dengan jadwal ke kantor seminggu sekali sampai periode magang berakhir.

Disposisi

Indikator disposisi adalah kemauan, keinginan, dan kecenderungan para implementor dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan (Febriani et al., 2023). Seorang implementor harus berkomitmen dalam melaksanakan program karena sebuah keputusan sangat berpengaruh terhadap proses implementasi. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka kebijakan yang dijalankan juga akan sesuai. Akan tetapi jika implementor memiliki sikap yang berbeda maka implementasinya pun akan menjadi tidak efektif.

Sikap pelaksana pada awal pelaksanaan magang MSIB, tidak memberikan kejelasan informasi mengenai kapan pelaksanaan magang dimulai. Akan tetapi ketika kegiatan berlangsung, PT Indekstat Konsultan Indonesia sebagai mitra MSIB Batch 5 sudah melaksanakan program dengan baik dengan melibatkan peserta magang MSIB pada proyek secara langsung untuk membangun dan meningkatkan kemampuan riset.

Struktur Birokrasi

Birokrasi yang cukup panjang akan menyebabkan kerumitan dan cenderung dapat melemahkan pengawasan sehingga kegiatan organisasi menjadi tidak fleksibel. Struktur birokrasi adalah faktor penting dalam menganalisis implementasi kebijakan. Salah satu aspek dari struktur birokrasi ini adalah *Standart Operating Procedure* (SOP). SOP adalah aturan pekerjaan dan pelaksanaan program. Tanpa prosedur operasi standar, mustahil untuk mencapai hasil terbaik (Subianto, 2020).

Berdasarkan aspek SOP, pada implementasi program magang MSIB di PT Indekstat Konsultan Indonesia tidak memiliki SOP untuk mendukung penerapannya. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu dalam menyusun SOP dan kurangnya persiapan dalam pelaksanaan magang MSIB. Akan tetapi, pihak Kemendikbud-ristek memiliki buku panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dapat digunakan para mahasiswa sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan magang. PT Indekstat Konsultan Indonesia sebagai mitra MSIB pun turut memberikan kurikulum magang yang dinamakan "*Indekstat Young Business Researcher*" untuk memberikan gambaran teknis di lapangan selama program magang berlangsung.

4. CONCLUSION

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan diatas, implementasi kebijakan program MSIB Batch 5 di PT Indekstat Konsultan Indonesia belum maksimal. Sebagaimana menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan dikatakan sukses apabila keempat faktor yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi semuanya terpenuhi. Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan program magang MSIB di PT Indekstat Konsultan Indonesia hanya memenuhi satu dari empat faktor. Hal ini dibuktikan pada faktor komunikasi yang belum tersampaikan dengan baik pada transmisi dan konsistensi komunikasi kepada peserta magang MSIB.

Dari segi faktor sumber daya pendukung pun belum maksimal dikarenakan adanya keterbatasan ruangan kerja yang digunakan untuk peserta magang MSIB dan hanya faktor sumber daya manusia saja yang memenuhi pelaksanaan program magang MSIB di PT Indekstat Konsultan Indonesia. Kemudian faktor disposisi, PT Indekstat Konsultan Indonesia sebagai implementor memiliki sikap yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan dilibatkannya peserta magang MSIB dalam proyek-proyek riil yang dilaksanakan oleh PT Indekstat Konsultan Indonesia hanya terdapat sedikit miskomunikasi pada awal pelaksanaan magang. Pada faktor struktur birokrasi dalam hal *Standart Operating Procedure* (SOP) PT Indekstat Konsultan Indonesia tidak memilikinya akan tetapi terdapat buku panduan magang dari Kemendikbud-ristek dan kurikulum magang di PT Indekstat Konsultan Indonesia yang menjadi landasan bagi para peserta magang MSIB dalam melaksanakan program magang. Program magang MSIB Batch 5 di PT Indekstat Konsultan Indonesia telah berjalan dengan lancar selama lima bulan terhitung sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan 31 Desember 2023.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu diharapkan PT Indekstat Konsultan Indonesia selanjutnya dapat mengimplementasikan deskripsi pekerjaan dengan jelas sehingga peserta magang dapat memahami pekerjaannya dengan baik. Kemudian PT Indekstat Konsultan Indonesia dapat menerapkan sistem *feedback* dan evaluasi kinerja secara rutin untuk memastikan bahwa kebijakan telah diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat memberikan kesempatan untuk peningkatan berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan sesuai yang dibutuhkan. Dengan menerapkan beberapa saran ini, PT Indekstat Konsultan Indonesia diharapkan dapat membangun lingkungan kerja yang lebih terstruktur, efisien, dan berfokus pada kualitas layanan, serta menciptakan dasar keberhasilan perusahaan dan kenyamanan bagi para peserta magang MSIB pada batch selanjutnya.

5. ACKNOWLEDGE

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah swt karena penelitian ini dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta, PT Indekstat Konsultan Indonesia, dan pihak-pihak lain yang telah membantu dan bekerja sama sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

6. REFERENCES

- Amanda, R. Y., & Perdana, P. (2023). Implementasi Pelaksanaan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di PT. Nurul Fikri Cipta Inovasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 7846–7859.
- An Nisaa' Budi Sulistyaningrum, Nurulita Artanti Nirwana, Dhiya Ratri Januar, N. N. H.

- (2022). Performa Kebijakan Kampus Merdeka pada Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(6), 2771–2786.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. London: SAGE Publications.
- Dimas Assyakurrohim, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, M. W. A. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3.
- George, C. E. I. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. (M. Albina, Ed.) (1 ed.). Bandung.
- Nizam. (2020). MBKM Guidebook, 1–42.
- Puspitasari, R., & Nugroho, R. (2021). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fisip Upn Veteran Jawa Timur. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 276–292.
- Rayes, P. R., Amrylana, S., & Nisdania, B. N. (2024). Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Program MSIB Batch 5 dalam Project Research Management di Telkom CorpU , PT . Telekomunikasi Indonesia Tbk. *JKMBD (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bina Darma)*, 4(1), 1–14.
- Rizqita Ayu Hasanah, H. W. (2022). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Program Magang & Studi Independen Bersertifikat (Msib) Di Pt. Progate Global Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 4–6.
- Solichin, A. W. (2005). *Analisis kebijaksanaan: Dari Formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara* (2 ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Partisipasi Masyarakat dalam Kelompok Kegiatan (Poktan) Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung

Ni Putu Anjelina¹, Lilik Antarini², Nyoman Sumawidayani^{3*}

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Warmadewa, Bali

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 17, 2024

Revised May 6, 2024

Accepted May 8, 2024

Available online May 25, 2024

Keywords:

Community participation,
poktan, quality family village



This is an open access article under the
CC BY-SA license.

Copyright © 2024 by Author. Published
by Universitas Hang Tuah

ABSTRACT

Quality Family Villages (Kampung KB) aim to improve the quality of Human Resources by emphasizing strengthening family and community institutions. In an effort to realize this goal, active community participation is needed in various existing activity groups (Poktan). Community participation in Poktan BKB, BKR, and BKL has reached 100%, while the other two Poktan, namely PIK-R, amounted to 5.69% and UPPKA with the lowest percentage, only 2.88%. This research aims to determine community participation in the Quality Family Village activity group (Poktan) in Penarungan Village, Mengwi District, Badung Regency. This research uses a qualitative descriptive research approach, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The unit of analysis in this research was 14 informants consisting of the Head of Penarungan Village, Chair of the Penarungan Village KB Village Working Group, Penarungan Village KB Village Extension Officer, KB Village Poktan Cadre, and Community Members of the KB Village Poktan. Community participation in this research is assessed from participation during decision making, implementation, receiving benefits, and evaluation. The results of the research show that community participation in the Quality Family Village Poktan in Penarungan Village is still not optimal. At the implementation stage, community participation only took part in activities that were integrated with Poktan so that PIK-R and UPPKA Poktan had a low percentage of participation because integrated activities also had low participation. There are several obstacles that hinder community participation, such as low public awareness, minimal funding for Poktan, and limited data.

1. INTRODUCTION

Indonesia memiliki populasi yang terus meningkat, mencapai 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023 dan menempati posisi keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia (BPS, 2023). Pertumbuhan ini berdampak pada kehidupan sosial karena seringkali tidak diiringi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, menciptakan masalah sosial ekonomi yang dapat menghambat pembangunan. Menyadari laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, BKKBN pada tahun 2016, mengaktifkan kembali program Keluarga Berencana (KB) melalui inovasi baru yang dikenal sebagai Kampung KB. Kampung KB, yang awalnya dikenal sebagai Kampung Keluarga Berencana, kemudian mengalami perubahan frasa menjadi Kampung Keluarga Berkualitas sesuai dengan Surat Edaran Kemendagri No. 843.4/2879/SJ tanggal 15 April 2020 (Mendagri, 2020). Tujuan perubahan ini adalah untuk mendorong kontribusi dari semua sektor terkait, mengingat sebelumnya, pengelolaan Kampung KB sebagai Kampung Keluarga Berencana terkesan hanya sebagai tanggung jawab BKKBN yang diidentikan dengan persoalan KB. Perubahan tersebut semakin menegaskan bahwa peningkatan kualitas keluarga merupakan tujuan utama dari program ini. Untuk memaksimalkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang fokus terhadap peningkatan kualitas keluarga, kampung KB hadir dengan berbagai kelompok kegiatan

*Corresponding author.

E-mail: widayani.suma@gmail.com

(Poktan) seperti BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) dan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).

Hingga akhir 2022, sudah terbentuk 22.646 Kampung KB di seluruh Indonesia, ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2016 yang hanya terdapat 1.154 Kampung KB di seluruh Indonesia (BKKBN, 2023). Berdasarkan data Percontohan Kampung KB BKKBN (2023), Kampung KB Desa Penarungan merupakan satu-satunya percontohan nasional dari 50 Kampung KB di Kabupaten Badung, yang dicanangkan pada 13 Maret 2016. Diakui pada 2019 sebagai Percontohan Kampung KB Nasional dan meraih peringkat III Nasional untuk Kampung KB Percontohan. Desa ini dijadikan rujukan untuk Kampung KB lainnya dalam pengelolaan dan pengoptimalan segala potensi yang dimiliki oleh desa.

Namun, perlunya perhatian khusus terhadap partisipasi masyarakat kelompok kegiatan PIK-R dan UPPKA di Desa Penarungan karena partisipasi mereka yang paling kecil diantara Poktan lainnya. Poktan Kampung KB bertujuan meningkatkan ketahanan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, sehingga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu aspek keberhasilan dari program kampung KB (Resnawaty & Humaedi, 2021). Masyarakat tidak sekedar menjadi sasaran pembangunan, melainkan juga memiliki peran sebagai pelaku pembangunan yang ikut serta secara aktif dalam seluruh prosesnya. Berdasarkan data dari BKKBN Desa Penarungan (2023), persentase partisipasi masyarakat dalam Poktan Kampung KB Desa Penarungan sudah 100% pada Poktan BKB, BKR, BKL, akan tetapi terdapat ketimpangan pada dua poktan lainnya yang masih memiliki persentase partisipasi sangat rendah, yaitu PIK-R sebesar 5,69% dan yang terendah adalah UPPKA dengan persentase 2.88%. Ini menjadi perhatian khusus mengingat status Desa Penarungan sebagai percontohan nasional di Kabupaten Badung. Khusus pada poktan PIK-R disini menjadi yang terendah diantara kampung KB pada desa lainnya yang sama-sama dibentuk untuk pertama kalinya pada tahun 2016 di Kabupaten Badung, seperti Desa Petang (PIK-R: 6,01%), Desa Taman (PIK-R:100%), Desa Dalung (PIK-R: 12,19%), Kelurahan Kedongan (PIK-R: 97,21%), dan Kelurahan Tanjung Benoa (PIK-R: 6,32%).

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam kelompok kegiatan (Poktan) Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Dengan memfokuskan penelitian pada partisipasi masyarakat dalam kelompok kegiatan (Poktan) Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

2. METHODS

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, data yang diperoleh terkait partisipasi masyarakat dalam kelompok kegiatan (Poktan) Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Penarungan, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi dengan menganalisis partisipasi masyarakat dalam kelompok kegiatan (poktan), wawancara mendalam dipilih penulis untuk memperoleh data yang lebih banyak, akurat dan mendalam, dan dokumentasi untuk melengkapi data-data yang telah digali sebelumnya. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer yang memuat data utama terkait partisipasi masyarakat dalam kelompok kegiatan (Poktan) Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Penarungan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Juga menggunakan data sekunder sebagai sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, seperti artikel, buku, dokumen, foto serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini yang menjadi satuan kajian yaitu Kampung KB Desa Penarungan yang mana berfokus terhadap Partisipasi Masyarakat pada Poktan Kampung KB Desa Penarungan. Untuk menunjang data penelitian, maka akan dilakukan wawancara mendalam terhadap 14 informan, diantaranya terdiri dari Kepala Desa Penarungan, Ketua Pokja Kampung KB Desa Penarungan, keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja, keluarga yang memiliki lansia, anggota karang taruna, anggota UPPKA. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Tahapan analisis data menurut Milles dan Huberman (dalam Anggito & Setiawan, 2018) adalah pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumen; reduksi data; penyajian data dalam bentuk narasi, yang dilengkapi matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi, dan sebagainya, agar data yang disajikan untuk persiapan analisis tampak lebih jelas, rinci, dan mantap, dan mudah dipahami; dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh beberapa temuan terkait Partisipasi Masyarakat dalam Kelompok kegiatan (Poktan) Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Temuan-temuan tersebut penulis sajikan dalam bentuk tabel atau matrik temuan sebagai berikut:

Tabel 1. Matriks Temuan

No	Indikator	Hasil Temuan
1	Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan kegiatan kampung KB Desa Penarungan	<p>Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat, seluruh informan masyarakat mengatakan tidak mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan pada kegiatan Kampung KB Desa Penarungan. Pernyataan masyarakat tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Penarungan, yang menyatakan bahwa:</p> <p>“keputusan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB dibuat dalam rapat Pokja bersama dengan kelian dinas setiap banjar. Kami tidak mengundang masyarakat untuk hadir secara langsung mengingat jumlah masyarakat yang sangat banyak dan tidak akan efektif jika dilibatkan semuanya. Karena itulah hanya Pokja dan kelian dinas yang dilibatkan dalam pembuatan keputusan. Kelian dinas yang mewakili masyarakat untuk berpendapat dan mereka juga yang meneruskan kembali informasi ketika rapat kepada masyarakat”. (Ni Wayan Kerni, 8 November 2023)</p> <p>Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Desa Penarungan, Ketua Pokja dan Penyuluh Kampung KB Desa Penarungan juga mengutarakan hal yang sama yaitu setiap kegiatan yang dilaksanakan Kampung KB Desa Penarungan diputuskan melalui rapat Pokja yang dilaksanakan rutin 6 kali dalam setahun, setiap bulan ganjil. Dalam rapat tersebut, Pokja Kampung KB maupun kelian dinas dapat menyampaikan gagasan, saran, maupun penolakan terkait hal-hal yang dibahas.</p>
2	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Poktan Kampung KB Desa Penarungan	<p>Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Poktan Kampung KB Desa Penarungan ialah sebagai kader yang mengatur kegiatan dan sebagai anggota Poktan yang menerima penyuluhan. Pelaksanaan poktan Kampung KB berbentuk penyuluhan yang diintegrasikan dengan kegiatan lainnya di masing-masing banjar, dan khusus untuk anggota UPPKA diikutsertakan ke dalam pameran.</p>

3 Partisipasi masyarakat dalam menerima manfaat dari Poktan Kampung KB Desa Penarungan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan penelitian, ditemukan bahwa tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam Poktan Kampung KB Desa Penarungan dipengaruhi oleh kegiatan yang diintegrasikan dengan Poktan. Disamping itu frekuensi kegiatan di semua Poktan belum berjalan rutin setiap bulannya karena tidak adanya kewajiban bagi kader untuk melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan serta belum adanya dana yang mencukupi untuk memberikan honor bagi semua kader. Sebagaimana hasil wawancara dengan Penyuluh Kampung KB Desa Penarungan yang menyatakan bahwa:

“Meskipun Poktan sudah digabungkan dengan kegiatan lainnya, tetap saja tidak menjamin pelaksanaan Poktan berjalan rutin setiap bulan seperti yang seharusnya. Kader yang berperan penting dalam pelaksanaan Poktan tidak selalu melakukan pembinaan, belum tentu ketika ada posyandu balita atau sangkep, poktan kampung KB dijalankan. Tidak ada keharusan bagi kader untuk melaporkan apakah tugasnya sudah dijalankan atau belum, terlebih lagi tidak semua kader memperoleh reward, upah.” (Ni Putu Ari Handayani, 8 November 2023)

Penulis melihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Poktan belum optimal karena terkendala waktu masyarakat, dana untuk penyelenggaraan acara, serta kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi baik itu selaku kader maupun anggota poktan itu sendiri. Poktan Kampung KB belum sepenuhnya disadari sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mensukseskan program yang telah dirancang.

Melalui Poktan Kampung KB, masyarakat anggota Poktan memperoleh pengetahuan yang lebih baik terkait Poktan yang diikuti dan anggota UPPKA memiliki wadah untuk mempromosikan produk usahanya melalui pameran.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Anggota Poktan BKB yang menyatakan bahwa:

“BKB sangat membantu untuk lebih mengetahui perkembangan anak yang seharusnya. Usia sekarang ini sudah seharusnya anak bisa berbicara, hal-hal kecil seperti itu harus diperhatikan sebagai orang tua, kalo belum bisa harus dilatih terus jangan menunggu nanti bisa sendirinya. Dengan adanya Poktan BKB dan ikut menerima pembinaan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi saya sebagai orang tua”. (Ni Wayan Mudinasih, 10 November 2023)

Manfaat dari adanya Poktan Kampung KB juga diungkapkan oleh anggota Poktan-Poktan lainnya, seperti anggota Poktan BKL yang mengatakan bahwa:

“pada saat penyuluhan diberi tahu jika orang tua sering cerewet karena ingin diperhatikan, cerewetnya jangan dilawan agar tidak menimbulkan keributan. Lansia pasti jenuh di rumah saja, jadi kita sebagai anak harus aktif mengajak orang tua yang sudah lansia keluar, mungkin sekedar jalan-jalan pagi di sawah atau diikutsertakan ke dalam kelompok senam lansia”. (I Gusti Ngurah Gede Blambangan, 18 November 2023)

Meskipun masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang Poktan Kampung KB sesuai dengan tujuan pembentukannya, dari hasil wawancara mendalam yang penulis lakukan dengan informan masyarakat diketahui bahwa tidak mudah bagi masyarakat untuk mengimplementasikan teori yang di dapat ketika penyuluhan. Perubahan dalam masyarakat memerlukan waktu yang tidak sebentar dan harus didukung secara berkelanjutan. Sulit untuk meninjau tingkat keberhasilan Poktan bagi setiap anggota kelompok mengingat sampai saat ini belum ada evaluasi lebih lanjut untuk

4 Partisipasi masyarakat dalam evaluasi Poktan Kampung KB Desa Penarungan

memperoleh data mengenai kualitas hidup masyarakat dari awal mengikuti Poktan kampung KB hingga kini.

Partisipasi masyarakat pada tahapan evaluasi sangat rendah. Berdasarkan hasil penelitian, hanya sedikit masyarakat yang ikut berpartisipasi dengan memberikan kritik dan saran secara langsung ke kader. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kader Poktan Kampung KB Desa Penarungan, yang mengatakan bahwa:

“ada saja masyarakat yang menyampaikan keluhan atau saran secara langsung ke kader tetapi tidak selalu dan hanya satu atau dua orang. Masyarakat lebih sering menyampaikan keluhannya kepada masyarakat lainnya, dari mulut ke mulut hingga akhirnya kami mengetahuinya”. (Luh Putu Hepi Hermawati, 12 November 2023)

Kritik dan saran tersebut disampaikan secara langsung ketika pelaksanaan kegiatan berlangsung, tidak diadakan pertemuan khusus bagi masyarakat untuk mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan di masing-masing Poktan. Penyuluh Kampung KB Desa Penarungan menjelaskan bahwa kritik atau saran yang bersifat mendesak biasanya dilaporkan langsung oleh kader kepada pokja Kampung KB. Apabila kritik atau saran tidak mendesak, dibahas ketika ada pertemuan di kantor desa.

Partisipasi Masyarakat dalam Poktan Kampung KB Desa Penarungan

Partisipasi masyarakat dalam Poktan Kampung KB Desa Penarungan berdasarkan dengan tahapan partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (dalam Hutagalung, 2022) dinilai belum berjalan dengan optimal. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan bermacam-macam seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan ataupun penolakan terhadap program yang di tawarkan (Cohen dan Uphoff dalam Hutagalung, 2022). Berdasarkan hasil penelitian, bahwa masyarakat tidak ikut berpartisipasi secara langsung pada tahap pembuatan keputusan, melainkan diwakilkan oleh kelian dinas (kepala dusun). Melalui rapat Pokja Kampung KB Desa Penarungan yang terlaksana rutin setiap bulan ganjil, kelian dinas memiliki ruang untuk memberikan tanggapan terkait rencana kegiatan yang akan dijalankan. Kelian dinas telah mengetahui kondisi wilayahnya masing-masing dan masyarakat pun seringkali enggan untuk mengeluarkan pendapatnya dalam forum terbuka. Partisipasi masyarakat melalui perwakilan dianggap lebih efisien daripada melibatkan semua individu secara langsung. Namun dalam hal ini penulis melihat sistem keterwakilan belum sepenuhnya dapat dikatakan ideal mengingat tidak semua kelian dinas hadir dalam pertemuan tersebut.

Ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan mencakup kontribusi sumber daya dan dana (Cohen dan Uphoff dalam Hutagalung, 2022). Dalam pelaksanaan poktan, terdapat penggerakan sumber daya manusia, tidak hanya sebagai anggota kelompok yang menerima penyuluhan, tetapi masyarakat juga dilibatkan dalam mengurus kegiatan dan membantu dalam memberikan penyuluhan sebagai kader. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan Poktan Kampung KB di Desa Penarungan sudah baik dalam Poktan BKB, BKR, dan BKL. Akan tetapi dalam Poktan PIK-R dan UPPKA, partisipasi masyarakat masih belum optimal. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam poktan BKB, BKR dan BKL dikarenakan kegiatan dalam poktan tersebut diintegrasikan dengan kegiatan lainnya yang mengharuskan masyarakat untuk datang, seperti posyandu balita dan sangkep rutin banjar. Sementara untuk poktan PIK-R dan UPPKA, berintegrasi dengan kegiatan yang memiliki partisipasi masyarakat rendah.

Pelaksanaan Poktan Kampung KB Desa Penarungan didukung dengan dana yang bersumber dari APBDes. Akan tetapi permasalahannya ialah dana tersebut belum difokuskan untuk Poktan sehingga belum bisa diadakan pertemuan khusus untuk masing-

masing Poktan tanpa mengintegrasikannya dengan kegiatan lainnya serta belum semua kader memperoleh reward berupa upah yang menjadi salah satu penyebab pelaksanaan kegiatan di masing-masing kelompok tidak berjalan rutin. Dana memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terlebih lagi adanya kecenderungan money oriented yang dimana masyarakat di Desa Penarungan berpikiran bahwa di setiap kegiatan terdapat anggaran untuk pelaksanaannya.

Poktan Kampung bertujuan menciptakan keluarga berkualitas dengan sumber daya manusia yang unggul melalui penyuluhan. Sebagai anggota Poktan dan ikut serta dalam pelaksanaannya, masyarakat semestinya memperoleh manfaat sebagaimana yang menjadi tujuan dari Poktan tersebut. Tahap pemanfaatan hasil dari partisipasi berkaitan dari kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai Cohen dan Uphoff (dalam Hutagalung, 2022). Berdasarkan hasil penelitian, bahwasannya masyarakat cukup merasakan manfaat berpartisipasi dalam Poktan.

Dalam aspek kualitas, partisipasi masyarakat dalam Poktan memberikan manfaat yang konkret. Keluarga dengan balita dapat menilai perkembangan anak mereka sesuai kelompok umurnya, meningkatkan pemahaman mengenai tumbuh kembang anak. Melalui Poktan BKR, masyarakat memahami cara mendidik remaja dengan benar, sedangkan Poktan BKL meningkatkan kepedulian terhadap kebutuhan lansia secara fisik dan psikologis. Remaja di Poktan PIK-R menjadi lebih sadar akan kesehatan sejak dini, sementara anggota Poktan UPPKA dapat mempromosikan usahanya melalui pameran. Dari segi kuantitas belum adanya data mengenai peningkatan kualitas hidup masyarakat sejak mengikuti Poktan kampung KB dari awal hingga saat ini, sehingga sulit untuk meninjau tingkat keberhasilan Poktan bagi setiap anggota kelompok.

Tahapan terakhir untuk mengukur partisipasi masyarakat ialah tahap evaluasi. Sebagai subjek dan objek Poktan Kampung KB keterlibatan masyarakat dalam evaluasi sangatlah penting karena kegiatan tersebut dirancang, dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakatlah yang paling mengetahui apakah program yang dijalankan sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dalam tahap evaluasi, masyarakat ikut berpartisipasi dengan memberikan kritik ataupun saran terhadap penyelenggaraan kegiatan. Namun masih sedikit masyarakat yang berpartisipasi dalam mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan partisipasi masyarakat dalam tahap pembuatan keputusan, yang mana masyarakat sudah merasa terwakili pendapatnya oleh masyarakat lainnya. Kritik dan saran masyarakat disampaikan secara langsung kepada kader yang mengurus kegiatan, kemudian kaderlah yang meneruskan kepada pokja Kampung KB sebagai bahan evaluasi untuk mengoptimalkan kegiatan selanjutnya. Sesuai dengan teori Cohen dan Uphoff (dalam Hutagalung, 2022), partisipasi masyarakat dalam evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Berdasarkan uraian partisipasi masyarakat tersebut, terlihat bahwa beberapa indikator keberhasilan program Kampung KB dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Desa Penarungan belum terpenuhi. Evaluasi keberhasilan program ini tidak hanya mengandalkan hasil, tetapi juga mempertimbangkan masukan dari input, proses, dan output (BKKBN, 2016). Dari aspek input, partisipasi potensi masyarakat dalam Poktan Kampung KB masih kurang optimal terutamanya pada tahap pelaksanaan dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan kurang beragam, hanya berupa penyuluhan yang diintegrasikan dengan kegiatan lainnya. Disamping itu, sumber anggaran hanya mengandalkan APBDes dan tidak ada iuran dari masyarakat yang semestinya dapat menunjang penyelenggaraan kegiatan. Dari segi proses, frekuensi pertemuan rutin kelompok kegiatan atau Poktan

belum terlaksana dengan baik. Dari sisi output, belum ada data yang menunjukkan peningkatan kualitas hidup keluarga anggota Poktan. Walaupun masyarakat menyadari peningkatan pengetahuan terkait Poktan, mereka juga mengakui kesulitan dalam mengimplementasikannya secara langsung.

Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Poktan Kampung KB Desa Penarungan

1) Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam Poktan Kampung KB Desa Penarungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Poktan Kampung KB Desa Penarungan diperkuat oleh sikap responsif Pokja Kampung KB dan Penyuluh Kampung KB Desa Penarungan dalam menanggapi permasalahan yang dihadapi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Poktan. Permasalahan seperti kendala waktu, saat melaksanakan kegiatan door to door, teratasi dengan mengintegrasikan Poktan dengan kegiatan lainnya dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat tidak hanya sebagai peserta penyuluhan tetapi juga sebagai kader yang memberikan penyuluhan. Hal ini sejalan dengan Hutagalung (2022) yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Pokja Kampung KB Desa Penarungan dan Penyuluh Kampung KB Desa Penarungan telah berupaya membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Integrasi Poktan ke dalam kegiatan lain menjadi pendorong utama partisipasi masyarakat. Pemilihan kader dari masyarakat setempat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi, karena kader dapat lebih efektif mendorong partisipasi masyarakat.

2) Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Poktan Kampung KB Desa Penarungan

Berdasarkan penelitian, ditemukan beberapa faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Poktan Kampung KB Desa Penarungan. Faktor utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama, di mana masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi dalam Poktan. Kurangnya pembinaan rutin dari kader di masing-masing banjar juga berperan dalam rendahnya partisipasi masyarakat. Faktor lain yang menghambat adalah keterbatasan dana untuk penyelenggaraan kegiatan tunggal khusus Poktan, sehingga Poktan hanya dapat diselenggarakan bersamaan atau diintegrasikan dengan kegiatan lainnya. Perspektif masyarakat yang cenderung money oriented dan mengutamakan imbalan materi saat akan mengikuti kegiatan membuat partisipasi memerlukan dana yang cukup besar. Sedangkan dana yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Poktan hanya bersumber dari APBDes, tanpa dukungan iuran masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Poktan Kampung KB belum sepenuhnya disadari sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mensukseskan program yang telah dirancang.

Selain faktor tersebut, ketidaktersediaan data yang jelas juga menjadi hambatan dalam meninjau keakuratan hasil kegiatan. Pengukuran partisipasi masyarakat didasarkan pada perkiraan kehadiran, karena tidak adanya presensi kehadiran yang real. Ditambah dengan tidak adanya kewajiban bagi kader untuk melaporkan tugasnya, mengakibatkan ketidaktersediaan data tertulis atau bukti fisik. Data lain yang belum tersedia mencakup sejauh mana kegiatan Poktan berpengaruh pada anggotanya dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas.

4. CONCLUSION

Partisipasi masyarakat dalam Kelompok Kegiatan (Poktan) Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari:

- a) Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan kegiatan Kampung KB Desa Penarungan melalui perwakilan kelian dinas di masing-masing banjar. Masyarakat tidak berpartisipasi secara langsung, sumbangan ide atau gagasan serta pendapat pada tahap pengambilan keputusan (perencanaan kegiatan) diwakilkan oleh kelian dinas (kepala dusun) masing-masing banjar melalui rapat rutin Pokja yang dilaksanakan rutin setiap bulan ganjil.
- b) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Poktan Kampung KB Desa Penarungan ialah sebagai anggota Poktan yang menerima penyuluhan serta sebagai kader yang mengatur jalannya kegiatan. Meskipun telah berintegrasi dengan kegiatan lainnya, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Poktan PIK-R dan UPPKA sangat rendah karena kegiatan yang ditumpangi memiliki partisipasi yang rendah. Kendala lainnya ialah keterbatasan dana untuk penyelenggaraan kegiatan, ketidakrutinan kegiatan bulanan di masing-masing Poktan, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi.
- c) Partisipasi masyarakat dalam menerima manfaat ialah dengan memperoleh pengetahuan yang lebih baik sebagaimana yang menjadi tujuan Poktan. Akan tetapi masyarakat masih kesulitan dalam menerapkannya dan tidak ada evaluasi lebih lanjut apakah Poktan tersebut berhasil mewujudkan keluarga berkualitas bagi setiap anggotanya.
- d) Partisipasi masyarakat dalam evaluasi sangat rendah dimana tidak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan kritik dan saran. Hanya beberapa masyarakat yang menyampaikan kritik dan saran yang kemudian dijadikan acuan untuk membenahi pelaksanaan kegiatan berikutnya.
- e) Partisipasi masyarakat yang belum optimal pada Poktan Kampung KB Desa Penarungan mengindikasikan bahwa tujuan pembentukan Kampung KB untuk mencapai keluarga berkualitas belum terwujud sepenuhnya. Meskipun sikap responsif Pokja dan Penyuluh Kampung KB memberikan dukungan yang penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Poktan, namun beberapa kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya dana untuk Poktan, dan keterbatasan data, masih menjadi faktor penghambat.

5. REFERENCES

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2016). Petunjuk Teknik Kampung KB. Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN. <https://anyflip.com/kqpab/chuw>
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2022). Modul 3 - Kampung Keluarga Berkualitas. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2023). Percontohan Kampung KB di Indonesia. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung-percontohan>

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2023). Statistik Kampung KB Desa Penarungan. <https://kampunskb.bkkbn.go.id/kampung/2362/desa-penarungan>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2021-2023.
- Hutagalung, S. S. (2022). Buku ajar Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik. Literasi Nusantara Abadi.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri). (2020). Surat Edaran No.843.4/2879/SJ. Tentang Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas.
- Resnawaty, R., & Humaedi, S. (2021). EVALUASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA. Kolaborasi Resolusi Konflik, 3(1), 93–104.

Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Body Care Herborist di Sidoarjo

Risqy Maudy Inayah^{1*}, Dhinda Lintang Cahya Gumilang², Zahra Nur Annisa³,
Nindya Kartika Kusmayati⁴, Noneng R. Sukatmadiredja⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Manajemen, STIE Mahardhika Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 17, 2024

Revised May 7, 2024

Accepted May 8, 2024

Available online May 25, 2024

Keywords:

Brand Image, Buying
Decisions; Body Care Herborist



This is an open access article under the
CC BY-SA license.

Copyright © 2024 by Author. Published
by Universitas Hang Tuah

ABSTRACT

This study seeks to assess how the brand image of Herborist body care products impacts consumers' purchasing choices. Brand image encompasses perceptions of product quality, safety, cleanliness, and effectiveness, all of which are significant factors influencing consumer preferences. Employing a quantitative approach, this study collected data through online questionnaires distributed via Google Form, with a sample size of 43 respondents and then using tools SPSS version 29.0.2 software. The findings of this research were demonstrated to be valid and reliable, meeting assumptions of normality and being free from heteroscedasticity and autocollinearity. A simple linear model $Y = -0.733 + 0.852X + e$ was derived from the data, indicating that brand image (X) significantly affects buying decisions (Y). To maintain or enhance purchasing decisions Herborists need to review flows and analyze product, pricing, and advertising aspects to prevent decreased purchases. Companies are advised to utilize social media promotions to encourage people to buy Herborist body care products.

1. INTRODUCTION

Dalam tengah-tengah perubahan dinamis di pasar Indonesia yang semakin kompetitif, para pemasar harus terus berupaya untuk mengembangkan dan merebut pangsa pasar. Mekanisme pasar mendorong pemasar untuk terus mengembangkan strategi yang inovatif guna mempertahankan dan meningkatkan market share. Pemasaran tidak hanya berfokus pada penjualan produk semata, namun juga pada pembentukan Brand Image yang menarik bagi konsumen.

Brand Image melekat pada sebuah entitas, entah itu berupa produk atau tempat, yang menimbulkan kesan yang spesifik dan tak tergantikan bagi para konsumen. Proses pembentukan identitas ini sangat bergantung pada pengalaman serta persepsi masing-masing pelanggan ketika mereka berinteraksi dengan entitas tersebut. Selain itu, interaksi antar konsumen juga berperan penting dalam proses ini, di mana pertukaran informasi dan pengalaman antara satu konsumen dengan konsumen lainnya menghasilkan gambaran yang unik dan khas untuk entitas tersebut. Dengan demikian, identitas merek bukanlah sesuatu yang statis, tetapi terus berkembang dan terbentuk melalui interaksi dan pengalaman yang terjadi di antara para konsumen dan entitas yang bersangkutan (Subagyo, 2020)

Dapat dilihat dari entitas Brand image maka strategi pemasaran harus dipikirkan secara matang untuk memperkuat Brand Image melalui berbagai inisiatif yang sesuai. Di industri body care, persaingan semakin ketat dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh para pelaku industri. Mereka bertujuan untuk meningkatkan penjualan, merebut kembali pangsa pasar yang hilang, dan mempertahankan posisi mereka di pasar. Oleh karena itu, Brand Image menjadi elemen krusial dalam menghadapi tantangan ini. Brand

Image tidak hanya mencerminkan identitas merek itu sendiri, tetapi juga berperan penting dalam membentuk persepsi yang diinginkan oleh konsumen. Sehingga, pengembangan citra merek menjadi prioritas utama bagi perusahaan dalam mencapai pangsa pasar yang diinginkan.

Sejalan dengan itu, kesadaran masyarakat tentang perawatan dan penampilan diri semakin meningkat karena banyaknya produk body care yang diiklankan, baik di media sosial maupun media cetak. Tren penggunaan body care berubah dari tahun ke tahun. Tren terkini selama pandemi Covid-19 menunjukkan banyak pengguna di media sosial mengikuti tren yang populer. Dengan demikian, merek harus tetap inovatif dan adaptif terhadap perubahan tren dan kebutuhan konsumen untuk menjaga daya saing di pasar (Ayu Anggreni & Hambalah, 2022).

Peningkatan kesadaran masyarakat tersebut membuat produk kecantikan menjadi semakin beragam dengan berbagai merek bersaing dalam kategori body care. Salah satu merek yang dikenal adalah Herborist, milik PT. Victoria Care Indonesia, yang menonjol karena penggunaan bahan-bahan alami dalam produknya. Persaingan di industri kecantikan semakin intens, sehingga produsen harus memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Citra merek atau brand image menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi pilihan konsumen terhadap produk perawatan tubuh.

Pembahasan penelitian mengenai item produk Body Care Herborist terhadap keputusan pembelian konsumen ini dilakukan atas dasar adanya persaingan pasar ketat dalam industri kecantikan. Apakah konsumen mempunyai alasan dalam pemilihan merek body care, serta apakah konsumen sangat mengenali dengan baik terhadap merek atau hanya memilih dikarenakan brand image yang dimiliki oleh Herborist.

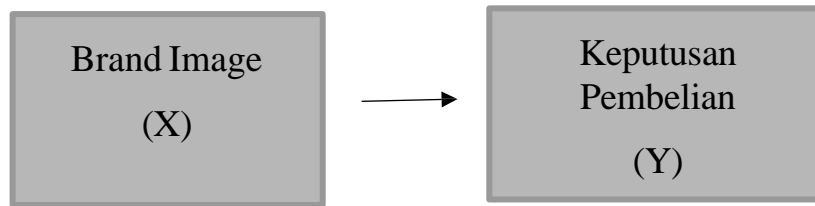
2. METHODS

Menurut (Amruddin, 2022) Metode penelitian kuantitatif sering disebut metode tradisional atau paradigma tradisional karena telah lama digunakan dan dianggap sebagai metode yang telah menjadi bagian dari tradisi penelitian. Dianggap sebagai metode positivistik atau dalam pandangan dunia post-positivisme karena didasarkan pada filsafat positivisme. Selain itu, metode ini dianggap sebagai metode ilmiah atau saintifik karena memenuhi kaidah-kaidah ilmiah seperti konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis.

Penelitian ini mengidentifikasi dua variabel, yaitu Brand Image (X1) menjadi variabel bebas serta Keputusan Pembelian (Y) menjadi variabel terikat. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah data primer, diperoleh langsung dari subjek data konsumen oleh peneliti menggunakan kuesioner dalam format Google Form. Jumlah responden pada penelitian ini ialah 43 responden. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner dengan pertanyaan berbentuk pilihan ganda. Setiap pertanyaan memiliki lima opsi jawaban atau skala Likert, yang memungkinkan responden untuk memilih satu dari opsi tersebut.

Selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis klasik, termasuk uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, untuk memastikan bahwa persamaan regresi logistik yang dihasilkan oleh penelitian ini sesuai dengan distribusi data yang normal. Tahap akhir melibatkan uji t untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel stimulus terhadap variabel dependen. Berdasarkan penjelasan tersebut, kesimpulan dalam kerangka konseptual dapat dirumuskan sebagai berikut:

Berikut adalah hipotesis yang disajikan:



Gambar 1. Hipotesis Penelitian

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel 5%	Sig.	Keterangan
Brand Image	X1	0.867	0.2483	<0,001	Valid
	X2	0.885	0.2483	<0,001	Valid
	X3	0.848	0.2483	<0,001	Valid
	X4	0.807	0.2483	<0,001	Valid
	X5	0.781	0.2483	<0,001	Valid
	X6	0.889	0.2483	<0,001	Valid
	X7	0.903	0.2483	<0,001	Valid
	X8	0.843	0.2483	<0,001	Valid
Keputusan Pembelian	Y1	0.668	0.2483	<0,001	Valid
	Y2	0.876	0.2483	<0,001	Valid
	Y3	0.891	0.2483	<0,001	Valid
	Y4	0.698	0.2483	<0,001	Valid
	Y5	0.833	0.2483	<0,001	Valid
	Y6	0.850	0.2483	<0,001	Valid
	Y7	0.855	0.2483	<0,001	Valid

Dari data yang terdapat dalam Tabel 1, terlihat bahwa semua pertanyaan menghasilkan nilai Signifikansi (Sig.) yang lebih kecil dari Signifikansi alpha (0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan yang dipergunakan untuk menilai variabel brand image dan keputusan pembelian dianggap valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Ketetapan α	Keterangan
X	0.944	0.600	Reliabel
Y	0.912	0.600	Reliabel

Berdasarkan data yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa seetiap variabel pada instrumen penelitian memiliki nilai Cronbach's alpha di atas 0,600, yang menunjukkan tingkat reliabilitas yang memadai. Oleh karena itu, instrumen ini dianggap cocok dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

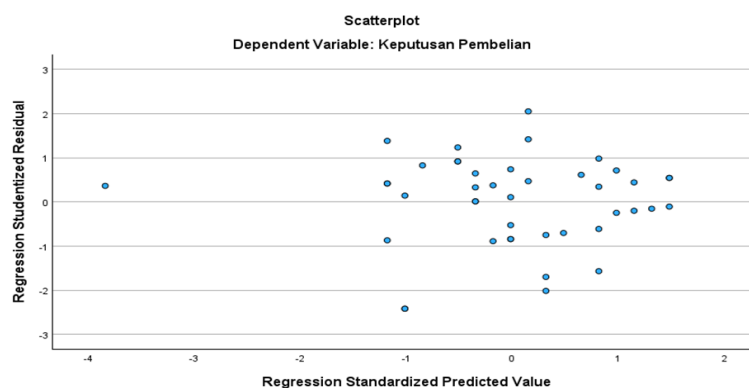
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters a,b	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	316.330.927
Most Extreme Differences	Absolute	0,126
	Positive	0,072

	<i>Negative</i>	-0,126
<i>Test Statistic</i>		0,126
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,084
		0,081

Dalam penelitian ini, uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji normalitas data. Data dianggap normal jika nilai Monte Carlo Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Dari hasil tabel, terlihat bahwa nilai sig Monte Carlo (2-tailed) untuk pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian adalah 0,81, yang lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa data tersebut memenuhi syarat normal.

b. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dalam tabel uji pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian, nilai Sig melebihi 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas SPSS menggunakan metode Spearman Rho juga menunjukkan nilai Sig yang rendah. Nilai signifikansi (2-tailed) dari variabel yang dianalisis pada penelitian ini memiliki nilai yang melebihi 0,05. Dengan demikian, berdasarkan temuan disimpulkan bahwa tidak ada masalah yang terdeteksi.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

<i>Model Summary^b</i>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,851 ^a	0,724	0,717	3,202	1,914

Dari tabel tersebut, didapat nilai DU sebesar 1,5577 dan nilai DW (Durbin Watson) sebesar 1,914. Untuk mengevaluasinya, dapat merujuk pada perbandingan sebagai berikut:

$$DU < DW < 4-DU$$

$$1,5577 < 1,914 < 2,4423$$

Dengan mengacu pada perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi yang terjadi dalam penelitian ini karena nilai Durbin-Watson sebesar 1,914 lebih besar dari nilai DU sebesar 1,5577 dan lebih kecil dari 4 - DU.

Uji Regresi Sederhana

a. Statistik Deskriptif

Tabel 5. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Karakteristik Responden	Frekuensi	Presentase
Umur :		
a. 14 - 20 Tahun	11	25,58%
b. 21 - 25 Tahun	30	69,77%
c. > 26 Tahun	2	4,65%
Total	43	100%
Jenis Kelamin :		
a. Perempuan	34	79,07%
b. Laki-laki	9	20,93%
Total	43	100%

Data penelitian dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner melalui Google form sehingga diperoleh sampel sebanyak 43 responden yang dapat dilakukan pengolahan data. Pada tabel 6 memaparkan terkait karakteristik responden terkait dengan usia, serta jenis kelamin responden. Terdapat 11 responden yang berusia 14-20 tahun, 30 responden berusia 21-25 tahun dan sebanyak 2 responden berusia di atas 26 tahun. Terdapat 34 responden yang berjenis kelamin perempuan, sementara 9 responden yang berjenis kelamin laki-laki.

b. Persamaan Regresi Linear Sederhana

Tabel 6. Hasil Persamaan Regresi Linear Sederhana

<i>Coefficients^a</i>					
		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	
Model		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>t</i>
1	(Constant)	-0,733	2.600		-0,282
	Brand;Image	0,852	0,082	0,851	10.368
					<i>Sig.</i>
					0,779
					<0,001

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Dari persamaan regresi $Y = -0,733 b + 0,852 x + e$, dengan e merupakan variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini, dan hasil dari tabel 6 menunjukkan persamaan regresi yang sama, yaitu $Y = -0,733 b + 0,852 x + e$. Berdasarkan persamaan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) adalah 1,544, yang berarti jika variabel Komunikasi (X1) bernilai 0, maka nilai kinerja karyawan (Y) adalah -0,733.
2. Nilai Brand Image (X1) adalah 0,852, yang berarti meningkatnya nilai Brand Image dapat mengakibatkan peningkatan keputusan pembelian sebesar 0,852.

c. Uji t parsial

Tabel 7. Hasil Uji t Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized		Standardized	
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>t</i>
1	(Constant)	-0,733	2.600		-0,282
	Brand;Image	0,852	0,082	0,851	10.368
					<i>Sig.</i>
					0,779
					<0,001

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Hasil analisis menggunakan SPSS, ditemukan nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel Brand Image adalah 0,001, yang kurang dari 0,05. Ini mengindikasikan bahwa variabel Brand Image memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keputusan pembelian.

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary^b</i>				
Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,851 ^a	0,724	0,717	3,202

Dari hasil uji SPSS yang disajikan di atas, ditemukan bahwa R-squared memiliki nilai sebesar 0,724. Hal ini menunjukkan bahwa variabel brand image memiliki pengaruh sebesar 0,724 atau 72,4% terhadap keputusan pembelian konsumen, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

DISCUSSIONS

Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat di Sidoarjo mengenai pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian konsumen produk Body Care Herborist menghasilkan temuan yang signifikan. Validitas dan reliabilitas indikator brand image serta keputusan pembelian terkonfirmasi, menegaskan kepercayaan yang memadai dalam instrumen penelitian. Selain itu, uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data penelitian memenuhi syarat normalitas, tidak mengalami masalah heteroskedastisitas atau autokorelasi. Analisis regresi sederhana mengungkapkan hubungan positif dan signifikan antara brand image dengan keputusan pembelian, di mana peningkatan nilai brand image berpotensi meningkatkan keputusan pembelian. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel brand image memiliki pengaruh sebesar 72,4% terhadap keputusan pembelian konsumen, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Dengan demikian, perusahaan Body Care Herborist di Sidoarjo perlu memperhatikan dan meningkatkan brand image mereka untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan memengaruhi keputusan pembelian konsumen secara positif.

4. CONCLUSION

Brand Image berperan signifikan pada keputusan pembelian konsumen. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap brand image secara langsung memengaruhi preferensi dan kecenderungan mereka dalam memilih produk atau layanan tertentu. Maka dari itu, penting bagi perusahaan untuk teliti memantau dan mengelola citra merek mereka untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar.

Strategi pemasaran yang bertujuan untuk membangun serta menjaga citra merek yang baik dapat membantu meningkatkan loyalitas konsumen dan penjualan produk. Selain itu, penelitian dan pengembangan terus-menerus diperlukan untuk memahami hubungan antara brand image dan perilaku konsumen. Dengan Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan konsumen terhadap merek, perusahaan bisa merancang strategi pemasaran yang lebih efisien dan menghasilkan hasil yang lebih baik dalam hal keputusan pembelian konsumen. Dalam penelitian ini ada beberapa saran yang dapat kami berikan, diantara lain : 1) Herborist harus memeriksa aliran, menganalisis semua aspek produk, harga, dan periklanan agar terhindar dari penurunan jumlah keputusan pembelian; 2) Perusahaan sebaiknya menggunakan promosi media sosial untuk mengajak masyarakat agar membeli produk perawatan tubuh Herborist.

5. REFERENCES

- Adhawiyah, Y. R., & Anshori, M. I. (2019). PERAN PEMASARAN MEDIA SOSIAL DALAM MENCIPTAKAN KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI KESADARAN MEREK (Studi pada Instagram Clothing Line Bangjo). 22(1), 34–45.
- Amruddin, S. P. (2022). Paradigma Kuantitatif, Teori Dan Studi Pustaka. Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, 1.
- Ayu Anggreni, G., & Hambalah, F. (2022). Pengaruh Word Of Mouth Terhadap Minat Beli Produk Scarlett Whitening. Ekonomi Dan Bisnis (Ekobis) 45, 1(1), 8–13. <https://doi.org/10.56912/ekobis45.v1i1.7>
- Hermawan, E., & Suprayitno, D. (n.d.). Buku Ajar Penelitian.
- Liliana, M. (2023). Pengaruh Brand Image Dan Online Customer Review Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen E-Commerce Blibli.Com Di Jakarta. Manajemen, 27.
- Marbun, M. B., Ali, H., & Dwikoco, F. (2022). Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan Dan Keputusan Pembelian Terhadap Pembelian Ulang (Literature Review Manajemen Pemasaran). Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 3(2), 716–727.
- mullins dkk dalam firmansyah. (2019). Buku Pemasaran Produk dan Merek. Buku Pemasaran Produk Dan Merek, August, 143–144.
- Subagyo, H. (2020). Pengaruh Service Scape dan Brand Image Terhadap Kepuasan Konsumen di SK Coffee Lab Kota Kediri. 5, 1–18.
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). PRODUK DAN MEREK (suatu pengantar). In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. (Vol. 3, Issue 1).

Innovation Capability and Learning Capability To Individual Performace : Well Being Moderation (Case Study of Small and Medium Enterprises: Freez Food Baby Porridge Sedati)

Fransisca Eri Yulianti^{1*} Wahyu Eko Pujianto²

^{1,2} Human Resource Economics, Universitas Nahdatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 22, 2024

Revised May 05, 2024

Accepted May 08, 2021

Available online May 25, 2024

Keywords:

Innovation Capability;

Learning Capability;

Individual Performance; Well

Being Moderation; SMEs



This is an open access article under the
CC BY-SA license.

Copyright © 2024 by Author. Published
by Universitas Hang Tuah

ABSTRACT

This study aims to investigate the relationship between innovation capability, learning capability, and individual performance in Small and Medium Enterprises (SMEs) with well-being moderation, using the Case Study of "Freez Food Baby Porridge Sedat" product. A survey method was employed to collect data from 30 respondents comprising owners and employees of these SMEs. The analysis results indicate that innovation capability has a significant positive influence on individual performance through learning capability. Additionally, individual well-being moderates the relationship between innovation capability, learning capability, and individual performance. The practical implications of these findings underscore the importance for SMEs to develop innovation and learning capabilities as strategies to enhance individual performance, while considering well-being as a moderating variable. This study offers valuable insights for SME owners in designing human resource development programs focused on improving individual performance through investments in innovation and learning.

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (Lei et al., 2020). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong untuk selalu berupaya melakukan pembaruan dalam memanfaatkan teknologi. Teknologi mempunyai pengaruh besar terhadap globalisasi (Purwanto, 2020). Semua orang menyadari bahwa globalisasi membawa dampak positif bagi setiap orang, diantaranya mendapatkan informasi jadi lebih mudah, komunikasi jadi lebih canggih dan sebagainya (Ferreira et al., 2020). Namun tanpa kita sadari bahwa globalisasi juga membawa dampak negative yang bisa menimbulkan kesenjangan ekonomi. Untuk itu sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam ekonomi, yakni menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif serta memiliki ketrampilan berdaya saing tinggi (Shahriari et al., 2018).

Persaingan bisnis yang semakin ketat, kemampuan inovasi dan kemampuan belajar menjadi faktor kunci yang memengaruhi kinerja individu di berbagai bidang industri (Yang et al., 2018). Kemampuan inovasi mencakup kemampuan individu untuk menghasilkan ide-ide baru, konsep, atau produk yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja (Le & Lei, 2019). Di sisi lain, kemampuan belajar merupakan kemampuan individu untuk menyerap, memproses, dan menggunakan informasi baru untuk meningkatkan kinerja mereka dalam tugas-tugas yang dihadapi (Wang & Hu, 2020).

*Corresponding author.

E-mail: fransiskaeriyulianti6@gmail.com

Sumber daya manusia adalah aset perusahaan yang sangat penting dan harus di jaga sebaik mungkin (Broadstock et al., 2020). Sumber daya manusia yang baik akan menjadi kekuatan bagi perusahaan untuk tetap bisa bersaing dari para kompetitornya. Kemudahan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi juga menyebabkan banyak pesaing baru yang masuk dalam dunia industri yang di jalannya, hal ini mengakibatkan banyaknya pesaing yang semakin ketat (Mikalef et al., 2019). Maka dari itu pengetahuan dan ilmu teknologi sangat penting sekali untuk industry dan kinerja sumber daya manusia agar lebih berkualitas dan kompetitif (Najafi-Tavani et al., 2018).

Kemampuan berinovasi dan beradaptasi bukan lagi sekedar keunggulan kompetitif namun merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup dalam lingkungan bisnis yang dinamis saat ini (Borah et al., 2022). Dengan demikian, pemahaman hubungan antara kemampuan inovasi, kemampuan belajar, dan kinerja individu telah menjadi titik fokus bagi para peneliti dan praktisi. Inovasi juga merupakan factor penting dalam dunia bisnis (Purwanto, 2020). Pentingnya inovasi pada sebuah bisnis adalah untuk mengembangkan ide - ide kreatif dan meningkatkan nilai jual (Ganguly et al., 2019). Untuk itu para pelaku bisnis dapat lebih berupaya untuk menarik konsumen dengan memahami keinginan dan permintaan konsumen (Shahriari et al., 2018). Era globalisasi sekarang ini sungguh banyak tantangan yang perlu disiapkan oleh manusia untuk bisa berbenah diri dalam peningkatan sumber daya manusia termasuk pula ada upaya meningkatkan kreatifitas dan inovasi (Ferreira et al., 2020).

Knowledge merupakan modal utama untuk memenangkan persaingan di dunia usaha khususnya minuman (Kuncoro et al., 2022). Selain menjadi modal utama *knowledge* juga berperan penting untuk kualitas sumber daya manusia. Pengetahuan berperan besar untuk sumber daya manusia karena semakin tinggi tingkat pengetahuan karyawan maka mereka akan dapat lebih mudah memahami tugas dan tanggung jawab mereka (Wuryaningrat, 2020). Permasalahan yang sering terjadi justru karena kurangnya informasi yang diperlukan karyawan untuk menjalankan tugasnya. Kurangnya informasi mencerminkan pengetahuan yang melandasi kompetensi individu masih rendah, sehingga perlu untuk melakukan pengelolaan terhadap *knowledge* yang baik yaitu *knowledge sharing* dan *knowledge colleting* (Berliana & Arsanti, 2018).

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang perlu dilakukan atau apa yang tidak perlu di lakukan kepada karyawan sehingga dapat mempengaruhi seberapa banyak kontribusi mereka kepada instansi atau organisasi termasuk pelayanan kualitas yang disajikan. Kinerja sumber daya manusia dapat di artikan sebagai prestasi kerja. Menurut (Nurchayo & Wikaningrum, 2020) Kinerja sumber daya manusia adalah hasil karya atau kerja (*output*) baik kualitas maupun kuantitas yang di capai sumber daya manusia persatu periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan (Sunarto, 2020).

Inovasi merupakan sebuah hal yang baru, dimana hal tersebut belum pernah ada sebelumnya, selain menciptakan hal baru di harapkan juga menjadi sesuatu yang lebih menarik dan berguna bagi semua orang. Menurut (Zakiah et al., 2020) inovasi sebagai keberhasilan ekonomi berkat adanya pengenalan cara baru atau kombinasi baru dari cara – cara lama dalam mentransformasi input menjadi output (teknologi) yang menghasilkan perubahan besar atau drastis dalam perbandingan antara nilai guna yang dipersepsikan oleh konsumen atas manfaat suatu produk (barang atau jasa) dan harga yang ditetapkan oleh produsen (Indrawati & Wardono, 2019).

Knowledge management diharapkan dapat memberi manfaat dan kekuatan bagi sumber daya. Bagian terpenting dalam knowledge management adalah mendorong individu yang ada di dalam organisasi untuk melakukan kegiatan knowledge sharing mengenai apa yang mereka ketahui (Khildani & Lestariningsih, 2021). *Knowledge sharing* merupakan suatu pemahaman bersama terkait dalam penyediaan informasi dengan menggunakan jaringan ilmu pengetahuan dalam organisasi yang dianggap sebagai pendorong inovasi (Desiana, 2019).

Inovasi merupakan salah satu karakteristik yang harus dimiliki seorang pengusaha, pengusaha yang inovasi adalah pengusaha yang mampu menciptakan ide – ide yang baru untuk terus berkembang (Hamzali, 2022). Kemampuan untuk mencoba ide-ide baru dilakukan dengan meningkatkan kreativitas untuk menemukan ide dan diwujudkan dalam bentuk inovasi. Inovasi dalam bentuk produksi dilakukan dengan cara mencoba membuat proses produksi yang baru untuk mendapatkan system proses produksi yang lebih efisien agar perusahaan dapat meminimalisir biaya produksi sehingga berdampak pada peningkatan kinerja (Miao & Cao, 2019).

Inti dari wacana ini terletak pada konsep kemampuan inovasi – kapasitas organisasi untuk menghasilkan, menerapkan, dan mempertahankan ide dan praktik baru. Kemampuan ini mencakup tidak hanya kemampuan untuk mengembangkan produk atau layanan inovatif tetapi juga menumbuhkan budaya yang mendorong eksperimen dan kreativitas di seluruh tingkat organisasi. Melengkapi kemampuan inovasi adalah kemampuan belajar, yang melibatkan kapasitas organisasi untuk memperoleh, mengasimilasi, dan menerapkan pengetahuan baru secara efektif. Intinya, kemampuan belajar memungkinkan individu dan organisasi untuk terus beradaptasi dan berkembang sebagai respons terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal (G. Li et al., 2019). Meskipun pentingnya inovasi dan kemampuan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja organisasi sudah terdokumentasi dengan baik, dampaknya terhadap kesejahteraan individu masih merupakan area yang masih dieksplorasi (Darvishmotevali & Ali, 2020). Mengejar inovasi dan pembelajaran dapat menjadi hal yang menggembirakan, memberikan individu peluang untuk berkembang, menguasai, dan mencapai kepuasan. Namun, hal ini juga dapat menuntut, memberikan tekanan pada sumber daya kognitif, emosional, dan fisik individu (Afriyie et al., 2019).

Menyadari interaksi yang kompleks ini, penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kemampuan inovasi, kemampuan belajar, dan kinerja individu, dengan fokus khusus pada bagaimana kesejahteraan memoderasi hubungan ini (Sawaeen & Ali, 2020). Dengan menyelidiki mekanisme di mana inovasi dan kemampuan pembelajaran mempengaruhi kesejahteraan dan kinerja individu, penelitian ini berupaya memberikan wawasan yang dapat menginformasikan strategi organisasi untuk menumbuhkan budaya inovasi, pembelajaran, dan kesejahteraan (AlTaweel & Al-Hawary, 2021). Melengkapi kemampuan inovasi adalah kemampuan belajar, yang melibatkan kapasitas organisasi untuk memperoleh, mengasimilasi, dan menerapkan pengetahuan baru secara efektif (C. Li et al., 2020). Intinya, kemampuan belajar memungkinkan individu dan organisasi untuk terus beradaptasi dan berkembang sebagai respons terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal (Rajapathirana & Hui, 2018).

Melalui tinjauan integratif terhadap literatur yang ada dan penelitian empiris, penelitian ini berupaya untuk memajukan pemahaman kita tentang dinamika antara kemampuan inovasi, kemampuan belajar, dan kinerja individu dalam konteks organisasi. Dengan menyoroti kondisi di mana inovasi dan pembelajaran berkontribusi terhadap hasil positif bagi individu dan organisasi, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi

pada dialog yang sedang berlangsung mengenai pengembangan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam perekonomian berbasis pengetahuan saat ini.

Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan dalam beberapa aspek. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana inovasi dan kemampuan belajar mempengaruhi kinerja individu dalam konteks UKM, khususnya dalam industri makanan bayi. Ini dapat membantu UKM, termasuk Freez Food Baby Porridge Sedati, untuk meningkatkan praktik dan strategi mereka dalam meningkatkan kinerja. Dengan memahami hubungan antara inovasi, kemampuan belajar, dan kinerja individu, UKM dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar. Ini karena inovasi dan kemampuan belajar merupakan faktor kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif, yang pada gilirannya dapat membantu UKM bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif. Melalui pemahaman terhadap keterkaitan antara inovasi, kemampuan belajar, dan kinerja individu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kesejahteraan individu yang bekerja di UKM. Dengan demikian, UKM dapat merancang kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan karyawan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja mereka. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang inovasi, pembelajaran organisasi, kinerja individu, dan kesejahteraan kerja. Ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja individu di berbagai konteks organisasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Innovation Capability

Innovation Capability Inovasi ialah suatu proses berpikir dan bertindak kreatif dalam menciptakan suatu produk guna pencapaian keberhasilan dalam instansi (Mikalef et al., 2019). Inovasi menjadi salah satu fungsi bisnis yang diartikan sebagai perubahan dalam suatu bisnis yang mampu mendorong terealisasinya dimensi kinerja yang baru dalam perusahaan (Rajapathirana & Hui, 2018). Untuk menciptakan inovasi, maka instansi wajib memiliki kemampuan mengenai hal-hal baru dan kreatif serta mempelajari cara kerja yang unik (Wang & Hu, 2020). Adapun definisi kemampuan (*ability*) adalah kapasitas individu dalam menyelesaikan tugas maupun kewajiban. Sementara itu, menurut Kemendikbud RI No 45 tahun 2002 menyatakan bahwa kemampuan diartikan sebagai seperangkat perilaku cerdas yang bertanggungjawab pada diri seorang individu dalam menyelesaikan tugas. Kemampuan inovasi atau *Innovation capability* adalah perilaku seseorang dalam menciptakan, memahami, dan menerapkan suatu hal baru yang menguntungkan sebuah instansi (Shahriari et al., 2018). Selain itu, *Innovation capability* juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berorganisasi untuk mengkolaborasikan antara kemampuan antara sumber daya dan kemampuan baru untuk menciptakan suatu nilai baru (Le & Lei, 2019). Adanya *innovation capability* dapat ditentukan sebagai kemampuan dalam pengembangan suatu produk menggunakan teknologi yang dapat mendorong suatu perusahaan menjadi unggul kompetitif atas para perusahaan pesaing (Afriyie et al., 2019).

H1: *Innovation Capability* (kemampuan inovasi) berpengaruh positif terhadap *Individual Performance* (kinerja individu) pada UMKM Bubur Bayi Freez Food Sedati.

H2: *Innovation Capability* (kemampuan inovasi) berpengaruh positif terhadap *Well-being* (kesejahteraan) pada UMKM Bubur Bayi Freez Food Sedati.

Learning capacity

Learning capacity merupakan bentuk kemampuan sumber daya yang didasarkan pada pengetahuan dan beradaptasi dengan lingkungan yang sangat kompetitif (Broadstock et al., 2020). *Learning capacity* mengacu pada proses memperoleh, menggabungkan dan mengembangkan informasi di antara para anggota organisasi (Najafi-Tavani et al., 2018). Dari sudut pandang ini, proses pembelajaran organisasi terdiri dari elemen-elemen kunci yang mendukung kegiatan yang menghasilkan informasi, yang melibatkan pencarian, mengembangkan, memahami dan menghasilkan informasi baru tentang produk, layanan, metode dan teknik baru (Sawaeen & Ali, 2020).

H3: *Learning Capacity* (kapasitas pembelajaran) berpengaruh positif terhadap *Individual Performance* (kinerja individu) pada UMKM Bubur Bayi *Freez Food* Sedati.

H4: *Learning Capacity* (kapasitas pembelajaran) berpengaruh positif terhadap *Well-being* (kesejahteraan) pada UMKM Bubur Bayi *Freez Food* Sedati.

Well Being

Well being merupakan penilaian subjektif terhadap kognitif dan afektif yang dirasakan seseorang yang berhubungan dengan kehidupannya yang dapat mempengaruhi tingkat emosi yang dirasakan (Tay & Diener, 2011). *Well being* merupakan kesatuan dari kesejahteraan individu atas sebuah pekerjaan yang dipengaruhi oleh lingkungan kerja (Rizky & Sal didal, 2019). Menurut Purbal (2019), *well being* adalah karyawan atau kelompok karyawan atas bagian keanggotaan mereka dalam organisasi berupa penghargaan tak langsung. *well-being* dapat dikatakan sebagai keseimbangan antara upaya yang dilakukan karyawan dan kompensasi yang mereka dapatkan (Purbal & Demou, 2019).

H5: *Well-being* (kesejahteraan) memoderasi hubungan antara *Innovation Capability* (kemampuan inovasi) dan *Individual Performance* (kinerja individu) pada UMKM Bubur Bayi *Freez Food* Sedati.

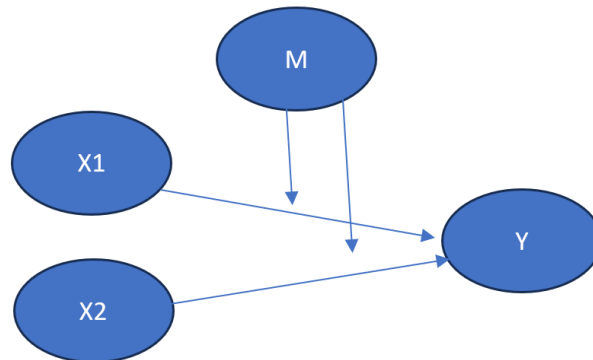
Individual Performance

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Darvishmotevali & Ali, 2020). Menurut Borah (2022) kinerja adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan kinerja (performance) dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu: (1) Faktor individual yang terdiri dari kemampuan dan keahlian,) Latar Belakang, Demografi; (2) Faktor Psikologis yang terdiri dari Persepsi, Attitude, Personal lity, pembelajaran, Motivasi; (3) faktor Organisasi yang terdiri dari Sumber Daya, Kepemimpinan, Penghargaan, Struktur, Job Design. Kinerja individu atau individual performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran tujuan visi dan misi organisasi dari individu yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi dalam kerangka organisasi, kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan dibandingkan dengan kinerja yang telah ditetapkan kinerja perorangan atau kinerja staff perlu mendapatkan perhatian (C. Li et al., 2020).

H6: *Well-being* (kesejahteraan) memoderasi hubungan antara *Learning Capacity* (kapasitas pembelajaran) dan *Individual Performance* (kinerja individu) pada UMKM Bubur Bayi *Freez Food* Sedati.

Model Empirik

Berdasarkan kajian pustaka yang komperhensif dan mendalam dapat disimpulkan bahwa meningkatnya *innovation capability*, *learning capability*, dan *individual performance* akan meningkatkan kesejahteraan individu atas sebuah pekerjaan. Oleh karena itu model empirik dalam penelitian ini dapat disajikan di gambar 1.



Gambar 1. Model Empirik

2. METODE

Dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *explanatory research* dengan menggunakan pendekatan yaitu kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research*. Menurut Suharyat (2022) *explanatory research* adalah suatu penelitian yang menjelaskan tentang hubungan kasual antara variabel – variabel dengan melalui pengujian hipotesis yang sebelumnya sudah dirumuskan (Suharyat, 2022).

Penelitian ini menggunakan kualitas variabel *innovation capability*, *learning capability*, dan *individual performance* dan *well being*. Pada variabel *innovation capability* dengan item pengukuran sebanyak empat item, pada *learning capability* dengan delapan item, *individual performance* sebanyak 10 item dan *well being* sebanyak 8 item.

Populasi merupakan kumpulan individu atau subjek yang di dasari pada kualitas dan ciri-ciri yang telah ditetapkan agar dapat bisa dikaji dan disimpulkan setelahnya (Sugiyono, 2019). Populasi juga merupakan keseluruhan individu untuk siapa kenyataan yang diperoleh akan digeneralisasikan (Hermawan, 2019). Populasi penelitian ini terdiri dari 34 responden UMKM Bubur Bayi Freez Food Sedati. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *proportionate random sampling*. Teknik ini akan memastikan bahwa jumlah sampel yang diambil dari setiap subjek sesuai dengan proporsi populasi di setiap daerah, sehingga dapat dihasilkan sampel yang seimbang (Hermawan, 2019).

Rumus Slovin digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang representatif dari populasi yang besar. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{34}{1 + 34 (0.05^2)}$$

$$n = \frac{34}{1 + 34 (0.025)}$$

$$n = \frac{30}{1 + 0.75}$$

$$n = \frac{34}{1.075}$$

$$n = 31.33$$

Dengan demikian, jumlah sampel yang harus diambil sekitar 31 responden.

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Error Level (Tingkat Kesalahan 5%)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Deskriptif Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang dibagikan	34
2	Kuesioner yang tidak kembali	0
3	Kuesioner tidak memenuhi syarat	0
4	Kuesioner yang kembali dan dapat diolah	34

Sumber: Data primer diolah, 2024

Tabel 2. Deskriptif Responden Jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	20	58.82%
Perempuan	14	41.18%
Jumlah	34	100%

Sumber: Data primer diolah, 2024

Normalitas dan *Common Method Variance* (CMVO)

Normalitas digunakan untuk mengetahui tingkat sebaran data yang diperoleh dari hasil sebaran kuesioner, dalam penelitian ini uji normal yang digunakan yaitu kolmogorov-smirnov sebagai uji normalitas. Hasil analisis menjelaskan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,762 lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa nilai K-S tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya tingkat metode variance pada data responden yang terkumpulkan, selanjutnya ditemukan nilai variance sebesar 48,063 atau kurang dari 50%, yang menunjukkan tidak adanya common method variance yang terjadi dalam penelitian ini, sehingga dapat dijelaskan bahwa data yang diperoleh sudah sesuai dengan variance responden.

Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan data yang diperoleh dari responden, sehingga tidak bias dan dapat dipakai untuk mengukur atau mengambil data. Uji validitas dengan menggunakan korelasi bivariat dengan ketentuan item pengukuran dikatakan valid jika memberikan nilai $r > 0,3$ (Portney, 2020). Sedangkan Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauhmana konsistensi pengukuran yang sepanjang waktu di berbagai item dan instrument. Hasil reliabilitas yang tinggi memberikan keyakinan bahwa indikator individu semua konsisten dengan pengukurannya. Uji reliabilitas ditentukan dari nilai memiliki nilai cronbach alpha $> 0,06$, maka dapat dikatakan bahwa variabel penelitian adalah reliabel. Berikut adalah hasilnya yang telah dilakukan oleh peneliti:

Tabel 3. Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Item	Correlation		Coefficient	
		r	Status	Alpha	Status
<i>Innovation Capability</i> (X1)	X1.1	0.627	valid	0.881	reliabel
	X1.2	0.751	valid	0.861	reliabel
	X1.3	0.804	valid	0.854	reliabel
	X1.4	0.739	valid	0.863	reliabel
<i>Learning Capacity</i> (X2)	X2.1	0.659	valid	0.850	reliabel
	X2.2	0.668	valid	0.851	reliabel
	X2.3	0.624	valid	0.846	reliabel
	X2.4	0.646	valid	0.842	reliabel
	X2.5	0.664	valid	0.850	reliabel
	X2.6	0.601	valid	0.850	reliabel
	X2.7	0.604	valid	0.849	reliabel
	X2.8	0.601	valid	0.850	reliabel
<i>Individual Performance</i> (Y)	Y1	0.749	valid	0.894	reliabel
	Y2	0.751	valid	0.894	reliabel
	Y3	0.787	valid	0.890	reliabel
	Y4	0.697	valid	0.900	reliabel
	Y5	0.746	valid	0.895	reliabel
	Y6	0.695	valid	0.900	reliabel
	Y7	0.677	valid	0.902	reliabel
	Y8	0.627	valid	0.881	reliabel
	Y9	0.751	valid	0.861	reliabel
	Y10	0.804	valid	0.854	reliabel
<i>Well Being</i> (M)	M1	0.739	valid	0.863	reliabel
	M2	0.659	valid	0.850	reliabel
	M3	0.668	valid	0.851	reliabel
	M4	0.624	valid	0.846	reliabel
	M5	0.646	valid	0.842	reliabel
	M6	0.664	valid	0.850	reliabel
	M7	0.601	valid	0.850	reliabel
	M8	0.604	valid	0.849	reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2024

Uji Hipotesis

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan pengaruh variabel independen secara bersama-sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai *adjusted R-Squared*. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai *R-square* (R^2) pada tabel *Model Summary*.

Tabel 4. Model Summary and Coefficient

	Model	R	R²	MSE	F	P	Outcome
<i>Model Summary</i>	<i>Model 1</i>	0.4365	0.1905	0.0874	29.7355	0.0000	IP
	<i>Model 2</i>	0.5045	0.2545	0.1386	64.8670	0.0000	WB
	Model	Coeff	t	P	LLCI	ULCI	Outcome
<i>Coefficient</i>	<i>Constant</i>	5.4001	0.9916	0.0000	3.4503	7.3498	IP
	<i>IC</i>	-0.5488	-2.2962	0.0222	-1.0187	-0.0789	IP
	<i>WB</i>	-0.7036	-2.4133	0.0163	-1.2769	-0.1303	IP
	<i>Int_1</i>	0.2177	3.0973	0.0021	0.0795	0.3559	IP
	<i>Constant</i>	1.6405	6.7212	0.0000	1.1606	2.1204	WB
	<i>IC</i>	0.2723	6.6572	0.0000	0.1919	0.3528	WB
	<i>LC</i>	0.4272	7.0604	0.0000	0.3082	0.5462	WB

Sumber: Data primer diolah, 2024

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai *R-square* pada model 1 sebesar 0.1905 atau 19.05% yang menunjukkan bahwa variabel *IC* dan *WB* mempengaruhi variabel *IP* sebesar 19.05%; dan pada model 2 nilai *R-square* sebesar 0.2545 atau 25.45% yang artinya variabel *IC* dan *LC* mempengaruhi *WB* sebesar 25.45%.

Tabel 5. Uji Hipotesis

Model	Variabel	Estimate	P-Value	Decision
1	<i>IC > LC</i>	-0.5488	0.0222	Signifikan
2	<i>LC > IP</i>	0.4272	0.0000	Signifikan
3	<i>IC > IP</i>	0.2723	0.0000	Signifikan
4	<i>IC > IP > LC</i>	0,2344	0.0000	Signifikan

Sumber: Data primer diolah, 2024

Selanjutnya berdasarkan Tabel 5. Diatas dapat dijelaskan bahwa hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa:

1. *Innovation Capability* berpengaruh negative signifikan terhadap *Learning Capacity* dengan nilai estimate -0.5488 dan nilai *P-Value* <0,05 yaitu 0.0222;
2. *Learning Capacity* berpengaruh positif signifikan terhadap *Individual Performance* dengan nilai estimate 0.4272 dan nilai *P-Value* <0,05 yaitu 0.0000;
3. *Innovation Capability* berpengaruh positif signifikan terhadap *Individual Performance* dengan nilai estimate 0.2723 dan nilai *P-Value* <0,05 yaitu 0.0000;
4. *Innovation Capability* berpengaruh terhadap *Learning Capacity* melalui *Individual Performance* dengan nilai estimate 0,2344 dan nilai *P-Value* <0,05 yaitu 0.0000;

Tabel 6. Direct dan Indirect

Effect	SE	T	P	PLLCI	ULCI	Md	Effect	B-SE	LLCI	ULCI	Index
Direct	0.2723	0.0409	6.6572	0.0000	0.1919	0.3528					
Indirect						LC	2.9055	0.0357	0.0248	-0.0127	0.0861
						LC	3.4225	0.0838	0.0167	0.0521	0.1171
						LC	3.9395	0.1319	0.0249	0.0810	0.1790
Moderation-mediation index								0.0357	0.0222	0.1616	0.0930

Sumber: Data primer diolah, 2024

Untuk menentukan pengaruh tidak langsung atau bagaimana moderator mempengaruhi pengaruh tidak langsung antara variabel IC terhadap IP, maka perlu dilihat pengaruh direct dan indirect. Berdasarkan tabel 5 dapat ditunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengaruh tidak langsung pada WB. Selanjutnya pengaruh tidak langsung dengan adanya moderator (Pada Tingkat Rata-rata) adalah 0.0838, dan berdasarkan bootstrap, berada dalam interval kepercayaan pada $p < .05$. Pada efek tidak langsung terjadi interaksi pada satu standar deviasi di bawah dan di atas rata-rata. Hasilnya menunjukkan bahwa ketika moderatornya rendah, efek tidak langsungnya adalah 0.0357, yang signifikan. Sebaliknya, ketika moderatornya tinggi, efek tidak langsungnya adalah 0.1319, yang juga masih signifikan. Namun pengaruhnya berkurang. Selain itu hasil pengujian yang juga perlu di nilai adalah apakah konstruk WB secara signifikan memoderasi efek tidak langsung. Hal ini dapat dinilai dengan indeks nilai mediasi yang dimoderasi. Tabel 5 menunjukkan apakah kemiringannya secara signifikan berbeda dari nol, yang mengindikasikan bahwa mediasi yang dimoderasi sedang terjadi. Kita juga dapat melihat bahwa indeks mediasi yang dimoderasi signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung dimoderasi oleh WB.

Pembahasan

Pengaruh *Innovation Capability* terhadap *Learning Capacity*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara innovation capability (kapabilitas inovasi) dan learning capacity (kapasitas belajar). Pengaruh negatif signifikan tersebut mengindikasikan bahwa adanya peningkatan dalam innovation capability dapat mengakibatkan penurunan dalam learning capacity, yang dapat diartikan bahwa responden UMKM Bubur Bayi *Freez Food* Sedati belum dapat menerapkan kapabilitas inovasi dalam meningkatkan kinerja bisnis. Ika Puspa Satriany dan Robin Loh dalam penelitiannya menunjukkan bahwa hubungan kapabilitas inovasi dan kapasitas belajar adalah penting dalam membangun dan mengembangkan kinerja perusahaan. Kapabilitas inovasi merupakan kumpulan karakteristik yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai pelanggan dengan mengembangkan dan mengenalkan produk-produk dan jasa-jasa baru atau mengurangi biaya-biaya yang menjadi beban proses penciptaan nilai. Kapasitas belajar, kemampuan aktif mengevaluasi ketrampilan yang dimiliki sesuai permintaan, dan melakukan pengembangan SDM, mengevaluasi kegagalan, dan mendukung diskusi untuk menghasilkan keluaran produk terbaik. Selain itu Siti Fauziah (2022) menjelaskan bahwa kapasitas belajar, sebagai faktor yang mendukung kemampuan inovasi, memiliki peranan penting dalam membangun kemampuan inovasi yang lebih tinggi, yang kemudian dapat meningkatkan performa bisnis. Selain itu, kemampuan berinovasi dapat membuat perusahaan bertahan dan berkembang kearah yang lebih baik. Tujuan inovasi tidak hanya untuk menekan biaya, tetapi inovasi juga dapat mengembangkan aktivitas bisnis atau memenuhi kebutuhan pelanggan.

Sukoco et al., (2022) menjelaskan bahwa *learning capacity* merupakan kapasitas untuk melakukan perubahan yang mengacu pada kemampuan organisasi untuk terus meningkatkan dan memperbarui organisasi berdasarkan perbaikan melalui pengalaman yang meliputi kapasitas mawas diri organisasi (Supriharyanti & Sukoco, 2023). Sebagai para UMKM di abad ini dianggap sebagai generasi yang inovatif dan kreatif, sehingga *learning capacity* merupakan hal yang penting pada bidang pekerjaan mereka. Jika tidak terpenuhinya kapabilitas inovasi terkait pengetahuan yang baru bagi para UMKM akan berdampak pada menurunnya kinerja dalam bekerja.

Pada umumnya, pengaruh kapabilitas inovasi terhadap kinerja perusahaan tergantung pada sistem inovasinya, yang melekat pada resource perusahaan, sistem manajemen, struktur organisasi dan kegiatan rutin perusahaan. Kapasitas belajar, sebagai

faktor yang mendukung kemampuan inovasi, memiliki peranan penting dalam membangun kemampuan inovasi yang lebih tinggi, yang kemudian dapat meningkatkan performa bisnis. Dalam hal ini, perusahaan mengarahkan strategi inovasinya berfokus pada hasil-hasil yang berkelanjutan, yang kapabilitas dinamik menjadi pusat pengembangan kapabilitas perusahaan, yang menghasilkan tingkat kontinuitas penciptaan produk-produk atau jasa baru yang lebih tinggi.

Pengaruh *Learning Capacity* terhadap *Individual Performance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *learning capacity* berpengaruh positif signifikan terhadap *individual performance*. Pengaruh positif menunjukkan bahwa persepsi tentang *learning capacity* mengarah pada perilaku dan tindakan yang positif (Jakopec & Sušanj, 2014). Dengan kata lain, semakin tinggi kapasitas belajar seseorang, semakin tinggi pula kinerja individunya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gusli Chidir dkk. (2022) yang juga menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara persepsi tentang *learning capacity* dengan perilaku dan tindakan yang positif.

Pentingnya *learning capacity* dalam konteks ini tidak dapat diabaikan. *Learning capacity* mencerminkan kemampuan individu untuk memperoleh, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan serta keterampilan baru. Ketika seseorang memiliki tingkat *learning capacity* yang tinggi, mereka cenderung lebih mampu menyerap dan mengintegrasikan informasi baru ke dalam kerja mereka sehari-hari. Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan kinerja individu, baik dalam konteks akademik maupun profesional.

Learning capacity merupakan bentuk kemampuan sumber daya yang didasarkan pada pengetahuan dan beradaptasi dengan lingkungan yang sangat kompetitif (Carrillo & Gaimon, 2004). *Learning capacity* mengacu pada proses memperoleh, menggabungkan dan mengembangkan informasi di antara para anggota organisasi (Lu et al., 2012; Momeni et al., 2014). Dari sudut pandang ini, proses pembelajaran organisasi terdiri dari elemen-elemen kunci yang mendukung kegiatan-kegiatan yang menghasilkan informasi, yang melibatkan pencarian, mengembangkan, memahami dan menghasilkan informasi baru tentang produk, layanan, metode dan dan teknik baru (Gozukara & Yildirim, 2016).

Pengaruh positif antara *learning capacity* dan *individual performance* tidak hanya memiliki implikasi praktis dalam konteks manajemen sumber daya manusia, tetapi juga memberikan landasan bagi pengembangan strategi dan program pembelajaran yang lebih efektif di berbagai tingkatan organisasi. Dengan memahami pentingnya *learning capacity* dalam meningkatkan kinerja individu, organisasi dapat mengarahkan upaya mereka untuk memperkuat kapasitas belajar karyawan melalui berbagai inisiatif, seperti pelatihan dan pengembangan, pembelajaran berkelanjutan, dan pengakuan terhadap pencapaian pembelajaran. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman kita tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja individu di tempat kerja.

Pengaruh *Innovation Capability* terhadap *Individual Performance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *innovation capability* berpengaruh positif signifikan terhadap *individual performance*, yang dapat diartikan bahwa *individual performance* yang tercipta dari para UMKIM tergantung dari *learning capacity* yang oleh individu. Secara khusus, temuan menunjukkan bahwa kemampuan untuk berinovasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja individu. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemampuan untuk berinovasi seseorang, semakin tinggi juga kinerja individunya. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Heru

Sulistyo (2018) yang menyatakan bahwa kemampuan untuk berinovasi dalam meningkatkan kinerja individu menyoroti pentingnya kapasitas belajar (learning capacity) dalam konteks ini. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja individu yang dihasilkan dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKIM) sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Dengan kata lain, individu yang mampu mengembangkan kemampuan inovatifnya akan lebih cenderung mencapai kinerja yang lebih baik karena mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan menciptakan solusi yang kreatif untuk tantangan yang dihadapi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Soekiman Susanto (2023) memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya pembangunan kapasitas inovatif dalam konteks peningkatan kinerja individu, khususnya dalam konteks UMKIM. Implikasi praktis dari temuan ini dapat mencakup pentingnya pengembangan program pelatihan dan pendidikan yang memperkuat kemampuan inovatif individu, serta strategi organisasional yang mendukung budaya inovasi untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Pengaruh kapabilitas inovasi individu terhadap kinerja individu adalah penting dalam membangun dan mengembangkan kinerja perusahaan. Kapabilitas inovasi individu merupakan kumpulan karakteristik yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai pelanggan dengan mengembangkan dan mengenalkan produk-produk dan jasa-jasa baru atau mengurangi biaya-biaya yang menjadi beban proses penciptaan nilai. Kapasitas belajar, kemampuan aktif mengevaluasi ketrampilan yang dimiliki individu sesuai permintaan, dan melakukan pengembangan SDM, mengevaluasi kegagalan, dan mendukung diskusi untuk menghasilkan keluaran produk terbaik.

Pengaruh kapabilitas inovasi individu terhadap kinerja individu adalah vital dalam meningkatkan daya saing individu. Kapasitas belajar, sebagai faktor yang mendukung kemampuan inovasi, memiliki peranan penting dalam membangun kemampuan inovasi yang lebih tinggi, yang kemudian dapat meningkatkan performa individu. Selain itu, kemampuan berinovasi dapat membuat individu bertahan dan berkembang ke arah yang lebih baik. Tujuan inovasi tidak hanya untuk menekan biaya, tetapi inovasi juga dapat mengembangkan aktivitas bisnis atau memenuhi kebutuhan pelanggan.

Pada umumnya, pengaruh kapabilitas inovasi individu terhadap kinerja individu tergantung pada sistem inovasinya, yang melekat pada resource individu, sistem manajemen, struktur organisasi dan kegiatan rutin individu. Kapasitas belajar, sebagai faktor yang mendukung kemampuan inovasi, memiliki peranan penting dalam membangun kemampuan inovasi yang lebih tinggi, yang kemudian dapat meningkatkan performa individu. Dalam hal ini, individu mengarahkan strategi inovasinya berfokus pada hasil-hasil yang berkelanjutan, yang kapabilitas dinamik menjadi pusat pengembangan kapabilitas individu, yang menghasilkan tingkat kontinuitas penciptaan produk-produk atau jasa baru yang lebih tinggi.

Pengaruh Innovation Learning terhadap Learning Capacity melalui Individual Performance

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan inovasi (innovation capability) berpengaruh terhadap kinerja individu (individual performance) melalui kapasitas belajar (learning capacity). Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja individu yang dihasilkan oleh paraUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didapatkan dari proses belajar yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanbsten (2019) yang menyatakan bahwa kemampuan inovasi merujuk pada kemampuan UMKM untuk menghasilkan ide-ide baru,

memperkenalkan produk atau layanan baru, atau meningkatkan proses bisnis mereka secara kreatif. Kemampuan inovasi yang tinggi memungkinkan UMKM untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, meningkatkan daya saing, dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan mereka.

Pengaruh kapasitas belajar (*Learning Capacity*) melalui kinerja individual (*Individual Performance*) terhadap kapabilitas inovasi (*Innovation Capability*) adalah kompleks dan tergantung pada berbagai faktor. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kapasitas belajar memiliki pengaruh positif terhadap kinerja individual, yang kemudian dapat mengakibatkan peningkatan kapabilitas inovasi. Selain itu, pengaruh motivasi kerja dan manajemen ilmu terhadap kinerja individual juga ditemukan dalam penelitian, yang menunjukkan bahwa motivasi kerja dan manajemen ilmu memiliki pengaruh positif terhadap kapabilitas inovasi, yang kemudian dapat mengakibatkan peningkatan kinerja individual.

Terutama dalam konteks perusahaan, pengaruh kapasitas belajar terhadap kinerja individual dan kapabilitas inovasi sangat penting. Perusahaan yang berhasil membangun kapasitas belajar dan mempromosikan kemampuan inovasi di antara karyawannya dapat mengakibatkan peningkatan kinerja individual, yang kemudian dapat membantu perusahaan meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan bisnisnya. Selain itu, pengaruh kapasitas belajar juga dapat mengakibatkan peningkatan kemampuan kreatif dan inovatif di antara individu, yang kemudian dapat membantu menciptakan ide dan solusi baru yang dapat diimplementasikan dalam lingkungan kerja.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan temuan yang signifikan terkait hubungan antara kemampuan inovasi, kemampuan belajar, dan kinerja individu pada UMKM Bubur Bayi *Freez Food* Sedati. Berikut adalah simpulan utama dari temuan penelitian:

1. Pengaruh *Innovation Capability* terhadap *Learning Capacity*: Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara kemampuan inovasi (*innovation capability*) dan kapasitas belajar (*learning capacity*). Ini menunjukkan bahwa meningkatnya kemampuan inovasi dapat mengakibatkan penurunan dalam kapasitas belajar, yang menunjukkan bahwa UMKM Bubur Bayi *Freez Food* Sedati belum sepenuhnya menerapkan kemampuan inovatif dalam meningkatkan kinerja bisnis.
2. Pengaruh *Learning Capacity* terhadap *Individual Performance*: Temuan menunjukkan bahwa kapasitas belajar berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja individu. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kapasitas belajar seseorang, semakin tinggi pula kinerja individunya. Hal ini mencerminkan pentingnya kapasitas belajar dalam meningkatkan kinerja individu di tempat kerja.
3. Pengaruh *Innovation Capability* terhadap *Individual Performance*: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan inovasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja individu. Ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki kemampuan inovasi yang tinggi cenderung mencapai kinerja yang lebih baik. Hal ini menekankan pentingnya kemampuan inovasi dalam meningkatkan kinerja individu di UMKM.
4. Pengaruh *Innovation Learning* terhadap *Learning Capacity* melalui *Individual Performance*: Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan inovasi berpengaruh terhadap kinerja individu melalui kapasitas belajar. Dengan kata lain, kinerja individu yang dihasilkan dari UMKM tersebut bergantung pada proses

pembelajaran yang terjadi di dalam organisasi. Ini menyoroti pentingnya pembangunan kapasitas inovatif dan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja individu di UMKM.

5. Secara keseluruhan, temuan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja individu di tempat kerja, khususnya dalam konteks UMKM. Implikasi praktis dari temuan ini mencakup pentingnya pengembangan strategi dan program pembelajaran yang memperkuat kemampuan inovatif dan belajar di antara karyawan UMKM untuk meningkatkan kinerja dan daya saing bisnis mereka.

5. REFERENSI

- Afriyie, S., Du, J., & Ibn Musah, A.-A. (2019). Innovation and marketing performance of SME in an emerging economy: the moderating effect of transformational leadership. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1), 40.
- AlTaweel, I. R., & Al-Hawary, S. I. (2021). The mediating role of innovation capability on the relationship between strategic agility and organizational performance. *Sustainability*, 13(14), 7564.
- Berliana, V., & Arsanti, T. A. (2018). Analisis pengaruh self-efficacy, kapabilitas, dan perilaku kerja inovatif terhadap kinerja. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 7(2), 149–161.
- Borah, P. S., Iqbal, S., & Akhtar, S. (2022). Linking social media usage and SME's sustainable performance: The role of digital leadership and innovation capabilities. *Technology in Society*, 68, 101900.
- Broadstock, D. C., Matousek, R., Meyer, M., & Tzeremes, N. G. (2020). Does corporate social responsibility impact firms' innovation capacity? The indirect link between environmental & social governance implementation and innovation performance. *Journal of Business Research*, 119, 99–110.
- Darvishmotevali, M., & Ali, F. (2020). Job insecurity, subjective well-being and job performance: The moderating role of psychological capital. *International Journal of Hospitality Management*, 87, 102462.
- Desiana, N. E. (2019). Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Inovasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Divisi Sekretariat Dan Humas Pdam Surya Sembada Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(2), 382–392.
- Ferreira, J., Coelho, A., & Moutinho, L. (2020). Dynamic capabilities, creativity and innovation capability and their impact on competitive advantage and firm performance: The moderating role of entrepreneurial orientation. *Technovation*, 92, 102061.
- Febrianti, M. K. A. C., Tamrin, M. H., Musleh, M., & Abubakar, A. H. (2023). Innovative Governance in Practice: An Institutional, Actor and Society Approach. *Jurnal Public Policy*, 9(4), 248. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i4.7369>
- Ganguly, A., Talukdar, A., & Chatterjee, D. (2019). Evaluating the role of social capital, tacit knowledge sharing, knowledge quality and reciprocity in determining innovation capability of an organization. *Journal of Knowledge Management*, 23(6), 1105–1135.
- Hamzali, S. (2022). Pengaruh pembelajaran organisasi dan inovasi organisasi terhadap kinerja organisasi. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 241–249.

- Hermawan, A. (2019). *Penelitian Bisnis - Paragidma Kuantitatif*. Grasindo.
<https://books.google.co.id/books?id=XOytduwzBzAC>
- Indrawati, F. A., & Wardono, W. (2019). Pengaruh self efficacy terhadap kemampuan literasi matematika dan pembentukan kemampuan 4C. *PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika*, 2, 247–267.
- Khildani, A. C., & Lestariningsih, M. (2021). Pengaruh Efikasi Diri dan Lokus Kendali terhadap Kinerja Karyawan Melalui Learning Agility. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2), 208–228.
- Kuncoro, J., Handayani, A., & Suprihatin, T. (2022). Peningkatan soft skill melalui kegiatan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). *Proyeksi*, 17(1), 112–126.
- Le, P. B., & Lei, H. (2019). Determinants of innovation capability: the roles of transformational leadership, knowledge sharing and perceived organizational support. *Journal of Knowledge Management*, 23(3), 527–547.
- Lei, H., Leaungkhamma, L., & Le, P. B. (2020). How transformational leadership facilitates innovation capability: the mediating role of employees' psychological capital. *Leadership & Organization Development Journal*, 41(4), 481–499.
- Li, C., Ashraf, S. F., Shahzad, F., Bashir, I., Murad, M., Syed, N., & Riaz, M. (2020). Influence of knowledge management practices on entrepreneurial and organizational performance: a mediated-moderation model. *Frontiers in Psychology*, 11, 577106.
- Li, G., Wang, X., Su, S., & Su, Y. (2019). How green technological innovation ability influences enterprise competitiveness. *Technology in Society*, 59, 101136.
- Miao, R., & Cao, Y. (2019). High-performance work system, work well-being, and employee creativity: Cross-level moderating role of transformational leadership. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(9), 1640.
- Mikalef, P., Boura, M., Lekakos, G., & Krogstie, J. (2019). Big data analytics capabilities and innovation: the mediating role of dynamic capabilities and moderating effect of the environment. *British Journal of Management*, 30(2), 272–298.
- Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental : Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism , Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1), 75–90. <https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218>
- Musleh, M., Subianto, A., & Prasita, V. D. (2023). Stakeholder Interaction in the Development of Oxygen Ecotourism on Gili Iyang Island, Indonesia. *Journal of Government Civil Society*, 7(2), 297–323. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i2.8251>
- Najafi-Tavani, S., Najafi-Tavani, Z., Naudé, P., Oghazi, P., & Zeynaloo, E. (2018). How collaborative innovation networks affect new product performance: Product innovation capability, process innovation capability, and absorptive capacity. *Industrial Marketing Management*, 73, 193–205.
- Nurcahyo, S. A., & Wikaningrum, T. (2020). Peran knowledge sharing, learning organization dan kapabilitas inovasi individual terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(2), 84–96.
- Purwanto, A. (2020). Effect of hard skills, soft skills, organizational learning and innovation capability on Islamic University lecturers' performance. *Systematic Reviews in Pharmacy*.

- Rajapathirana, R. P. J., & Hui, Y. (2018). Relationship between innovation capability, innovation type, and firm performance. *Journal of Innovation & Knowledge*, 3(1), 44–55.
- Sawaeen, F., & Ali, K. (2020). The impact of entrepreneurial leadership and learning orientation on organizational performance of SMEs: The mediating role of innovation capacity. *Management Science Letters*, 10(2), 369–380.
- Shahriari, M., Abzari, M., Isfahani, A. N., & Kianpour, M. (2018). The effect of high performance work systems on radical innovation in knowledge-based companies through moderating role of innovation capabilities. *International Journal of Business Excellence*, 16(3), 269–285.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Deepublisher.
- Suharyat, Y. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan*. wawasan Ilmu. <https://books.google.co.id/books?id=QWu1EAAAQBAJ>
- Sunarto, A. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Berbasis Inovasi Untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 397–407.
- Wang, C., & Hu, Q. (2020). Knowledge sharing in supply chain networks: Effects of collaborative innovation activities and capability on innovation performance. *Technovation*, 94, 102010.
- Wuryaningrat, N. F. (2020). *Kemampuan Inovasi Industri Kreatif Di Indonesia*.
- Yang, Z., Nguyen, V. T., & Le, P. B. (2018). Knowledge sharing serves as a mediator between collaborative culture and innovation capability: an empirical research. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 33(7), 958–969.
- Zakiah, N. E., Fatimah, A. T., & Sunaryo, Y. (2020). Implementasi project-based learning untuk mengeksplorasi kreativitas dan kemampuan berpikir kreatif matematis mahasiswa. *Teorema: Teori Dan Riset Matematika*, 5(2), 285–293.

Menilik Dampak Kebijakan Peningkatan PPN 11% Pada Masyarakat Indonesia Sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Nabila Septia Rosa¹

¹Program Magister Kebijakan Publik, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 26, 2024

Revised May 05, 2024

Accepted May 08, 2024

Available online May 25, 2024

Keywords:

State Revenue; PPN 11%, UU No 7; Tax Harmonization; Society.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Hang Tuah

ABSTRACT

One of the important fiscal instruments for Indonesia's state revenue is taxes, which are used to achieve development targets. The decline in social activity due to the pandemic has impacted income tax receipts, potentially weakening the country's taxation sector and overall economic growth. Government regulations refer to unstable economic conditions so that new policies have been realized and passed in accordance with UU No.7 Tahun 2021 tentang kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 %. The purpose of this study is to determine the impact of the 11% PPN increase policy which took effect on April 1, 2022 for the people of Indonesia. This research uses a qualitative method of literature study, using secondary data sources obtained from books, supporting articles, scientific papers, previous studies and other literature. The increase in PPN rates has an impact on all levels of society, especially those in the lower middle class because PPN is applied objectively, regardless of the status or income of the tax object. But in reality, this policy has a positive effect on Indonesia's economic growth followed by an increase in public consumption, so that tax revenue is able to make a significant contribution to state revenue.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dan kaya akan sumber daya alam di setiap wilayahnya. Kekayaan alam di tanah air Indonesia menjadi suatu hal yang menarik dibanding dengan negara lain. Pemanfaatan sumber daya alam telah dikembangkan melalui sektor pariwisata, seperti pembangunan taman bermain yang juga berfungsi sebagai pusat edukasi, tempat olahraga, dan sektor-sektor lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa potensi kekayaan alam di Indonesia terus berkembang dan meningkat setiap tahunnya. Pada era ini, masyarakat Indonesia sedang berjuang guna memulihkan kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dalam menghadapi Covid-19, Pemerintah Indonesia tentunya telah melakukan pendekatan yang *agile* dari berbagai faktor untuk mengantisipasi dampak perekonomian. Penurunan aktivitas sosial akibat pandemi telah berdampak pada penurunan penerimaan pajak penghasilan, yang berpotensi melemahkan sektor perpajakan negara dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia saat ini sedang berjuang keras untuk memulihkan kondisi ekonomi negara dari dampak pandemi ini. Sudah ditemukan beberapa fenomena sosial tentang kemacetan pasar modal maupun tradisional, industri dan usaha lainnya merupakan hambatan besar bagi sistem pajak negara (Musleh, Subianto, & Prasita, 2023; Djufri, 2022).

Salah satu instrumen fiskal yang penting bagi pendapatan negara Indonesia adalah pajak, yang digunakan untuk mencapai target pembangunan. Pajak bukan hanya sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah, tetapi juga sebagai salah satu variabel kebijakan untuk mengatur perekonomian, menyediakan public goods, dan memperbaiki kondisi

*Corresponding author.

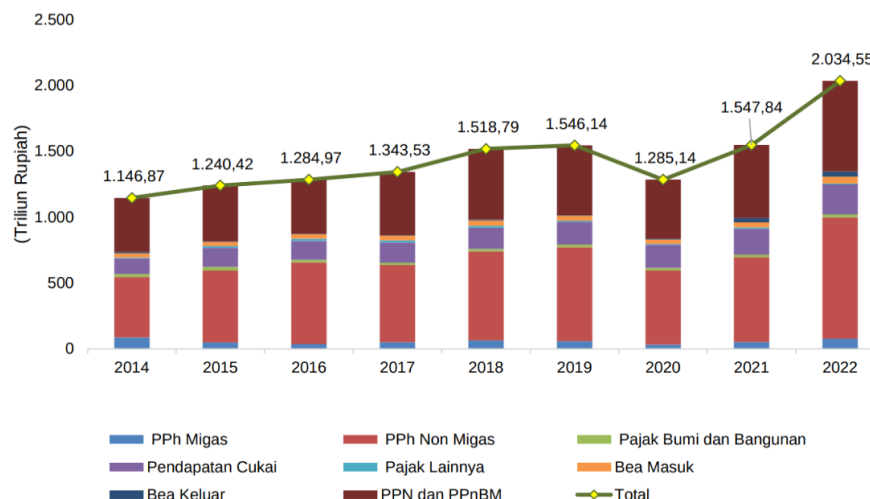
E-mail: nabila.septia.rosa-2022@fisip.unair.ac.id

sosial masyarakat melalui redistribusi pendapatan. Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 84.8% (Direktorat Penyusunan APBN, 2017).

Beberapa isu terkait kebijakan fiskal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan redistribusi pendapatan di Indonesia telah menjadi fokus dalam beberapa studi. (Gemmell, 1988) menganalisis dampak penerapan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan model tradisional Keynesian di beberapa negara berkembang. Studi ini menyimpulkan bahwa hubungan antara pajak, tabungan, dan pertumbuhan ekonomi sangat kompleks, dan pengaruh signifikan dari pengenaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi sulit dijelaskan dalam asumsi ekonomi neoklasik. Sementara itu, (Engen & Skinner, 1996) melakukan analisis dampak perpajakan di Amerika Serikat terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka menggunakan pendekatan teoritis berdasarkan model pertumbuhan Solow dan pendekatan empiris berdasarkan data ekonomi historis Amerika Serikat. Hasil studi menunjukkan bahwa pengenaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Musleh, Subianto, Tamrin, et al., 2023; Yesayabela et al., 2023).

Studi lain yang mengeksplorasi hubungan antara pajak dan pertumbuhan ekonomi, seperti yang dilakukan oleh (Mendoza et al., 1994),(Stokey & Rebelo, 1995), (AUERBACH, 1996), (Lee & Gordon, 2005) dan (Amir et al., 2013) menghasilkan temuan yang beragam. Beberapa dari studi tersebut menemukan korelasi negatif antara pajak dan pertumbuhan ekonomi, sementara hasil studi lain menunjukkan sebaliknya. Selain itu, beberapa studi mengenai dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kondisi sosial, khususnya kemiskinan, dilakukan oleh (Dollar & Kraay, 2002),(Kraay, 2006)(Ravallion & Chen, 1997),(Son & Kakwani, 2008), dan (Timmer, 2007). Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan di negara-negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi, atau pertumbuhan tersebut lebih banyak dinikmati oleh kelompok non-miskin. Beberapa analisis lain yang menghubungkan kebijakan perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, atau distribusi pendapatan, dilakukan oleh (Eicher et al., 2003). Studi mereka menunjukkan adanya hubungan yang kompleks di antara ketiga variabel tersebut. Dengan demikian, dampak lebih luas dari kebijakan perpajakan Pemerintah tidak hanya dilihat dari segi pengeluaran pemerintah secara teoritis, tetapi juga perlu memperkuat kebijakan bantuan kepada masyarakat guna mencapai sistem perpajakan yang lebih efisien.

Salah satu instrumen pajak yang umum ditemui adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada komoditas barang yang diproduksi di Indonesia. PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu komoditas dan dipungut pada setiap tahapan produksinya. Tarif PPN bersifat seragam untuk berbagai kelompok komoditi, sehingga pembagian beban pajak menjadi lebih merata karena setiap produk dari berbagai industri dikenakan tarif pajak yang sama. Sebagai salah satu pajak pusat, PPN tidak dikenakan pada semua barang atau jasa, tetapi hanya pada barang atau jasa tertentu yang termasuk dalam kategori barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi kontributor terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh) (Febrianti et al., 2023).



Gambar 1. Struktur Perpajakan Indonesia

Sumber : Diolah dari CEIC, 2024

Struktur perpajakan yang terbesar yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Gambar 1). PPh sendiri didominasi oleh PPh Nonmigas, yang terbagi menjadi PPh Badan dan PPh Orang Pribadi (OP). Di Indonesia, PPN diterapkan dengan tarif tunggal. Pada 1 April 2022, tarif PPN Indonesia resmi naik menjadi 11% dari sebelumnya 10%, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sebagai bagian dari reformasi perpajakan pemerintah. Kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap, dan dijadwalkan akan naik lagi menjadi 12% pada tahun 2025. Meskipun terjadi kenaikan, tarif PPN Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pemerintah membandingkan bahwa tarif PPN di Indonesia masih di bawah rata-rata PPN di negara OECD dan negara lainnya, yang mencapai 15%. Oleh karena itu, masih ada ruang bagi Indonesia untuk menaikkan tarif PPN guna meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan ekonomi. Bila dibanding negara-negara ASEAN, tarif PPN Indonesia saat ini tertinggi setelah Filipina (12%), Singapura dan Thailand sebesar 7%, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Malaysia sebesar 10%, Myanmar 5%, serta Brunei tidak ada PPN (PWC, 2021).

Kenaikan tarif PPN ini diharapkan dapat memperbaiki kesehatan fiskal nasional sambil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, namun, diperhatikan bahwa penerapan kebijakan tersebut terjadi pada saat masyarakat sedang menghadapi dampak pandemi, seperti pengurangan jumlah karyawan (PHK), sehingga kebijakan ini sebenarnya memberatkan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif atau justru merugikan masyarakat. Berdasarkan paparan diatas, penulis akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Dampak Kebijakan Peningkatan PPN 11% Pada Masyarakat Indonesia Sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia”.

2. METODE

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan artikel ini ialah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*literature review*). Literature review merupakan

metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini (Adlini et al., 2022). Sumber yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder. Data-data yang diperoleh melalui pendekatan studi kepustakaan, sehingga data-data tersebut dihimpun dari berbagai informasi yang relevan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini. Data-data tersebut diperoleh melalui buku-buku literature, karya tulis ilmiah, tugas akhir, penelitian-penelitian terdahulu, dan sumber-sumber kepustakaan yang lainnya. Teknik analisis data dengan cara menggambarkan dan menganalisis keadaan, situasi sosial berdasarkan teori yang dipakai yakni teori kebijakan publik yang secara umum, kebijakan pajak itu sendiri merupakan strategi yang mempengaruhi output publik, efisiensi kerja, dan inflasi melalui penggunaan sistem pemungutan pajak dan pengeluaran pemerintah (Aprilian, 2023) dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dengan penerapan peraturan baru UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang didalamnya mengatur kebijakan kenaikan pajak 11%.

Penelitian yang dilakukan yaitu bersifat deksriptif, dengan memberikan deskripsi serta analisis mengenai dampak kebijakan pemerintah dalam menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pendataan dalam penelitian kali ini menggunakan data sekunder, yaitu merupakan data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Data sekunder ini didapatkan setelah dilakukannya penelusuran serta dokumentasi terhadap sumber bacaan yang berkaitan dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia serta komponen pelengkap lainnya. Sumber data yang diambil dalam penyusunan artikel ini adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data yang bersifat pribadi dan publik (Fadli, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kebijakan fiskal Indonesia tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana pemerintah menetapkan alokasi dan distribusi keuangan negara, mengingat urgensi bidang ini dalam pembangunan ekonomi negara. Kebijakan fiskal juga memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat inflasi. Krisis ekonomi global yang dipicu oleh pandemi Covid-19 mendorong semua negara untuk mencari langkah-langkah antisipatif terbaik. Salah satunya adalah dengan menerapkan berbagai skema stimulus ekonomi yang berbeda-beda di setiap negara. Meskipun berbagai skema stimulus ekonomi telah diterapkan hampir di seluruh dunia, namun demikian, skema tersebut dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.

Pada tanggal 7 Oktober tahun 2021, DPR RI menyetujui RUU Harmonisasi Perpajakan. Kemudian, pada tanggal 21 Oktober 2021 Presiden Joko Widodo mengesahkan RUU tersebut menjadi UU no 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-Undang tersebut terdiri dari sembilan bab yang mencakup enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, dan Cukai. Dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih dalam mengenai isi UU HPP tersebut, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pajak. Perubahan regulasi pajak dalam UU HPP mencakup beberapa ketentuan pajak terbaru yang menjadi bagian dari perubahan beberapa UU Pajak terbaru. Berikut adalah beberapa poin penting dalam UU HPP yang wajib diketahui dan dipahami oleh wajib pajak Orang Pribadi Pengusaha maupun Wajib

Pajak Badan (Kurnianingsih, 2021) Kesadaran pajak bagi wajib pajak pribadi memiliki pengaruh yang besar terhadap nilai sosial dan fungsi penting pembayaran pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman bahwa perubahan yang terjadi bertujuan untuk kepentingan bersama. Negara memiliki tujuan utama pemulihan ekonomi secara menyeluruh, sehingga penyesuaian anggaran pajak dan peningkatan pajak diperlukan untuk kepentingan seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria wajib pajak.

Pemerintah meningkatkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2022 dengan tujuan untuk meningkatkan realisasi target penerimaan pajak dan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi di tahun tersebut (Rahmah, 2022). Wakil Menteri Keuangan, Suhasil Nazara, menyatakan dalam Acara *International Tax Conference 2021* bahwa kenaikan tarif PPN ini tidak akan menghambat proses pemulihan ekonomi (Rahmah, 2022). Hal ini dikarenakan sejumlah jenis PPN yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, pendidikan, layanan kesehatan, dan sosial tetap akan dikecualikan dari kenaikan tarif, sehingga tidak akan terkena kenaikan pajak. Beliau juga menyebutkan bahwa peningkatan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pengumpulan pajak secara digital. Selain alasan-alasan yang mendukung kenaikan tarif PPN tersebut, pemerintah juga telah mempertimbangkan dampak positif dan negatif yang dapat timbul dari kebijakan tersebut. Kontribusi masyarakat sebagai wajib pajak akan membantu Indonesia untuk pulih dari keterpurukan ekonomi dunia. Kenaikan tarif PPN sebesar 11% pada tahun 2022 mendorong pemerintah untuk mencari solusi alternatif dari sektor lain demi memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi pada tahun-tahun mendatang. Hal ini tercermin dalam sektor pariwisata yang telah mengadopsi berbagai program sebagai upaya untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang muncul akibat pandemi Covid-19. Tempat wisata kini mulai diakses dengan lebih efektif oleh masyarakat.

Peran pemerintah dalam menetapkan peraturan UU No. 7/2021, yang dikenal sebagai UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan), yang merupakan bagian dari kluster UU Pajak Penghasilan (PPh) yang mulai berlaku pada tahun Pajak 2022, memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan. Menurut PP No. 23/2018, tidak semua wajib pajak dapat menggunakan pajak UMKM. PP tersebut menyatakan bahwa subjek pajak yang tidak termasuk antara lain adalah wajib pajak yang memilih untuk dikenai Ketentuan Umum PPh (wajib pajak menyampaikan SPT ke KPP dan pada tahun pajak berikutnya terus menggunakan tarif PPh Pasal 17). Selain itu, WP Badan yang memperoleh fasilitas berdasarkan Pasal 31A UU PPh atau PP 94 tahun 2010 (terkait dengan perusahaan yang go public) DAN (Bentuk Usaha Tetap) - CV atau Firma yang dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus dan menyediakan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. PP No. 23/2018 juga mengatur mengenai objek pajak. Ketentuan perizinan dan tahapan tersebut memberikan kebijakan utuh mengenai biaya persentase pajak yang harus dibayar.

Salah satu jenis pajak yang sedang menjadi topik hangat di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Rancangan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7, tarif PPN akan mengalami perubahan dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022, dan akan meningkat menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025 (Liyana, 2021). Kenaikan tarif PPN secara bertahap ini merupakan pertimbangan penting bagi pemerintah untuk menentukan kriteria dan kluster mana yang harus membayar pajak. Artinya, seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita, penerimaan PPN juga akan meningkat. Dengan demikian, diharapkan kenaikan tarif PPN ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara. PPN, atau Pajak

Pertambahan Nilai, umumnya didefinisikan sebagai Value Added Taxes atau Consumption Tax. Menurut Sukardji (2009), pajak konsumsi adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi. Pajak konsumsi dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan langsung dan tidak langsung, dan PPN termasuk dalam kategori pajak tidak langsung. PPN menjadi pilihan jenis pajak dari banyak negara karena berperan penting dalam peningkatan kas negara. Pajak memiliki beberapa karakteristik positif, di antaranya adalah sebagai berikut: pajak atas konsumsi, pajak tidak langsung, netral, dan non-kumulatif.

Berbagai tanggapan muncul di masyarakat sebab adanya kenaikan tarif PPN, masyarakat berpikiran kenaikan tarif PPN 11% ini diduga tidak cocok dengan suasana sekarang. Tetapi tidak seluruh harga barang serta jasa yang terkena tarif PPN. Bersumber pada Undang- Undang No 42 Tahun 2009 mengenai PPN (2019), adapun mengenai barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), meliputi berikut ini :

1. Berbagai macam barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - a) Barang-barang yang masuk dalam golongan kebutuhan pangan pokok. Barang-barang tersebut terdiri dari beras, kedelai, jagung, daging, telur, buah-buahan, sayur-sayuran, susu, sagu, garam, dan gula konsumsi;
 - b) Makanan maupun minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Adapun hal tersebut meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh pihak jasa catering yang mana merupakan objek dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai yang dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c) Uang, surat berharga, serta emas batangan yang digunakan untuk kepentingan cadangan devisa negara;
2. Berbagai macam jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - a) Jasa keagamaan;
 - b) Jasa kesenian dan hiburan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah yang mana meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan bagian dari objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c) Jasa perhotelan, berdasarkan dari peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah hal tersebut meliputi jasa penyewa kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan dari objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya mampu dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dengan berlandaskan peraturan perundangundangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain
 - e) Jasa penyediaan tempat parkir, berlandaskan dari peraturan perundangundangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f) Jasa boga untuk suatu acara atau catering, sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa jasa ini meliputi semua jenis kegiatan pelayanan

penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah;

Sedangkan barang pakai yang terkena imbas akibat kenaikan PPN 11% yakni sebagai berikut:

1. Pulsa serta kuota Internet. beberapa fasilitator layanan telekomunikasi sudah menyesuaikan harga produk mereka bersamaan berlakunya kenaikan PPN;
2. Aset Kripto. Metode investasi yang mempunyai banyak peminat ini mulai dikenai pajak PPN serta PPh atas transaksi perdagangan yang dituangkan dalam PMK Tahun 2022 No 68 dan berlaku per 1 Mei 2022;
3. Layanan perbankan;
4. Akomodasi perjalanan keagamaan tetapi perihal ini tidak berlaku buat aktivitas ibadahnya;
5. Distribusi LPG nonsubsidi buat gas elpiji skala 5, 5 Kilogram serta 12 Kilogram turut terkena dampak kenaikan PPN sesuai dengan ketentuan PMK No 62 Tahun 2022;
6. Layanan finansial digital. Tidak hanya kripto, layanan pinjaman online dikenai PPN serta PPh sesuai dengan PMK No 69 Tahun 2022;
7. Pembelian mobil bekas. Untuk pengusaha yang hendak beli alat transportasi bekas, harus memungut serta menyetorkan PPN terutang dengan besaran 1, 1 Persen dari harga jual;
8. Barang kebutuhan di supermarket modern;
9. Benda elektronik seperti smartphone, televisi, laptop, serta yang lain.

Kenaikan tarif PPN tentu saja menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat. Para pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa peningkatan tarif PPN dapat menjadi salah satu solusi alternatif bagi pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Di sisi lain, beberapa pihak yang menentang kebijakan tersebut berpendapat bahwa kenaikan tarif ini akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat karena naiknya harga barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, kenaikan tarif PPN ini juga berpotensi mengurangi pendapatan masyarakat akibat menurunnya produktivitas. Semua kebijakan yang telah disahkan oleh pemerintah tentu telah melalui proses yang panjang dan evaluasi yang cermat. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, kita seharusnya menghargai upaya pemerintah dalam memperbaiki ekonomi Indonesia pasca pandemi, sehingga ekonomi tetap stabil dan masyarakat dapat sejahtera.

Pembahasan

Kenaikan tarif PPN ini ternyata memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Peningkatan tarif PPN, yang diikuti oleh peningkatan konsumsi masyarakat, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif bagi Indonesia. Kenaikan tarif PPN sebesar 1% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 telah berdampak positif pada penerimaan negara dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan perpajakan, seperti yang terlihat dalam (gambar 2). Sebagai salah satu penyumbang terbesar, PPN dalam negeri mengalami pertumbuhan sebesar 32,5%. Peningkatan PPN dalam negeri ini secara langsung mencerminkan aktivitas ekonomi dalam negeri yang menghasilkan nilai tambah. Pertumbuhan baik dari sisi produksi maupun konsumsi mencerminkan peningkatan yang signifikan, selain dari kenaikan tarif sebesar 1% dari 10% menjadi 11%.



Gambar 2. Diagram Penerimaan Pajak

Sumber : Kemenkeu RI, 2024

Pada Januari 2024, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun atau 108,8 persen dari target APBN, atau 102,8 persen dari target yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2023. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2021. Terjadi peningkatan signifikan sebesar 8,9 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1.716,8 triliun. Peningkatan penerimaan pajak ini didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai hasil dari peningkatan aktivitas pengawasan, termasuk pengawasan setelah pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pemerintah juga secara konsisten meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta memberikan insentif pajak untuk mendukung perekonomian, seperti percepatan penyelesaian restitusi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian mobil listrik dan rumah. Dengan demikian, berbagai langkah ini telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Sehingga dalam hal ini, kontribusi PPN dipengaruhi oleh stabilitas dan kelangsungan transaksi domestik serta dipengaruhi oleh kenaikan tarif PPN sebagai implementasi UU HPP. Meskipun demikian, penting bagi kebijakan ini untuk dilaksanakan secara konsisten dan optimal, sambil pemerintah memitigasi risiko yang ada dengan menyiapkan skema kebijakan yang tepat. Untuk menjaga momentum pemulihan, pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dalam hal ini, pemerintah harus terus memantau perkembangan harga komoditas, terutama pangan dan energi. Selain itu, pemerintah harus tetap memprioritaskan program pemulihan ekonomi lainnya, termasuk program peningkatan ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut akan membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat proses pemulihan.

4. KESIMPULAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang yang dikonsumsi di dalam negeri (daerah pabean), sementara barang yang diekspor tidak dikenakan PPN atau dikenakan tarif 0% karena regulasi terpisah mengatur ekspor dan

impor. Kenaikan tarif PPN menjadi hal yang berisiko karena pemerintah tengah berusaha memperbaiki perekonomian pasca pandemi Covid-19. Kenaikan tarif PPN akan mengakibatkan kenaikan harga barang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Kenaikan tarif PPN berdampak pada semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berada di kelas menengah ke bawah karena PPN diterapkan secara objektif, tanpa memandang status atau penghasilan objek pajak.

PPN merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan pada semua penambahan nilai barang dan diterapkan beberapa kali selama proses distribusi di daerah pabean. Meskipun pajak ini dipungut dan disetorkan oleh pihak lain (pedagang), bukan oleh konsumen akhir, dampak kenaikan tarifnya akan dirasakan oleh konsumen akhir. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% berdasarkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama di kalangan pelaku usaha. Beberapa pihak berpendapat bahwa kenaikan tarif PPN akan mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Namun, UU HPP telah menetapkan barang dan jasa yang dikenai kenaikan tarif PPN, dan kebutuhan pokok tidak termasuk di antaranya. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder yang terbatas. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian yang lebih beragam dan menggunakan data primer melalui wawancara, observasi, atau penyebaran kuesioner agar penelitian menjadi lebih mutakhir.

5. REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Amir, H., Asafu-Adjaye, J., & Ducpham, T. (2013). The Impact of The Indonesian Income Tax Reform: A CGE analysis. *Economic Modelling*, 31, 492–501. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.12.018>
- Aprilian, R. I. (2023). Analysis of Tax Compliance of MSME Owners After The Tax Harmonisation Law. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 525–538.
- Auerbach, A. J. (1996). Measuring The Impact of Tax Reform. *National Tax Journal*, 49(4), 665–673. <https://doi.org/10.1086/NTJ41789233>
- Bourguignon, F. (2003). *The Growth Elasticity of Poverty Reduction: Explaining Heterogeneity Across Countries and Time Periods*.
- Djufri, D. (2022). Dampak Pengenaan PPN 11% terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU No.7 THN 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5), 391–404. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.106>
- Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is good for the poor. *Journal of Economic Growth*, 7(3), 195–225. <https://doi.org/10.1023/A:1020139631000>
- Eicher, T. S., Turnovsky, S. J., & Prunera, M. C. R. (2003). *The Impact of Tax Policy on Inequality and Growth: An Empirical and Theoretical Investigation*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Febrianti, M. K. A. C., Tamrin, M. H., Musleh, M., & Abubakar, A. H. (2023). Innovative Governance in Practice: An Institutional, Actor and Society Approach. *Jurnal Public Policy*, 9(4), 248. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i4.7369>

- Gemmell, N. (1988). Tax Systems, Tax Revenue and Growth in LDCs: A Review of Empirical Evidence. *Intereconomics*, 23(2), 84–90. <https://doi.org/10.1007/BF02927028>
- Kharisma, N. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 295–303.
- Kraay, A. (2006). When is Growth Pro-poor? Evidence from A Panel of Countries. *Journal of Development Economics*, 80(1), 198–227. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2005.02.004>
- Kurnianingsih, R. (2021). Analisis Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(02), 112–129.
- Lee, Y., & Gordon, R. H. (2005). Tax Structure and Economic Growth. *Journal of Public Economics*, 89(5–6), 1027–1043. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.07.002>
- Liyana, N. F. (2021). Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 124–135. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1394>
- Mendoza, E. G., Razin, A., & Tesar, L. L. (1994). Effective Tax Rates in Macroeconomics. *Journal of Monetary Economics*, 34(3), 297–323. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(94\)90021-3](https://doi.org/10.1016/0304-3932(94)90021-3)
- Musleh, M., Subianto, A., & Prasita, V. D. (2023). Stakeholder Interaction in the Development of Oxygen Ecotourism on Gili Iyang Island, Indonesia. *Journal of Government Civil Society*, 7(2), 297–323. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i2.8251>
- Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental: Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism , Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1), 75–90. <https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218>
- OECD. (2023). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023 — Indonesia. France: OECD.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. LN 2021 (246) : 104 hlm. TLN (6736) : 120 hlm.
- Rahmah, N. (2022). Alternatif Solusi Dalam Pemulihan Ekonomi Tahun 2022 Dengan Menimbang Pro Kontra Kenaikan Ppn 11% Oleh: Anindya Putri.... *Academia. Edu*.
- Ravallion, M., & Chen, S. (1997). What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes in Distribution and Poverty? *The World Bank Economic Review*, 11(2), 357–382. <https://doi.org/10.1093/wber/11.2.357>
- Son, H. H., & Kakwani, N. (2008). Global Estimates of Pro-poor growth. *World Development*, 36(6), 1048–1066.
- Stokey, N. L., & Rebelo, S. (1995). Growth Effects of Flat-Rate Taxes. *Journal of Political Economy*, 103(3), 519–550. <https://doi.org/10.1086/261993>
- Timmer, C. P. (2007). How Indonesia Connected the Poor to Rapid Economic Growth. *Delivering on the Promise of Pro-Poor Growth: Insights and Lessons from Country Experiences*. Washington, DC: World Bank (with Palgrave Macmillan), 29–57.
- Yesayabela, T. M., Satyas, F. R., Musleh, M., & Rianto, B. (2023). Kolaborasi Model Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Trenggalek. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 327–346. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i3.11736>

Implementasi Kebijakan BLT Berdasarkan Analisis Van Meter Dan Van Horn (Magang Kerja Di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu)

Asih Widi Lestari^{1*}, Gisela Mburu Amma², Firman Firdausi³

^{1,2,3} Department of Public Administration, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 3, 2024

Revised May 16, 2024

Accepted May 16, 2024

Available online May 25, 2024

Keywords:

Direct Cash Assistance, Policy, Village Government.



This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Hang Tuah

ABSTRACT

Direct Cash Assistance (BLT) is direct assistance in the form of a certain amount of cash for households that really need it, namely households that are included in the very poor category. This program was launched by the government as social protection for the poor to reduce the negative impact of The policy of adjusting compensation to reduce fuel subsidies is to help poor people meet their basic needs. The objectives of this research are (1) to find out the implementation of the Direct Cash Assistance program policy in the Sidomulyo Village area, Batu District, Batu City. (2) to find out what are the supporting and inhibiting factors from the government of the village government in implementing the Direct Cash Assistance policy in Sidomulyo area, Batu District, Batu City. The type of research used by researchers is descriptive research with a qualitative research approach, the focus of the research is (1) Implementation of public policy (2) Direct Cash Assistance Program in Sidomulyo Village (3) Analysis of Van Meter and Van Horn so that the informants in this research are (1) Head of Sidomulyo Village, as general person in charge of the area. (2) Village Secretary as person in charge of administration (3) Head of the People's Welfare Section as person in charge of the Direct Cash Assistance Program in Sidomulyo Village.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah di dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya material, spirituan, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sesuai dengan Undang- Undang tersebut pemerintah melaksanakan pembangunan yang di arahkan pada upaya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam rangka membentuk Indonesia seutuhnya.

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah mempunyai peran dalam proses maju dan berhasilnya pembangunan itu sendiri dengan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 1981 Tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin itu sendiri. Oleh Karena itu pemerintah banyak memperhatikan masyarakat kurang mampu dan pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk berbagai tindakan guna menanggulangi kemiskinan. Lalu di perjelas dengan peraturan pemerintah No. 22 Tahun 2005 Tentang program kebijakan pemerintah dalam hal Kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dimana peraturan pemerintah ini bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan social-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (Utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standard dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana

kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standard dan sasaran tersebut.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu untuk rumah tangga yang sangat membutuhkan, yakni rumah tangga yang termasuk dalam kategori sangat miskin, program ini dikuncurkan pemerintah sebagai perlindungan sosial (social protection) bagi masyarakat miskin untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan penyesuaian kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah untuk membantu masyarakat miskin agar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dana tunai atau bantuan langsung tunai tak bersyarat yang dilakukan pemerintah pada tahun 2008 diperuntukkan bagi masyarakat miskin agar tidak terlalu merasakan dampak dari kenaikan harga BBM. Dasar pemerintah dalam membuat kebijakan program BLT ini adalah untuk membantu masyarakat miskin atau masyarakat yang berada pada kelompok kedua (Menurut Bambang Heru) yang dengan pasti akan merasakan dampak dari kenaikan harga BBM. Selain itu BLT dilakukan sebagai kompensasi dari pemotongan subsidi bahan bakar minyak kepada penduduk miskin.

Tidaknya ada lagi subsidi untuk BBM pada Tahun 2008 dinilai pemerintah akan dicangkan sebagai kompensasi bagi penduduk miskin. Ukuran keberhasilan yang dipakai oleh pemerintah sebagai pertimbangan harus mampu merubah standard kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam kondisi yang ideal proses implementasi kebijakan harus dijalankan dengan menyesuaikan kemampuan dan karakteristik pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga bias jadi proses tersebut memerlukan waktu dan pendekatan yang berbeda-beda antara satu komunitas lainnya. Untuk memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat dalam partisipasi demi kemajuan mereka sendiri juga tidak bisa disamaratakan antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain, hal ini di sebabkan karena latar belakang pemerikan beragam. Oleh karena itu, upaya meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kelurahan akan sangat desa akan sangat bervariasi meskipun proses implementasi kebijakan yang ada dilakukan dengan pendekatan yang sama dan dalam waktu yang bersamaan.

Dengan adanya kebijakan tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak luputnya pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa sebagai pimpinan untuk mengawasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di wilayah masing-masing. Implementasi kebijakan Bantuan langsung Tunai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi dari Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur

Dalam kebijakan ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemensdes PDTT) melimpahkan dana sebesar Rp 180.000.000/ Tahun untuk 50 penerima, sumber dari Dana Desa (DD). Penerima BLT diprioritaskan untuk keluarga miskin nonProgram Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dan mereka yang belum mendapat manfaat kartu prakerja dan juga keluarga miskin yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) maupun tidak terdata mendapatkan bantuan tersebut jika memenuhi kriteria (Prabandari, 2020:1). Kriteria calon penerima BLT-Dana Desa sebagai berikut ini:

- 1) Tidak menerima PKH dan BPNT dan Kartu Kerja
- 2) Masyarakat yang tidak memiliki caadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup dan tidak mampu lagi untuk bekerja karena factor usia.
- 3) Masyarakat yang rentan sakit atau memiliki anggota keluarga yang sakit menahun atau kronis.

Seperti yang telah dijelaskan, penerima BLT-Dana Desa diprioritaskan bagi keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Keluarga miskin ditetapkan atas putusan bersama dalam musyawarah desa dalam musyawarah tersebut pula akan dibahas mengenai pemilihan target sasaran agar tidak terjadi salah sasaran program bantuan BLT-Dana Desa ini. Keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa ditetapkan melalui pelaksanaan pendekatan yang memperkuat moral sosial melalui gotong royong dan musyawarah. Semakin banyaknya kriteria keluarga miskin yang dipenuhi maka semakin prioritas pula mereka menjadi penerima BLT-Dana Desa (BAPPENAS, 2020:8). Ketiga kriteria yang telah dijelaskan diatas adalah kriteria yang bersumber dari peraturan Menteri Desa Pembangunan desa Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT) No.6 Tahun 2020.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat didefinisikan masalah dalam implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai yaitu karena tingginya presentase kemiskinan, dilihat dari kondisi ekonomi di Desa Sidomulyo saat ini menurut sumber data yang didapatkan dari kantor Desa sebanyak 1.250 Orang berstatus belum bekerja/tidak bekerja, sebanyak 1.430 orang dengan status ibu rumah tangga, dan sebanyak 1.597 orang bekerja sebagai petani/pekebun. Sehingga diperlukannya Bantuan Langsung Tunai untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan Langsung Tunai ini adalah sebuah kebijakan atau bantuan keuangan yang berasal dari desa untuk menanggulangi krisis keuangan masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Berangkat dari masalah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Implementasi Kebijakan BLT berdasarkan Analisis Van Meter dan Van Horn."

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2005:5) bahwa pendekatan kualitatif adalah penelitian dengan pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif.

Menurut Sugiyono (2016:7) Metode tugas akhir kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (Kurang terpolah), dan disebut dengan metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Jenis metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode tugas akhir naturalistic karena tugas akhirnya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode ethnography, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk tugas akhir bidang antropologi budaya; disebut dengan metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih peneliti karena peneliti ingin mengetahui sebuah fenomena yang belum diketahui sebelumnya. metode pengumpulan data berupa cerita responden dan latar social yang ada dilokasi pelaksanaan.

Lokasi pelaksanaan adalah tempat pelaksanaan dilaksanakan serta lamanya pelaksanaannya. Tugas akhir ini dilaksanakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Pelaksanaan tugas akhir dilakukan pada bulan September 2023 sampai dengan Februari 2024. Dalam tugas akhir kualitatif mengharuskan untuk menetapkan fokus tugas akhir. Tujuannya adalah untuk memahami secara luas dan memahami secara luas dan memahami situasi luas dilapangan (Sugiyono, 2016:52). Dengan menetapkan fokus tugas akhir, maka dengan mudah melakukan analisis mendalam terkait

permasalahan yang terjadi. Adapun fokus tugas akhir ini yaitu: 1) Implementasi kebijakan, dan 2) Bantuan Langsung Tunai.

Teknik pengumpulan data dalam (Sugiyono 2016) menjelaskan mengenai bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam tugas akhir, karena tujuan utama dari tugas akhir adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka pelaksana tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standard data yang ditetapkan.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabung dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada diantaranya adalah: Pelaksana menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data baik itu data primer maupun data sekunder diantaranya: 1) Observasi: Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini, pelaksana dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan tugas akhir. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir aktivitas peneliti. Sugiyono (2016). 2) Wawancara, dapat dilakukan secara struktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun menggunakan telepon. Jenis wawancara yang digunakan pelaksana adalah wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengar apa yang diceritakan informan. Supaya hasil wawancara dapat merekam dengan baik dan memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut: Buku catatan, Tape recorder, dan kamera, untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. 3) Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) berdasarkan analisis Van Meter dan Van Horn di desa Sidomulyo

Bantuan Langsung Tunai adalah program yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai reaksi atas melonjaknya harga minyak mentah dunia dan krisis ekonomi agar mampu membantu kalangan masyarakat miskin. Walaupun Bantuan Langsung Tunai tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa manfaat bagi mereka. Bantuan Langsung Tunai memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhannya. Bantuan Langsung Tunai diberikan kepada masyarakat miskin agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Penerimaannya adalah masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN setelah itu ke DD dan terakhir pemerintah desa salurkan ke pada masyarakat yang menjadi sasaran. Masyarakat miskin sangat membutuhkan subsidi dari pemerintah untuk menunjang kebutuhan hidupnya yang semakin sulit. Kemiskinan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh negara berkembang (Todaro 2002). Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi

untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Ezzati Et.al (2020).

Seperti yang telah dijelaskan, penerima (BLT) diprioritaskan bagi keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Keluarga miskin ditetapkan atas putusan bersama dalam musyawarah desa bersama RT/RW dalam musyawarah tersebut pula akan dibahas mengenai pemilihan target sasaran agar tidak terjadi salah sasaran program bantuan BLT kelurahan ini. (BAPPENAS, 2020: 8). Implementasi kebijakan program BLT ditujukan kepada masyarakat yang terdampak pemerintah desa sidomulyo berfokus pada masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan tersebut maka dilakukan pendataan melalui RT/RW terhadap masyarakat yang kurang mampu sehingga program pemberian blt bisah tepat sasaran.

Dalam kebijakan ini ialah bantuan langsung tunai yang diberikan untuk masyarakat miskin untuk memenuhi dari sebagian kebutuhan dalam rumah tangga masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat yang tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tidak mampu bekerja karena sakit (tiga bulan kedepan) dikarenakan kehilangan mata pencaharian kondisi kesehatan yang kurang baik. Masyarakat yang rentan sakit atau memiliki anggota keluarga yang sakit menahun atau kronis.

Penerima manfaat bantuan langsung tunai di desa Sidomulyo

Proses pembagian bantuan langsung tunai telah tepat sasaran untuk masyarakat yang berhak untuk mendapat Bantuan Langsung Tunai. Bantuan Langsung Tunai merupakan bagian dari perlindungan sosial, maka tujuannya untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai tidak lain adalah untuk menjaga atau melindungi warga miskin dari kerentanan agar mampu bertahan hidup.

Program Bantuan Langsung Tunai adalah salah satu dari beberapa bentuk kebijakan pemerintah. Kebijakan yang oleh Carl Friedrich diartikan sebagai berikut: adalah tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat kesulitan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (Kemendes PDTT) melimpahkan dana sebesar Rp 180 Juta untuk 50 orang penerima atau tergolong keluarga miskin yang sesuai dengan hasil pendataan. Penerima BLT diprioritaskan untuk keluarga miskin nonProgram Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dan mereka yang belum mendapatkan manfaat kartu prakerja dan juga keluarga miskin yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) maupun tidak terdata akan mendapatkan bantuan tersebut jika memenuhi kriteria (Prabandari, 2020: 1). Kriteria calon penerima BLT-Dana Desa sebagai berikut ini:

1. Tidak mendapat PKH atau BPNT dan Kartu Prakerja
2. Masyarakat yang tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup.
3. Masyarakat yang rentan sakit atau memiliki anggota keluarga yang sakit menahun atau kronis.

Seperti yang telah dijelaskan, penerima BLT-Dana Desa diprioritaskan bagi keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Keluarga miskin ditetapkan atas putusan bersama dalam musyawarah desa dalam musyawarah tersebut pula akan dibahas mengenai pemilihan target sasaran agar tidak terjadi salah sasaran program bantuan BLT-Dana Desa ini

Kriteria penduduk miskin calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan Surat Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi (PDPTT) No. 1261/PRI.00/IV/2020 adalah sebagai berikut:

1. Luas lantai kurang dari 8 m² per orang
2. Lantai tanah/bambu/kayu murah
3. Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
4. Buang air besar tanpa fasilitas (bersama orang lain)
5. Penerangan tanpa Listrik
6. Air minum dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi (sungai/air hujan)
7. Bahan bakar dari kayu bakar atau arang atau minyak tanah
8. Konsumsi daging/ayam/susu hanya satu kali per minggu
9. Satu stel pakaian pertahun
10. Makan satu sampai dua kali perhari
11. Tidak sanggup berobat ke puskesmas atau poliklinik
12. Sumber penghasilan KK (Kartu Keluarga) petani berlahan kurang dari 500 m², buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan dan pekerjaan lain berupah kurang dari Rp. 600.000 (enam ratus ribu) perbulan
13. Pendidikan KK (Kartu Keluarga) tidak sekolah atau tidak tamat SD atau hanya sampai tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang bisa dijual minimal Rp. 500.000 (lima ratus ribu).

Menurut Bapak Mahmudi, S.Pd selaku sekretaris desa mengatakan bahwa jumlah penerima bantuan langsung tunai berupa dana desa Rp 300.000 per orang yang di gunakan untuk kebutuhan keluarga penerima bantuan langsung tunai baik itu berupa BBM, bantuan langsung tunai, bantuan keluarga miskin dengan jumlah keseluruhan KK dari jumlah adalah 50 orang dan jumlah penerimaan.

Program Bantuan Langsung Tunai juga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin. Di samping itu masih banyak kebijakan lain yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, yaitu program jangka panjang dan jangka pendek.

Pelaksanaan bantuan langsung tunai di desa Sidomulyo.

Penyaluran bantuan langsung tunai yang di laksanakan telah di persiapkan dengan baik lewat rapat koordinasi pemerintah desa bersama pendamping lapangan dengan baik guna untuk mendukung proses pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai sehingga bantuan langsung tunai tersebut bias tepat sasaran.

Implementasi adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak terhadap suatu hal (syahida 2014:10). Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan yang berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, ataupun penerapan kewajiban. Seperti yang telah dijelaskan, penerima (BLT) diprioritaskan bagi keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Keluarga miskin ditetapkan atas putusan bersama dalam musyawarah desa dalam musyawarah tersebut pula akan dibahas mengenai pemilihan target sasaran agar tidak terjadi salah sasaran program bantuan BLT kelurahan ini. (BAPPENAS, 2020: 8).

Bantuan Langsung Tunai diberikan kepada masyarakat miskin agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Penerimaanya adalah masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah. Masyarakat miskin sangat membutuhkan subsidi dari

pemerintah untuk menunjang kebutuhan hidupnya yang semakin sulit. Kemiskinan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh negara berkembang (Todaro 2002). Kemiskinan di definisikan sebagai ketidak mampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Ezzati Et.al (2020).

Menurut Drs. Suharto, M.M selaku kepala Desa Sidomulyo Penyaluran Bantuan langsung Tunai (BLT) di laksanakan berdasarkan prosedur yang telah di tetap dalam rapat koordinasi pemerintah beserta pendamping lapangan demi terlaksana nya komunikasi yang baik. Dalam kondisi yang ideal proses implementasi kebijakan harus dijalankan dengan menyesuaikan kemampuan dan karakteristik pelaksanaan Bantuan langsung Tunai (BLT), sehingga bisah jadi proses tersebut memerlukan waktu dan pendekatan yang berbeda-beda antara satu komunitas lainnya.

Untuk memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat dalam partisipasi demi kemajuan mereka sendiri juga tidak bisah disamaratakan antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain, hal ini di sebabkan karena latar belakang pemerikan yang beragam. Oleh karena itu, upaya meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa akan sangat bervariasi meskipun proses implementasi kebijakan yang ada dilakukan dengan pendekatan yang sama dan dalam waktu yang bersamaan.

Kebijakan dari permasalahan utama dalam kebijakan publik, yakni kurangnya perhatian pada tahap implementasi. Model pendekatan Implementasi Kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the policy Implementation (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan sebagai variable. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksanaan dan kinerja kebijakan public. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn yaitu:

Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosia-kultur yang ada di level pelaksanaan kebijakan. Melonjaknya harga BBM dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat terlebih khususnya masyarakat yang kurang mampu sehingga tidak memenuhi kebutuhan hidup dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah mengkuncurkan program bantuan langsung tunai (BLT) sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat miskin untuk mengurangi dampak negatif dari melonjaknya harga BBM dan membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika ukurann dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standard dan sasaran tentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standard dan sasaran tersebut.

Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukann keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Penyaluran

BLT di salurkan oleh pemerintah pusat BPNT dengan jumlah Rp. 900.000/ Tiga bulan setelah itu di salurkan ke APBN-DD, akan tetapi pemerintah desa menyalurkan bantuan tersebut setiap bulannya dengan jumlah Rp. 300.000/Bulan dan terakhir di berikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam (dalam Van Meter dan Van Horn, 1974) bahwa: *New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*". Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa:

Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat di simpulkan bahwa penerapan proram Bantuan Langsung Tunai (BLT) Penerapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Sidomulyo sudah terlaksana secara maksimal akan tetapi terkadang pecairan dana mengalami keterlambatan di karenakan lambatnya transfer dari dinas sendiri sehingga masyarakat yang menerima bantuan tersebut menerima dananya di bulan berikut atau di akhir bulan. Penerapan bantuan langsung tunai sudah tepat sasaran akan tetapi ada beberapa yang di wakili saat menerima bantuan tersebut da nada juga masyarakat yang tiidak bisa menerima langsung ke kantor desa di karenakan kondisi kesehatan sehingga pemerintah desa langsung mengantarkan ke tempatt atau rumah penerima.

Faktor pendukung dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai adalah ketersediaan anggaran, antusias masyarakat dan kerja keras pendamping lapangan sehingga proses penyaluran bantuan langsung tunai dapat terselenggara dengan baik dan tepat sasaran. Penyaluran bantuan langsung tunai yang di laksanakan telah di persiapkan dengan baik lewat rapat koordinasi pemerintah desa bersama pendamping lapangan dengan baik guna untuk mendukung proses pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai sehingga bantuan langsung tunai tersebut bisa tepat sasaran. Sedangkan setempat, dalam pendataan pada masyarakat yang kurang mampu, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendamping lapangan pada tahap implementasi penyaluran bantuan langsung tunai. Implementasi kebijakan tentunya menegaskan standard dan sasaran

tentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

5. ACKNOWLEDGE

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi atas dukungannya, dan Desa Sidomulyo Kota Batu atas kesediaannya menerima penulis untuk melakukan penelitian.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Muhammad Abdulkadir. 2001. *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Moleong. Lexy J. 2005. *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho. 2008. *Perilaku Konsumen*. Edisi Revisi. Cetakan Pertama, Penerbit Kencana. Jakarta.
- Sutopo, dan Sugiyanto. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI
- Solichin 2008. *Analisis Kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Thomas R 1992. " *Understanding Public Policy*". New Jersey: Prentice Hall
- Winarno. 2008. *Kebijakan Publik*, Pt. Buku Kita: Jakarta. diterjemahkan oleh Haris Munandar. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- William Dunn. 1995. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Ardila, dkk. 2014. Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Bareng Kecamatan Bareng) *Akuntansi*, 2 (2) 139–148, (<https://journal.ugm.ac.id>), diakses 25 Desember 2014.
- James E. Anderson. 1979. *Public Policy Making*. New York. NJ: Holt Reinhartnwinston Kabupaten Jombang. *Universitas Brawijaya Malang*, 2(1).
- Setiawan, A. 2017. Implementasi *Optical Character Recognition* Tugas Dan Profesional Terhadap Kualitas, Diakses 25 Desember 2017.

Empowering Family Welfare In Corpse Care Simulation: A Case Study In Punggul Village, East Java

Nandya Dwi Agusti^{1*}, Cantika Dwi Maydina², M. Firdaus Kurniawan³

^{1,2,3} Development Studies Department, Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 02, 2023

Revised May 23, 2024

Accepted May 24, 2024

Available online May 25, 2025

Keywords:

Women's Empowerment,
Caring for the Dead, PKK
(Family Welfare
Empowerment).



This is an open access article under the
CC BY-SA license.

Copyright © 2024 by Author. Published
by Universitas Hang Tuah

ABSTRACT

Women's empowerment is an important focus for the world as stated in SDGs point 5 on gender equality which is key in achieving sustainable development and community welfare. PKK (Empowering Family Welfare) as a forum for empowering women or housewives is the main subject in research on training activities for caring for the dead. The targets of this research are PKK women in Punggul Village, Gedangan District, Sidoarjo Regency. The research method used is a qualitative method with a phenomenological approach to understand the experiences and perspectives of PKK Village Ibu Punggul, Ibu 'Modin', and the Community Service Team of Institut Teknologi Sepuluh Nopember in the case of handling corpses. Data collection in this study was through direct observation and field observation during the implementation of the simulation of caring for the corpse. Then, the research results are presented based on descriptive data analysis. The service activity of caring for the corpse began with a theoretical presentation led by the community service team and continued with a simulation led by the 'Modin' together with PKK women. Different views began to emerge at the opening of the discussion session, starting from the use of types of soap, toiletries, prayer leaders, and women's participation in caring for the corpse. This training has a positive impact, both in terms of preserving cultural values and strengthening social cohesion.

1. INTRODUCTION

Women's empowerment has become a significant focus in societies around the world, as gender equality and women's participation in various sectors are recognized as essential to Sustainable Development Goal 5. PKK serves as a community for women to unite, share knowledge, and collaborate in various aspects of life. Although PKK is a stand-alone movement, the basis of women's gatherings in Indonesia predates the establishment of PKK. For example, before Indonesia's independence, Indonesian women were involved in various social and political movements, such as Dewi Sartika's women's movement "Sekolah Istri" in 1907, social organizations such as Aisyiyah, and charitable activities. In contrast to this, the PKK is a more structured and coordinated formal effort to empower women and families at the community level. Through various programs and activities run by PKK, it can help advance the role of women, improve the quality of family life, and foster strong social ties within the community. Although women's organizations existed before PKK, PKK serves as an important milestone in uniting and organizing women's efforts to actively contribute to the nation's development. With the presence of PKK, women in Indonesia, especially in rural areas, can play a crucial role in achieving sustainable and inclusive development. Empowering women in rural areas is a key factor in achieving sustainable development and community welfare. When women in rural areas are empowered, they have better access to education, healthcare, and economic opportunities. This means they can actively participate in decision-making and contribute to the economic well-being of the family. Through women's empowerment, rural communities become more inclusive, equitable, and better prepared to face future

challenges. One of the future challenges resulting from the development of digitalization can lead to a life of individualism. In this case, PKK can help preserve the culture of 'gotong royong' to avoid individualism in the social community. The Indonesian culture of 'gotong royong' (cooperation in times of difficulty) is also reflected in the Islamic way of caring for the deceased (Hilmawan et al., 2023).

All living beings in the world will eventually face death and return to the Creator. Death is certain and will come at a time that no one knows. Therefore, every human being must equip himself to face death, both his own death and that of others in terms of helping to care for his corpse. In Islam, caring for the dead is fardhu kifayah. Fardhu kifayah itself means, if some Muslims have represented to do it, then the rest of the Muslims are not obliged to do it. On the other hand, if there is no single representative who does it, then all Muslims who know will be sinning. Therefore, caring for the dead is an obligation that must be carried out by every Muslim.

Following up on the above, a corpse care training activity was held targeting PKK women as a form of empowerment. PKK itself became the target of the activity because it is one of the communities engaged in social welfare development. In addition, women can be empowered and contribute more to corpse care activities. Usually, women only help in normative matters such as bathing and fanning the corpse with a note only on the corpse of a woman according to her mahram. This happens because of the stigma that it is uncommon for women to blame corpses. Therefore, this study was conducted to provide knowledge that women can also perform corpse care activities in accordance with Islamic teachings and norms.

The focus of the study in this research is the empowerment of PKK (Family Welfare Empowerment) cadres through training in caring for the dead as a process of strengthening spiritual literacy which includes providing material and simulating the stages of caring for the dead. The care of corpses is not only about techniques and procedures, but also about sacred spiritual and religious meanings in accordance with community beliefs. However, as time progresses, the skills in caring for the dead are increasingly eroded. Only community leaders, religious leaders, or 'modin' have adequate knowledge and skills to care for the dead. Therefore, this research targets PKK cadres as the main subjects in the training on caring for the dead. This community of women can also have the capacity to provide services to the community.

This research can also help increase community participation, contribution, and views on corpse care activities. The findings of this study can help improve understanding of the spiritual and religious meanings and different views of caring for the dead. In addition, the results of this study are expected to contribute to the development of science and spiritual theory given the lack of scientific studies that discuss training in caring for the dead.

Community development is an activity that is used as a means of community development in a systematic, planned, and useful way to expand community access in improving social, and economic conditions, and better quality of life in other aspects. This community development is led by community members who have several stages in achieving certain goals within the community (Mohinuddin, 2023). Community development practitioners have effective and respectful relationships with the communities they are working with, and sometimes the ability to build these relationships with the community is a more important quality for a worker than having a community development qualification (Jessica, 2023).

In a development community, of course, there needs to be participation from the local community and several stakeholders including both companies and the government.

Community development needs the provision of knowledge from outsiders as well to provide the community with broader insights (Margareta & Salahudin, 2022). Community development is also one of the social actions that make people more organized about themselves. This aims to improve people's living conditions and provide community empowerment to be able to direct themselves to better steps (giving change). Community development is a continuous development process where there are several stages to be carried out starting from the initial stage to the evaluation of ongoing or ongoing empowerment. The existence of community development also provides a form that is in accordance with what goals are to be achieved in society based on the needs and potential of the community itself (Jessica, 2023).

PKK is a social organization that empowers women to participate in development. Also, PKK is a community with women as a motor in supporting family welfare as the smallest unit in the community that will affect the life of the nation. This community was formed based on the Decree of the Minister of Home Affairs and Regional Autonomy No. 53 Year 2000 on the Empowerment and Family Welfare Movement (PKK). PKK groups were formed from the national level to the neighborhood association level. Every month PKK used to have regular meets (Anggraini et al., 2016). PKK has several tasks, one of which is assisting the sub-district government and becoming a partner in empowering and improving family welfare.

This is linear with participating in community empowerment because the PKK is indeed moving and running in this field, namely by empowering women. PKK plays a role as a community empowerment motivator because they have some supporting factors in PKK activities including: General management supporting factors such as availability of data, evaluation, and monitoring of the community around their environment, the existence of more precise implementation instructions and technical instructions regarding the empowerment of PKK women and the community around their environment. In case they know more about empowerment programs that are suitable to be carried out and implemented in their environment, the existence of community support. PKK is an organization that plays a role in community development and empowerment. Where the PKK can be called one of the community movers because by empowering women in each of its programs, community participation in every development, and of course in every empowerment activity for community development, PKK will definitely invite the community around its area to participate as a participant (Kusrina & Permana, 2018).

The role of the PKK as one of the movers in improving family welfare also acts as an inspiration for the community to be able to continue to move towards even better things with the empowerment of programs that come from outsiders. In addition, the empowerment of the PKK can increase the role of women in social development (Kusrina & Permana, 2018).

The concept of activity is specifically suggested to entail "a unit of subject-object interaction defined by the subject's motive" (Kaptelinin & Nardi, 2007). Additionally, there is a distinction within the concept of activity that pertains to "institutionalized practices of human life" (Somekh & Nissen, 2018). Another related meaning associated with activity refers to "purposeful human transformation of nature." All these definitions of activity encompass explanatory principles for human behavior. The contents of this book reflect the ongoing development of theory and practice, as proposed by cultural-historical activity theory (CHAT). General activity theorists argue that research should emphasize mediated action within socio-cultural contexts. Their generic method encompasses both historical and cultural levels of analysis. Regardless of the definition of

activity, research is firmly rooted in everyday events, situations, and activities. Similarly, critical and central developmental trajectories of phenomena like activity, awareness, and personality emerge through collaborative (learning and developmental) activities among individuals (Kaptelinin & Nardi, 2007).

Reality and mind are co-constructed concepts supported by individual agents. A broad perspective on defining activity recognizes the emergent nature of mind and behavior, acknowledging the influence of an interpretative framework from pedagogy, philosophy, and sociology. Concepts such as awareness, action, agency, appropriation, object, objective, double stimulation, and the zone of proximal development are related to chapters directed toward the study of activity systems (van der Veer, 2006). These concepts also include artifacts, tools, instruments, multi-voicedness, contradictions, and expansive cycles of work. The outlines a focused analysis on the expansive meaning of artifacts. His example indicates the depth and breadth of activity theory. Artifacts represent aspects of the material world that have evolved through their incorporation into goal-directed human action. Due to the changes brought about in the process of their creation and use, artifacts are simultaneously ideal (conceptual) and material (van der Veer, 2006).

The coordinated evolution of activity, agency, mind, and similar concepts has led to the growth of studies covering individual achievement, shared activity, communication, and societal development. The language we use and the artifacts we employ serve personal and shared purposes, becoming tools and symbols for the development of the mind. Artifacts direct our inner attention and outer actions, facilitating the individual construction of "alternative worlds." The social worlds we create, adapt to, and participate in influence individual minds as we communicate, argue, and persuade others. Similarly, social practices initiated and managed by past generations play a role in shaping our development. A socio-cultural/cultural-historical approach to the study of activity and mind suggests a parallel focus on the interconnectedness between individual and societal development. Social practices pave the way for a continuous understanding of what it means to be human and take part in collective activities. As long as we accommodate objects, qualities, people, and objectives, people will continually change. Our activities also evolve as we adapt and shape them (Somekh & Nissen, 2018).

2. METHODS

Research on the empowerment of PKK mothers in Punggul Village through corpse care simulations focuses on their perceptions, experiences, and ways they face in caring for corpses. In this case, the method that is suitable for use is the qualitative method. Qualitative methods are research approaches used to explore, interpret, and understand the meaning of individual or group experiences related to social reality in a deep and structured manner. This is done to get a natural analysis based on what simulation participants experience in social life (Tobing al, 2017). In qualitative research methods, there are several approaches and this study uses a phenomenological approach which is subjective experience related to the perspectives of PKK Ibu Punggul Village, Ibu 'Modin', and the Community Service Team of Institut Teknologi Sepuluh Nopember in the case of treating corpses. The phenomenological approach in qualitative research is based on an individual's understanding of the experiences gained while conducting research. The main focus of this research is to empower PKK cadres through training in caring for corpses as a process of strengthening spiritual literacy which includes providing materials and simulating the stages of caring for corpses. Therefore, phenomenological research must refer to the reality or facts experienced by the subject (Helaluddin, 2019).

Direct Observation involves the researcher directly observing the subject or entity under investigation in its natural environment without actively participating in the activity being observed. This method requires careful observation of behavior, interactions, or situations that yield invaluable insights into the research phenomenon. The aim is to obtain data that is objective and contextually relevant. Essentially, the researcher takes a passive stance in Direct Observation, observing the research subject in its unchanging natural context. In contrast, Active Participant Field Observation involves the researcher actively engaging in the activities or interactions observed in the research participant's natural environment. Researchers not only observe but also actively participate in the interactions or scenarios being observed. This level of engagement facilitates deep insight into the research phenomenon and the capacity to understand the unique perspectives held by the participants (O.Nyumba et al., 2018).

To gain deeper insight into the dynamics of complex interactions and processes in the village office environment, an active participant field observation methodology was wisely applied at the Punggul Village Office in Sidoarjo Regency, Indonesia. This method focuses on explaining the procedures and roles in preparing and cleaning the body for burial in accordance with Islamic traditions. Researchers act as active observers, carefully documenting data regarding interactions between village office officials, community members, and ongoing administrative processes. This approach complements Direct Observation and is designed to explore participants' perspectives and experiences regarding interactions and processes in the village office (Mir & Fayard, 2011).

The data analysis method used in the implementation of community service related to corpse care in Punggul Village uses descriptive data analysis. According to Made Winartha, the qualitative descriptive analysis method is analyzing, describing and summarizing various situational conditions from various data collected based on observations regarding the problems being researched and what is happening in the field. Qualitative data analysis is inductive, where an analysis is based on the data obtained and then developed into a hypothesis. By analyzing the data descriptively, it provides a deeper understanding of the basic characteristics of the data that we have observed. For example, the implementation of community service the lecturer at the Sepuluh Nopember Institute of Technology by inviting the people of Punggul Village, Gedangan makes us from the research side know what happens during the implementation of community service, which is an example of knowing the extent of knowledge possessed by the community who participate in the implementation of community service. The corpse was held by lecturers from the Institute of Technology on November 10th. The descriptive analysis data method is the starting point for exploring the data of what we are researching. This analysis helps researchers to understand the characteristics of the data being observed, identify important patterns, and make initial assumptions for further analysis after observing and going into the field for the implementation stage.

Data reduction in research on community servants caring for corpses was carried out in the initial implementation stage when the implementers or lecturers at the Sepuluh Nopember Institute of Technology invited the Punggul Village Village who then brought in the community as participants who took part in the procession of providing material by lecturers from the ITS Development Studies Department. This then gave rise to data from the results of the differences and questions asked by the participants who attended. The next stage is data display or data presentation, which is an activity when a collection of data is arranged systematically and easily understood, resulting in a conclusion which is the final stage in descriptive data analysis.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

Results

Taking care of a corpse is not easy because it goes through long stages. Starting from bathing, shrouding, and praying to burying the dead. Usually in taking care of the corpse, there is a male or female 'Modin' who is the leader and banner. During training activities to care for the dead, women are brought in. This is so that the PKK women get a new view and knowledge that women are also capable and qualified to perform the stages of caring for the dead (Kristiansen & Sheikh, 2012). Empowering PKK members in a simulation activity of caring for the dead program in Punggul Village, Gedangan Sub-district, Sidoarjo District, East Java, has been a transformative initiative in this rural community. The program is designed to empower PKK members by providing them with comprehensive training and practical experience in caring for the dead through hands-on simulations. It also encourages active community involvement, fostering unity and shared responsibility in community life.

Community empowerment on caring for the dead was held directly at the Punggul Village Office, Gedangan Subdistrict, Sidoarjo Regency. The lecturers of the Department of Development Studies from the Sepuluh Nopember Institute of Technology, as the organizer of the training, invited the local PKK members as the main subjects. In addition, the 'modin' was also invited to teach the PKK members how to care for the dead through simulations. The activity began with the provision of material related to caring for the body, starting from how to bathe or purify to bury the body. The material was led directly by lecturers of Islamic Religion from the Sepuluh November Institute of Technology under the auspices of the Department of Development Studies.

The first material is about bathing the corpse. The ruling on washing the body in Islam is 'fardhu khifayah'. A Muslim who dies must be washed as a form of purification. This is one of the conditions for the corpse to be washed. Another condition is that there are still parts of the corpse that can be washed. This case applies to someone who died in an accident or other event that made his body not as intact as before, so it still needs to be washed. In addition, someone who does not die as a martyr is required to be washed before burial as a form of purification. In bathing, there are rules on who can bathe a corpse, differentiated based on his mahram. If the corpse is male, it can be bathed by the person who is mandated to bathe, the father, grandfather, the man's family, mahram, and his wife. Meanwhile, if the corpse is female, it can be washed by the mother, grandmother, the woman's closest family, and husband. Equipment and supplies in bathing a corpse that need to be prepared such as a bed or table with a size of approximately 90 cm high, 90 cm wide, and 200 cm long, which can be used to place the corpse; Sufficient holy water in a bucket or other place (6-8 buckets); Jugs or kettles filled with water to place the corpse; Veil or cloth to cover the place where the corpse is bathed; Bucket as a water container; Gayung to pour water; Cotton; Cotton Buds to clean the dirt holes on the corpse's face; Crushed camphor to mix with water; Bidara leaves (pounded) or kaffir lime (pounded) or moringa or flowers to mix with water; Cloth covering the corpse in the form of a jarit or sarong; Towel for bathing the corpse; Liquid soap and shampoo; Scissors; Masks used by the person bathing; Aprons used by the person bathing; Sterile gloves and washcloths; and Large water buckets (2 pieces), small buckets (1 piece), and trash cans.

After all the equipment and supplies for bathing the corpse have been prepared. Continuing at the stage of bathing the corpse, the material presented regarding the ways and stages of bathing the corpse is as follows:

- 1) Place the corpse on the bed or table that has been prepared as a base for bathing the corpse, by covering the aurat using a jarit/cloth cover.

- 2) Step on the corpse first, the people in charge of bathing ensure that the corpse's aurat must always be covered by the jarit;
- 3) Shower the entire body of the corpse slowly. Then, wash the body of the corpse by inserting hands into the jarit/cloth covering the corpse, do it wear gloves slowly and smoothly as perfectly as possible;
- 4) When cleaning the private parts and rectum, the position of the corpse's body is slightly raised to half-sitting, while always pouring the corpse slowly;
- 5) Then clean the teeth, nostrils, ear holes, and armpit slits if the hair is long, it would be nice to shorten, the slits of the toes and hands if the nails are long, it would be nice to shorten and clean, and tidy up the hair using scissors, cotton buds or cotton slowly and smoothly and always pour clean water;
- 6) Removing feces from the stomach by pressing gently and gently, while always pouring clean water;
- 7) After everything has been washed and is considered clean. Then pour clean water over the entire body of the corpse from head to toe slowly three times. When pouring water accompanied by the intention. If the corpse is male, with the intention, Nawaitul ghusla lihaadzal mayyiti lillahi ta'aala. If the corpse is female, with the intention Nawaitul ghusla lihaadzihil mayyitati lillaahi ta'aala. Then pour clean water on the right side of the corpse three times. Followed by pouring clean water on the left side of the corpse 3 times. After that, the corpse is tilted to the left, then pour clean water on the back of the corpse 3 times. Then tilt the corpse to the right, then pour clean water on the back of the corpse 3 times;
- 8) After that, wash the entire body of the corpse, head, body, hands, feet, and shampoo the hair as perfectly as possible slowly and gently, while continuing to pour clean water.
- 9) When deemed clean, then pour clean water from head to toe slowly as perfect as possible. Then pour camphor water over the entire body of the corpse as perfectly as possible slowly. Followed by pouring bidara leaf water and kaffir lime water all over the corpse's body as slowly as possible;
- 10) After being considered clean, then all parts of the corpse's body are washed with a towel evenly starting from the right side slowly and gently;
- 11) After the process of bathing the corpse is complete, then the corpse is ablutioned, as if performing ablution as usual but there is no need to put water in the mouth, but simply wash, the nose area, and mouth, with wet gloves;
- 12) After the bathing and ablution of the corpse are complete, the corpse should be dried using a dry towel and the wet covering cloth should be replaced with a dry covering cloth, always covering the aurat when changing the covering cloth; and
- 13) After everything is done, continue with shrouding.

During the process of bathing the corpse until ablutions, each person in charge of bathing the corpse must ensure that the corpse's aurat is not visible or has been completely covered by the covering cloth. The second material is about the procedures for shrouding a corpse. The stages of shrouding a corpse between men and women are actually almost the same. The only difference is in the number of shrouds used and their use. This is because there are differences in the limits of aurat between men and women. Therefore, male corpses only need three pieces of shroud. Meanwhile, female corpses require five pieces of shroud because a woman's aurat is from head to toe.

After the delivery of material on the procedures for shrouding the corpse, followed by the third material, namely praying for the corpse. The funeral prayer can be done at

the funeral home, the nearest musholla, or mosque, and it is recommended to do it in the congregation. The more people who participate in praying for the corpse the better, especially if it reaches 40 people. If it does not reach 40 people, it should be made into 3 rows. The corpse is placed on the right side of the person praying, whether male or female (in front of the imam). The imam stands near the head for male corpses, and near the waist/stomach for female corpses. The funeral prayer is performed with 4 takbirs and 2 salams. The last material presented was about burying the body. Before the body is ready to be buried, the grave should be prepared and the hole should be deep enough. The size of the grave should be adjusted to the needs or size of the corpse. When the body is taken to the grave, it should be walked quickly, but not run. The process of placing the body in the grave begins with two or three people going down to the grave first, standing to receive the body from the coffin. The head of the corpse is inserted first from the south with the recitation of the prayer 'Bismillahi wa ala millati Rosulillahi'.

Discussion

The process of providing four materials to PKK women, starting from bathing to burying the corpse explained by the Lecturers of the Department of Development Studies, it is feared that there are differences in views or procedures in caring for the corpse with what local women usually encounter. Therefore, in this activity, a simulation of caring for the corpse was carried out as a form of direct practice led by a female modin. In this practical session, PKK members had the opportunity to apply what they had learned and exchange opinions to answer questions regarding the care of the dead that they did not know. In this simulation, a mannequin is used to represent a deceased individual, allowing participants to practice various rituals and procedures. This hands-on experience is crucial in building the confidence of PKK members, ensuring that they are well prepared for real-life situations when they have to care for the deceased. Community involvement is a key element of the program's success. Local residents are not mere spectators, they are actively encouraged to participate in the simulation activities. This involvement helped build a strong sense of community and mutual support within the community. It was a powerful reminder of the importance of preserving cultural values and traditions and the role that the entire community plays in upholding spiritual values.

The simulation activities carried out were accompanied by a question and answer process between PKK women with modin and Development Studies Lecturers. From this community service activity, it was found that there were differences in the implementation of corpse care from what had been explained and what had happened or had been done in the environment around PKK women in Punggul Village, there were several things that were different. The first difference is regarding the use of soap for the corpse when bathing it. Where, PKK women ask whether it is allowed to bathe the corpse using liquid soap because the texture is more slippery, it is feared that it is not allowed. Based on this, it was explained that with the progress of the times and felt to make the process of caring for the corpse easier, it is allowed to bathe the corpse using liquid soap and must ensure that the entire body of the corpse is completely clean, both from dirt and soap marks. The second debate concerns the use of a water hose. According to them,

Using a direct water hose in bathing the corpse is more efficient. This also confused the PKK women because in the past, they used to bathe corpses by slowly drawing water from a dipper in a tub and then pouring or pouring it over the corpse. In this case, the use of a hose is also allowed to make the body cleaner and so that the water used does not splash on other parts when washing the body itself. However, the flow of water in the hose must be ensured that it is not too heavy or that it causes the corpse to feel hurt.

There are also different views on the subjects who are allowed to participate in funeral prayers and offer funeral prayers. Funeral prayers and praying for the dead are usually only done by men, which raises the question of whether a woman is allowed to participate in funeral prayers and even pray for the dead. It turns out that mothers or women are also allowed to attend funeral prayers and perform funeral prayers. However, in this village it is still commonplace about gender issues because it is usually men who pray and offer funeral prayers. In fact, women are also not restricted from doing the same thing, with a note after the men have finished doing it. Women's minority participation in community social activities makes them powerless and dependent on men. With several differences in the implementation of corpse care activities, both those that have been explained and those that have been carried out around the Punggul Village environment, it is one way to learn from each other and increase knowledge. This is done to help find solutions or definitive answers for people who are still confused about the process of caring for the dead.

Caring for a dead body is an example of development by providing hands-on knowledge and practice. Contributions in society can of course be made by everyone in the sense that all people or citizens can also contribute to each other in building and achieving certain goals to be achieved. The role of women in society is no exception. In the neighborhood, the driving force and contributors are PKK women, where PKK women themselves have several roles, namely as instructors, activators, recorders, and assistants in the community. All matters related to the neighborhood association are carried out and collected by PKK mothers. Women are considered activators, they can position themselves in all aspects of where they are. Through this training on taking care of the dead, it helps them understand the position of women in the procession of taking care of the dead. This is important because there are not enough Modin or corpse caretakers for women. Bathing and caring for female corpses should be done by the woman's own family, but sometimes they do not understand the procedures for caring for corpses. Therefore, it is necessary to get help for the family of a female corpse from a female modin in the vicinity where the modin understands or has provisions regarding the care of corpses. This empowerment program also aims to provide knowledge related to corpse care in general so that mothers are also more interested and can become modin at any time if there are other modin who are unable to help take care of the corpse.

The impact of this service program on the community is profound. First, it makes a significant contribution to the preservation of cultural values. In a rapidly changing world, traditional practices often face the risk of being forgotten. This program ensures that these vital cultural and religious practices are passed down to the younger generation, safeguarding their continuity. Secondly, the program strengthens social cohesion. Communities become more united as they actively participate in these activities. The shared experiences of the simulation activities fostered a sense of community, making the communities more resilient and better equipped to face common challenges. In addition, the training and simulation activities better prepare PKK members and the community as a whole for real-life situations when they have to care for the deceased as a form of responsibility in the social life of the community.

From the implementation related to community service carried out in Punggul Village, Gedangan, cooperating with lecturers of the Department of Development Studies of the Sepuluh November Institute of Technology who invited Punggul Village and PKK mothers. Where it is done, it is sought to provide material to increase knowledge, especially for mothers or women. This is done to introduce that a woman can also become a modin to help take care of the corpses around her. Empowerment in the simulation

activities of the corpse care program is evidence of the positive impact of community-based initiatives. The program not only preserves cultural values and traditions but also strengthens social ties and prepares the community for the future. It serves as a beacon of hope and inspiration for other communities, offering a path towards enriching rural communities across Indonesia. Looking ahead, there is great potential for future program development and replication. The success of this initiative in Punggul Village serves as a model for other communities. Strategies for future development and replication include expanding the program to other villages and districts, tailoring it to fit the unique cultural and religious aspects of different regions, building the capacity of local trainers in the community, and collaborating with local government and religious institutions to provide resources and support for wider implementation.

4. CONCLUSION

The implementation of community service that invited PKK women from Punggul Village, Gedangan, Sidoarjo was an effort to provide an increased understanding of corpse care starting from washing, covering, and praying. In addition, this is also done to make a female modin, where it is still rare for a woman to become a modin. Modin is generally a job done by a man, however, it does not rule out the possibility that a woman can also become a modin who helps or assists neighbors in her neighborhood who are having difficulty caring for a corpse. It is hoped that providing knowledge about corpse care for PKK women will be something that can continue to be developed in future generations.

5. REFERENCES

- Anggraini, R. N. E., Rochimah, S., & Soedjono, A. R. (2016). PKK-man: A System to Manage PKK Activities in Indonesia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 105(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/105/1/012008>
- Bayeh, E. (2016). The role of empowering women and achieving gender equality to the sustainable development of Ethiopia. Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences, 2(1), 37–42. <https://doi.org/10.1016/j.psr.b.2016.09.013>
- Bridget Somekh, & Morten Nissen. (2018). Cultural-Historical Activity Theory and Action Research. Mind, Culture, and Activity. <https://doi.org/10.1080/10749039.2010.523102>, 93–97.
- Febrianti, M. K. A. C., Tamrin, M. H., Musleh, M., & Abubakar, A. H. (2023). Innovative Governance in Practice: An Institutional, Actor and Society Approach. Jurnal Public Policy, 9(4), 248. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i4.7369>
- Gender Equality and Women Empowerment in The National Development of Indonesia. (2020). Journal of Strategic and Global Studies. <https://doi.org/10.7454/js.gs.v2i2.1021>
- Gusti, I., & Purnamawati, A. (n.d.). WOMEN'S EMPOWERMENT STRATEGIES TO IMPROVE THEIR ROLE IN FAMILIES AND SOCIETY. International Journal of Business, Economics and Law, 18.
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Vo, D. T. H., Yudaruddin, R., Bintoro, R. F. A., Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 9(4). <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159>
- Jessica, S. (2023, July 21). What is Community Development? 2019 and 2023 Updates. Kusrina, T., & Permana, S. A. (n.d.). COMMUNITY EMPOWERMENT OF MUARAREJA'S

VULNERABILITY IN IMPLEMENTATION OF PKK TOURISM TOWN OF TEGAL CITY.

- Margareta, P. S., & Salahudin, S. (2022). Community Participation in Regional Development Planning: A Literature Review. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 121–132. <https://doi.org/10.33701/jtp.v13i2.1584>
- McLoughlin, C. E., Lee, M. J. W., & McLoughlin, C. (2007). Social Software and Participatory Learning: Pedagogical Choices with Technology Affordances in the Web 2.0 Era. <https://www.researchgate.net/publication/228640669>
- Mir, R., & Fayard, A.-L. (n.d.). *The Routledge Companion to Anthropology and Business*; First Edition. www.routledge.com/Routledge-
- Musleh, M., Subianto, A., & Prasita, V. D. (2023). Stakeholder Interaction in the Development of Oxygen Ecotourism on Gili Iyang Island, Indonesia. *Journal of Government Civil Society*, 7(2), 297–323. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i2.8251>
- Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental: Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism , Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1), 75–90. <https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218>
- Mohinuddin. (2023, August 12). Community Development in Social Work. 2018.
- O.Nyumba, T., Wilson, K., Derrick, C. J., & Mukherjee, N. (2018). The use of focus group discussion methodology: Insights from two decades of application in conservation. *Methods in Ecology and Evolution*, 9(1), 20–32. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12860>
- Penyusun, T., Hizkia Tobing, D., Vembriati, N., Kartika Herdiyanto, Y., Made Ari Wilani, N., Puri Astiti, D., Made Swasti Wulanyani, N., Made Rustika, I., Nugrahaeni Wideasavitri, P., Rahayu Indrawati, K., Wulan Budisetyani, P., Kadek Pande Ary Susilawati, L., Made Karisma Sukmayati Suarya, L., Marheni, A., & Studi Psikologi Fakultas Kedokteran, P. (2017). *PENDEKATAN DALAM PENELITIAN KUALITATIF*.
- Smagorinsky, P. (2013). Theory and Method in Research on Literacy Practices. In *Handbook of Research on Teaching the English Language Arts*. Routledge.
- Sulistyowati, T. (2015). Model Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Profesionalitas dan Daya Saing untuk Menghadapi Komersialisasi Dunia Kerja Women Empowerment Model in Improving Professionalism and Competitiveness to Face the Commercialization of Work World. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 1(1). www.infobanknews.com/2013/10
- van der Veer, R. (2006). Radical-Local Teaching and Learning: a Cultural-Historical Approach by M. Hedegaard and S. Chaiklin . *British Journal of Educational Studies*, 54(2), 265–267. https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2006.339_12.x
- Victor Kaptelinin, & Bonnie Nardi. (2007). *Acting with Technology : Activity theory and interaction design*.
- Yesayabela, T. M., Satyas, F. R., Musleh, M., & Rianto, B. (2023). Kolaborasi Model Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Trenggalek. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 327–346. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i3.11736>
- Yuanty, Y., Rostianingsih, D., Khoirina, S., Solina, E., Antesty, S., Sabaruddin, E. E., Hidayah, N., Mitra, S., & Jakarta, R. H. (2023). Pemberdayaan Perempuan melalui Program Pengabdian Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah: Menciptakan Kesetaraan Gender dan Kesempatan Berwirausaha. In *Jurnal Pengabdian West Science* (Vol. 02, Issue 06).